JPI
JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

VOLUME	NOMOR	TAHUN	HALAMAN	ISSN
3	2	Januari 2022	62-114	2785-7766

Model Islam Inklusif di Indonesia sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori "Clash of Civilizations" Samual P. Huntington
pp. 62-76
(Ardli Johan Kusuma; Restu Rahmawati; La Ode Muhammad Fatun)

Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Warga Berbasis Informasi Elektronik pada Aplikasi Pelayanan Dinas Kependusukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta
pp. 77-85
(Iqbal Aidar Idrus; Ummi Zakiyah)

Implementasi Sendai Framework Terhadap Respons Bencana Alam di Fillipina Tahun 2016-2020
pp. 86-97
(Safira Tasya Asadel; Andi Kurniawan; M. Chairil Akbar Setiawan)

Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi melalui Program Kartu Tani
pp. 98-106
(Oni Lestari; Hendra Wijayanto)

Vaksin dan Sentimen Publik: Sebuah Analisis
pp. 107-114
(Iradhad Taqwa Sihidi; Achmad Apriyanto Romadhan; Dedik Fitrah; Mariano)

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES
Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Bangka Belitung

CALL FOR PAPER:

Journal of Political Issues (JPI) menerima naskah hasil penelitian, kajian mauun pemikiran kritis mengenai isu-isu daam lingkup bidang politik yang orisinil dan belum pernah dimuat/dipublikasi di jurnal maupun majalah lain. Naskah diketik dengan menggunakan Ms Word menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan spasi tnggal huruf *Times New Romans*, ukuran kertas A-4, dan banyak kata berjumlah 4.500-6.000 kata atau 8-15 halaman. Naskah di *submit online* melalui laman https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI, serta dilengkapi dengan keaslian Naskah dan daftar riwayat hidup penulis. Redaksi JPI berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh redaksi, akan di *review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*). Petunjuk penulisan selengkapnya dapat dilihat di https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI

Sub tema naskah meliputi:

- Demokrasi
- Desentralisasi
- Partai Politik
- Kebijakan Publik
- Pemilu
- Kemanan dan Politik Internasional
- Gerakan Sosial
- Gender dan Politik Identitas
- Kesejahteraan Sosial
- Masyarakat dan Manajemen Publik

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES SUDAH TERINDEKS DI:

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES
Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Bangka Belitung

e-ISSN: 2685-7766

Volume 3 Nomor 2, Januari 2022

Journal of Political Issues diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2019 dan saat ini secara konsisten diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun setiap Juli dan Desember oleh Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Pengarah:
Kepala Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):
Ranto, M.A.

Redaktur (*Managing Editor*):
Komang Jaka Ferdian, M.Si.

Penyunting (*Section Editor*):
Bahjatul Murtasidin, M.Si.
Sandy Pratama, M.Si.
Rendy, M.A.
La Ode Muhamad Muliawan, M.A.
Amir Syamsuadi, M.Si.
Restu Karlina Rahayu , S.IP., M.Si

Dewan Editor (*Editorial Board*)
Dr. H. S. Tisnanta, M.H.
Dr. Yusa Djuyandi, M.Si.
Dr. Oki Hajiansyah Wahab, M.H.

***Copy Editor & Lay Out Edtior*:**
Agun Sutrisno, A.md.

Mitra Bestari (*Reviewer):*
Prof. Syarif Hidayat (Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta)
Leo Agustino, M.Si., Ph.D. (Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)
Luthfi Makhasin, M.Si., Ph.D. (Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)
Agung Wibowo, M.Si. Ph.D. (Jurusan Kehutanan, Universitas Palangkaraya, Palangkaraya)
Dr. Ibrahim, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung)
Dr. Ratnia Solihah, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung)
Dr. Sulistya Ekwati, M.Si. (Puslitbang Sosial Ekonomi KLHK, Jakarta)
Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si. (Hubungan Internasional, Unviersitas Riau, Riau)
Dr. Pahrudin HM, M.A. (Ilmu Pemerintahan, STISIP Nurdin Hamzah, Jambi)
Dr. Ardli Johan Kusuma, M.H.I. (Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)
Dodi Faedlulloh, M.Si. (Administrasi Publik, Universitas Lampung, Lampung)
Restu Rahmawati, M.A. (Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Alamat:
Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
Jl. Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kode Pos: 33172, Indonesia
Email: editor@jpi.ubb.ac.id
Url: https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI
e-ISSN: 2685-7766

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES
Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Bangka Belitung

Daftar Isi

Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori "Clash Of Civilizations" Samuel P. Huntington 62-76
(Ardli Johan Kusuma, Restu Rahmawati, La Ode Muhamad Fathun)
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.71

Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Warga Berbasis Infomasi Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta 77-85
(Iqbal Aidar Idrus, Ummi Zakiyah)
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.69

Implementasi Sendai Framework Terhadap Respons Bencana Alam Di Filipina Tahun 2016-2020 86-97
(Safira Tasya Asadel, Andi Kurniawan, M. Chairil Akbar Setiawan)
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.70

Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah) 98-106
(Hendra Wijayanto, Oni Lestari)
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.68

Vaksin dan Sentimen Publik: Sebuah Analisis
(Iradhad Taqwa Sihidi, Achmad Apriyanto Romadhan, Dedik Fitrah, Mariano Mariano) 107-114
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.72

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES
Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Bangka Belitung

Salam Redaksi

Salam Hangat. . .

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan kami saat menyampaikan edisi pertama Journal of Political Issues. Journal of Political Issues kini hadir kemballi dengan terbitan terbaru Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 yang terbit sesuai dengan jadwal yang ditargetkan. Melalui proses *Open Journal System*, secara tidak langsung dapat kita sadari bahwa peran dari teknologi dapat membantu kita dalam berbagai macam hal, terutama dalam mengelola jurnal secara elektronik.

Terbitan Januari, Volume 3 Nomor 2 kali ini memuat enam artikel berbobot dan menarik yang dikontribusikan oleh para penulis dari berbagai instansi baik di Indonesia. Berbagai macam tema dalam bidang politik dalam edisi ini akan membawa pembaca untuk lebih dekat dengan dunia sains dalam bidang Politik. Artikel pertama ditulis oleh Ardli Johan Kusuma, Restu Rahmawati, dan La Ode Muhamad Fathun mengeksplorasi tentang fenomena model Islam Nusantara yang ada di Indonesia, sebagai suatu kajian kritik terhadap pembahasan dimensi Islam dalam buku yang berjudul "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order", karya Samuel P. Huntington. Artikel kedua ditulis oleh Iqbal Aidar Idrus dan Ummi Zakiyah yang menggambarkan terkait fungsi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Berbasis Informasi Elektronik (Si Mas Gesit) untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang persyaratan yang diperlukan terkait dengan pengelolaan administrasi kependudukan. Artikel ketiga ditulis oleh Safira Tasya Asadel, Andi Kurniawan, dan M. Chairil Akbar Setiawan menjelaskan bahwa Sendai Framework for Disaster Risk Reduction dapat membantu Filipina sebagai negara rentan bencana untuk mengembangkan manajemen bencana khususnya di dalam tanggap darurat bencana. Artikel keempat ditulis oleh Hendra Wijayanto dan Oni Lestari yang menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani pada petani nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, berlandasakan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 11/Kpts/SR.310/30/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020. Artikel kelima ditulis oleh Iradhad Taqwa Sihidi, Achmad Apriyanto Romadhan, Dedik Fitrah dan Mariano Mariano yang menunjukkan bahwa sentimen publik yang terbentuk berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi cenderung positif atau mendukung untuk dijalankan program vaksinasi. Kesimpulan diperoleh melalui dominasi data yang dianalisis dengan kecenderungan utama mendukung arah kebijakan pemerintah. Sentimen positif tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah dan publik yang mengharapkan normalisasi kehidupan pasca pandemi Covid-19.

Akhirnya, Journal of Political Issues mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim pengelola edisi Journal of Political Issues Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 serta kepada mitra bestari (*Reviewer)* yang berperan aktif membantu penerbitan jurnal ini. Journal of Political Issues tidak akan pernah berhenti untuk mengedepankan kualitas artikel yang diterbitkan dan terus berusaha secara konsisten untuk mempersiapkan dan mempersembahkan pengetahuan baru dalam lingkup Politik. Kami berharap artikel-artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan. Kami juga mengajak para pembaca berkontribusi untuk berbagi ilmu dan bidang keahliannya untuk menuliskan karya ilmiah dalam bentuk jurnal di edisi Journal of Political Issues Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 yang akan terbit sesuai dengan target terbitan. Terima Kasih.

Selamat membaca,
Salam Publikasi!

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES
Volume 3, Nomor 2, Januari 2022, pp. 62-76
ISSN: 2685-7766

Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori "Clash Of Civilizations" Samuel P. Huntington

Ardli Johan Kusuma[1], Restu Rahmawati[1], La Ode Muhammad Fathun[2]
[1]Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12540, Jakarta-Indonesia
[2]Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12540, Jakarta-Indonesia

Info Artikel
Dikirim: 28 Nov, 2021
Diterima: 25 Jan, 2022
Dipublikasi: 31 Jan, 2022

Kata Kunci:
Clash of Civilization Theory; Islam Berkemajuan; Islam Nusantara; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama;

Koresponden:
Ardli Johan Kusuma

Prodi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12540, Jakarta-Indonesia

Email:
Ardli.johan@yahoo.com

Sitasi Cantuman:
Kusuma, A. J., Rahmawati, R. & Fathun, L. M., (2022). Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori "Clash Of Civilizations" Samuel P. Huntington. *Journal of Political Issues. 3(2); 62-76.* https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.71

DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.71

Lisensi:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)
OPEN ACCESS

ABSTRAK

Abstract *This article explores the phenomenon of the inclusive Islamic model that exists in Indonesia, as a critical study of Samuel P. Huntington's "Clash of Civilization" theory. The results of the discussion in this article have shown some of the weaknesses of the "Clash of Civilization" theory developed by Samuel P. Huntingtong, especially when viewed from a theoretical and historical approach. For example, there are inconsistencies in using the realist paradigm in the development of the theory. In addition, Huntington also experienced confusion to choose between a geographical basis or a religious basis in identifying the civilization in question. And historical facts have also shown that many conflicts that occur in this world are not based on differences in civilization. Moreover, it is found that the discussion on the Islamic dimension in the book only takes references from Middle Eastern Islam, which is in stark contrast to the phenomenon of the Nusantara Islam model practiced by Nahdlatul Ulama and Progressive Islam practiced by Muhammadiyah in Indonesia. The point of this article is to show that there is a contradictory phenomenon shown by Islamic civilization in Indonesia which is very contradictory to the discussion of the Islamic dimension in Huntington's book. Indonesia, which is the country with the largest Muslim population in the world, with the inclusive Islamic model in it has been able to show a different dimension of Islam from what Huntington describes in his book. The Nusantara Islam model pioneered by the largest Islamic organizations in Indonesia and even the world, namely NU (Nahdlatul Ulama) and Muhammadiyah has been able to demonstrate an Islamic model that is moderate, anti-radical, inclusive, and tolerant.*

Abstrak Tulisan artikel ini mengeksplorasi tentang fenomena model Islam inklusif yang ada di Indonesia, sebagai suatu kajian kritik terhadap teori "Clash of Civilization" Samuel P. Huntington. Adapun hasil pembahasan dalam artikel ini telah menunjukkan tentang beberapa kelemahan dari teori "Clash of Civilization" yang dibangun oleh Samuel P. Huntingtong, terutama jika dilihat dari pendekatan teoritis maupun pendekatan sejarah. Misalnya saja adanya inkonsistensi dalam menggunakan paradigma realis dalam pembangunan teorinya. Selain itu Huntington juga mengalami kebingugan untuk memilih antara landasan geografis ataukah landasan agama dalam mengidentifikasi peradaban yang dimaksud. Serta fakta sejarah juga telah menunjukkan bahwa banyak konflik yang terjadi di dunia ini tidak didasari oleh adanya perbedaan peradaban. Terlebih lagi ditemukan fakta bahwa pembahasan tentang dimensi Islam dalam buku tersebut hanya mengambil referensi dari Islam Timur Tengah, yang sangat bertolak belakang dengan fenomena model Islam Nusantara yang dipraktikkan oleh Nahdlatul Ulama dan Islam Berkemajuan yang dipraktikkan Muhammadiyah di Indonesia. Inti dari artikel ini adalah ingin menunjukkan adanya fenomena yang bertolak belakang yang ditunjukkan peradaban Islam di Indonesia yang sangat bertolak belakang dengan pembahasan dimensi Islam dalam buku yang ditulis Huntington. Indonesia yang menjadi negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, dengan model Islam inklusif yang ada di dalamnya telah mampu menunjukkan dimensi Islam yang berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Huntington dalam bukunya tersebut. Model Islam Nusantara yang dipelopori oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia yaitu NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah telah mampu menunjukkan model Islam yang bersifat moderat, anti radikal, inklusif, dan toleran..

Tentang:
Ardli Johan Kusuma, Menyelesaikan Studi S3 di Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Hak Cipta© 2022. Dimiliki oleh Penulis,
Dipublikasi oleh Journal of Political Issues.
Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

Restu Rahmawati, menyelesaikan studi S2 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

La Ode Muhammad Fathun, menyelesaikan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

1. PENDAHULUAN

Setelah berakhirnya perang dingin, yang kemudian ditandai dengan peristiwa terpecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, yang mana hal tersebut berdampak pada munculnya "pemenang" yaitu blok barat di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, yang membuat masyarakat internasional tidak lagi dihantui kecemasan akan terjadinya perang besar seperti perang dunia pertama ataupun perang dunia kedua. Mengingat ketika itu perang dingin melibatkan dua kekuatan besar yang siap meledak kapanpun, karena masing-masing pihak baik blok barat maupun blok timur sama-sama memiliki senjata nuklir yang bisa menghancurkan dunia. Namun kecemasan tersebut segera menghilang setelah Uni Soviet bubar. Setelah berakhirnya perang dingin tersebut, muncul keyakinan bahwa dunia internasional tidak lagi menghadapi ancaman terjadinya konflik besar, terlebih lagi, konflik yang didasari adanya perbedaan ideologi. Keyakinan tersebut, setidaknya didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh Francis Fukuyama, dimana dia berpendapat bahwa dengan berakhirnya perang dingin merupakan akhir dari sejarah itu sendiri, yaitu titik akhir dari proses evolusi ideologis manusia dan kemudian memunculkan universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan yang diterapkan umat manusia (Fukuyama, 2004).

Namun anggapan bahwa dunia akan damai mulai diragukan setelah muncul pemikiran dari seorang guru besar sekaligus ketua jurusan Ilmu Politik dari Universitas Harvard, yang juga menjadi ketua *Harvard Academy* untuk kajian Internasional dan Regional di *Weatherhead Center For International Affairs*, yang bernama Samuel Philips Huntington, mengeluarkan sebuah tesis yang merupakan anti-tesis dari Francis Fukuyama. Tesis dari Samuel P. Huntington tersebut dijabarkan secara lengkap dalam sebuah buku yang telah diterbitkannya pada tahun 1996 dengan judul *"The Clash of Civilization and the Remaking of World Order"* (Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia).

Dalam bukunya tersebut, Huntington membuat argumen yang bertentangan dengan Fukuyama. Jika Fukuyama mengatakan bahwa dunia akan damai setelah kemenangan ideologi demokrasi yang liberal sehingga negara-negara tidak akan lagi mengalami konflik atau benturan ideologi, maka Huntington berpendapat bahwa pasca perang dingin diprediksikan masih akan tetap terjadi benturan. Huntington dengan percaya diri mengajukan sebuah tesis bahwa pasca perang dingin dunia ini akan memasuki dalam sebuah era dimana benturan kebudayaan akan terjadi. Konflik atau benturan yang didasari oleh identitas dari beberapa kelompok yang juga sudah dipetakan oleh Huntington akan mendominasi bentuk-bentuk gesekan yang akan terjadi pasca perang dingin.

Dalam tesisnya tersebut, Huntington membagi peta dunia ke dalam tujuh atau delapan peradaban besar. kekuatan-kekuatan dunia dibagi berdasarkan teritori di bawah kontrol politis berbagai peradaban di dunia. Diantaranya adalah: Barat, Afrika, Cina, Hindu, Islam, Jepang, Amerika Latin, Ortodoks, dan Lainnya (peradaban-peradaban kecil yang tersebar di seluruh dunia) (Huntington, 2012). Tetapi satu hal yang menjadi menarik dalam tesis tersebut adalah, Huntington menyebutkan bahwa intensitas benturan peradaban yang paling banyak terjadi, baik yang telah terjadi di masa lampau, ataupun yang akan terjadi di masa depan (menurut prediksi Huntington) adalah benturan antara dua peradaban besar dunia yaitu peradaban barat dengan peradaban Islam.

Perbedaan peradaban dan identitas diprediksikan oleh Huntington akan menjadi pemicu terjadinya bentuk benturan-benturan yang akan terjadi "dalam dunia baru". Konflik yang nantinya akan paling mudah menyebar sekaligus paling berbahaya, justru bukanlah konflik yang terjadi antar kelas sosial, antara golongan kaya dengan golongan miskin, atau antar kelompok (kekuatan) ekonomi yang lainnya. Konflik justrua akan muncul antara orang-orang yang memiliki entitas-entitas budaya yang berbeda-beda. Perselisihan antar suku dan konflik antar etnis dalam konteks peradaban akan senantiasa terjadi. Kekerasan yang terjadi dkarena disebabkan terjadinya konflik antar negara dan antar peradaban, secara langsung maupun tidak langsung akan mengundang negara-negara dan kelompok-kelompok peradaban lain untuk memberikan dukungan terhadap negara-negara atau kelompok-kelompok yang dianggap semiliki entitas yang sama. Perbedaan kebudayaan atau identitas akan memicu terjadinya konflik yang bersifat lokal. Kemudian konflik yang bersifat lokal tersebut akan meluas secara global. Itulah pemikiran Huntington yang dikembangkan dalam bukunya yang berjudul "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order".

Masyarakat Internasional banyak yang mengalami kekhawatiran terkait teori Huntington tersebut jika benar-benar terjadi. Mengingat peradaban Islam dan peradaban barat, serta peradaban yang lain merupakan suatu komunitas manusia yang sangat besar. Sehingga ditakutkan akan terjadi konflik dengan skala yang besar. Negara Indoensia yang merukapak negara muslim terbesar di dunia (dilihat dari jumlah penduduk yang beragama Islam), tentunya bukan tidak mungkin akan terseret pada kondisi konflik seperti yang digambarkan oleh Huntington tersebut. *Pew Research Centers Forum on Religion and Public Life* telah merilis hasil survey yang dilakukannya pada tahun 2009 yang memetakan penduduk muslim secara global. Hasilnya antara lain, pemeluk agama Islam berjumlah 1,57 miliar atau setara dengan (23%) dari jumlah total penduduk dunia yaitu sebanyak 6,8 miliar. Sementara itu, sebagian besar umat Islam menetap di wilayah Asia yaitu sebanyak (60%), yang mana sebanyak 20 % ada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Indonesia merupakan negara muslim terbesar dengan pemeluk Islam yang berjumlah 203 juta atau setara dengan (13%) dari total penduduk muslim di dunia, dan juga, Indonesia dianggap sebagai negeri paling religius (Mufid, 2013). Sebagai negara yang menyandang gelar negara Islam terbesar di dunia, Indonesia tidak terlepas dari permasalahan yang bersinggungan dengan masalah budaya ataupun peradaban. Terlebih lagi posisi Indonesia yang merupakan negara yang memiliki corak masyarakat yang beragam kebudayaannya dari sabang sampai merauke. Tidak hanya dari segi budaya, namun secara segi agama pun Indonesia merupakan negara yang multi agama, dimana Indonesia memiliki lima agama resmi yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan beberapa agama yang lain. Yang secara resmi dilindungi oleh pemerintah Indonesia.

Keberagaman Indonesia jika dilihat dari teori benturan antar peradaban maka potensi gesekan atau benturan di Indonesia sangat tinggi. Tantangan itu juga dihadapi oleh Islam di Indonesia, karena Islam masuk ke Indonesia setelah agama Hindu dan Budha yang sudah berkembang lebih dulu di Indonesia. Namun sejarah sudah membuktikan bahwa masuknya agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai. Tidak hanya itu, setelah Islam berkembang di Indonesia dan berhasil menjadi agama yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, tidak lantas mebuat agama Islam di Indoensia melakukan hegemoni budaya dan menghilangkan peradaban non-Islam di Indonesia. Yang terjadi justru sebaliknya, dimana mayoritas masyarakat Islam di Indonesia mampu mengakulturasikan peradaban non-Islam dengan peradaban Islam yang berkembang itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan pola yang berbeda dengan apa yang telah diprediksikan oleh Huntingtan terkait akan terjadinya benturan peradaban. Islam mayoritas di Indonesia ternyata menunjukkan bahwa Islam mampu melakukan pendekatan yang akulturatif dengan peradaban non-muslim yang sebenarnya sudah lama hidup di Indonesia sebelum Islam itu sendiri masuk.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Islam inklusif di Indonesia yang kemudian digunakan sebagai studi kritis dalam melihat teori *"Clash of Civilization"* yang telah pemprediksikan bahwa pasca perang dingin akan terjadi benturan antar peradaban, dimana menurut Huntington yang paling banyak intensitas benturannya adalah peradaban barat dan Islam. Tulisan ini akan mencoba menganalisa bagaimana Huntington menggambarkan Islam dalam bukunya yang berjudul *"The Clash of Civilization and the Remaking of World Order",* dengan mendiskripsikan praktik Islam yang inklusif di Indensia sebagai negara Islam terbesar di dunia. Sehingga hasil studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa model Islam yang dipraktikkan di negara Islam terbesar di dunia (Indonesia) menunjukkan fakta yang sebaliknya dari apa yang digambarkan oleh Huntington dalam bukunya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana seluruh data akan disajaikan dalam bentuk kalimat. Sementara data dikumpulkan dengan studi literatur dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti: dokumen resmi, jurnalistik baik cetak maupun online, jurnal ilmiah, buku, serta sumber website yang dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan rujukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori *"Clash of Civilization"*

Huntington, telah mengemukakan bahwa politik dunia saat ini telah memasuki fase yang baru. Hal ini dbarengi dengan munculnya para intelektual yang sudah berani mengembangkan visi-visi pemikiran tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. misalnya saja visi berakhirnya sejarah, kemudian kembalinya lawan-lawan tradisional di antara negara bangsa, serta runtuhnya negara bangsa yang disebabkan oelh adanya tarik-menarik yang disertai munculnya konflik antara tribalisme dan globalisme. Huntington sendiri telah melakukan sebuah studi yang kemudian merumuskan sebuah teori yang bersifat "prediktif", dimana dia memprediksi bahwa konflik-konflik yang akan terjadi dalam dunia modern (pasca perang dingin) tidak lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor ideologi ataupun faktor-faktor ekonomi. Melainkan konflik yang terjadi akan lebih dilatar belakangi oleh perbedaan peradaban. Dimana Huntington dalam artikelnya menyebutkan:

> *"It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world wil not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. Nation state will remain the most powerful actors in world affairs, but the pricipal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilizations. The clash of civilizations will be the battle lines of the future"* (Huntington, 1993).

Dari pernyataan tersebut, dengan jelas Huntington telah berteori mengenai pola-pola konflik dunia modern atau era pasca perang dingin. Dimana dalam prediksinya, konflik-konflik yang akan terjadi akan dipengaruhi karena adanya benturan peradaban, terutama peradaban Islam dan peradaban barat.

Teori benturan peradaban (Clash of Civilizaton) yang dikemukakan Huntington merupakan bentuk responnya terhadap pendapat Francis Fukuyama, dimana dalam bukunya yang berjudul "The End of History and The Last Man", yang diterbitkan tahun 1992, dimana dia berpendapat bahwa dengan berakhirnya perang dingin akan menjadikan akhir dari sejarah itu sendiri. Hal tersebut akan menjadi titik akhir dari evolusi ideologis manusia, dan memunculkan universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan yang akan diterapkan oleh umat manusia. Fukuyama berpendapat bahwa setelah kelompok liberal

memenangkan perang dingin maka itulah berakhirnya sejarah dinamika ideologi. Karena dia berpendapat bahwa menangnya Amerika Serikat dan sekutunya menandai bahwa ideologi demokrasi liberal merupakan ideologi yang secara universal dapat diterima dan akan membuat dunia damai. Karena menurutnya tidak akan ada lagi benturan ideologi atau perang, karena sisten demokrasi yang digunakan secara universal akan mencegah peperangan atau benturan antar negara.

Bermula dari situ, kemudian Huntington melakukan sebuah studi yang kemudian dia menghasilkan teori benturan antar peradaban yang merupakan bentuk pertentangan atau antitesis dari teori Francis Fukuyama. Sementara pemahaman tentang peradaban yang dijelaskan Huntington juga perlu dipahami untuk bisa melihat secara utuh apa yang dimaksud oleh Huntington tentang benturan antar peradaban. Dalam bukunya yang berjudul *"The Clash of Civilization and the Remaking of World Order",* dia mendefinisikan apa yang dimaksud dengan peradaban. Namun sebelumnya Huntington juga telah merujuk pada beberapa pengertian peradaban menurut para ahli yang lain. Diantaranya adalah, pemikiran Braudel yang mendefinisikan peradaban sebagai wilayah kultural (sekumpulan karakteristik dan fenomena kultural). Sementara menurut Wallerstein, peradaban diartikan sebagai seperangkat pandangan dunia, atau kebiasaan-kebiasaan, struktur-struktur (sosial) dan kebudayaan tertentu (baik kebudayaan material maupun bentuk kebudayaan-kebudayaan yang lebih tinggi) yang kemudian membentuk berbagai corak kesejarahan dan eksistensinya yang bersifat simultan dengan keberadaan anekaragam fenomena-fenomena yang lain. Kemudian peradaban menurut Dawson dimaknai sebagai sebuah produk dari "suatu proses tertentu dari kreativitas budaya yang merupakan hasil karya dari sekelompok orang (atau masyarakat tertentu). Sementara bagi Durkheim dan Mauss, peradaban dianggap sebagai suatu corak "wilayah" moral yang dilingkupi sebuah bangsa, dengan kebudayaan masing-masing yang hanya menjadi suatu bentuk tertentu dari keseluruhan. Dari beberapa pemikir tersebut Huntington, dalam bukunya menyimpulkan bahwa Peradaban adalah entitas paling luas dari bentuk budaya (Huntington, 2012).

Dalam melakukan konseptualisasi mengenai peradaban Huntington menjelaskan lebih jauh dengan mengatakan bahwa: darah, bahasa, agama, pandangan hidup merupakan faktor yang bisa mencirikan sebuah masyarakat tertentu. Namun dia menambahkan bahwa seluruh faktor objektif yang merumuskan berbagai bentuk corak peradaban, faktor yang paling mempengaruhi corak peradaban pada umumnya adalah "faktor agama". Hal tersebut menunjukkan kebingungan Huntington dalam merumuskan konseptual serta pembagian peradaban dunia. Apakah dunia ini mau dibagi atas peradaban berdasarkan agama, wilayah geografis atau berdasarkan bentuk yang lain.

Namun jika dilihat lebih cermat lagi dalam bukunya, Huntington mencoba untuk menutupi kebingungannya dengan menekankan agama sebagai pengaruh utama dalam mengidentifikasi sebuah peradaban. Lebih utama lagi peradaban dunia ini utamanya dipengaruhi oleh agama Kristen dan Islam yang dianggap ua agama ini paling banyak menaungi kelompok-kelompok masyarakat pada level terkecil yang berasal dari berbagai suku bangsa (Huntington, 2012). Dari kompleksitas dan sulitnya memahami peradaban, Huntington menekankan pada faktor agama yang mempengaruhi peradaban. Dan dalam konteks teorinya tentang benturan peradaban maka agama Islam dan agama Kristen adalah yang paling berpengaruh, sekaligus sebagai peradaban yang paling keras benturannya.

Pembahasan Dimensi "Islam" Dalam Buku *"The Clash of Civilization and the Remaking of World Order"*

Huntington memprediksikan bahwa intensitas benturan peradaban yang paling banyak terjadi (menurut prediksi Huntington) adalah benturan antara dua peradaban besar dunia yaitu peradaban barat dengan peradaban Islam. Untuk itu dalam bukunya, Huntington telah banyak

membahas mengenai Islam. Dimana secara garis besar Huntington memecah bukunya kedalam lima bagian utama. Dari ke-lima bagian dalam buku tersebut, setidaknya ada dua bagian yang terdiri dari tidak kurang dari enam sub-judul, yang secara khusus membahas tentang Islam dan hubungannya dengan barat.

Dua dari lima bagian yang membahas secara khusus tentang Islam adalah bab ke-dua dan bab ke-empat dalam buku "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order" tersebut. Adapun dalam bagian ke-dua, Huntington menempatkan Islam sebagai pihak peradaban yang menyebabkan terjadinya destabilisasi di dunia internasional yang berdampak pada negara-neagra non-Islam termasuk negara-negara barat. Dalam penjelasannya Huntington menyebutkan "Negara-negara Islam mengalami ledakan penduduk yang berdampak pada destabilisasi yang tidak hanya menimpa negara-negara Islam itu sendiri, tetapi juga negara-negara tetangga mereka; dan peradaban-peradaban non-barat secara umum menegaskan kembali nilai-nilai budaya mereka sendiri" (Huntington, 2012).

Secara jelas Huntington menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk muslim di dunia yang menyebabkan terjadinya destabilisasi di dunia internasional. Islam seolah menjadi *"trouble maker"* dalam kasus terjadinya benturan antar peradaban yang menyebabkan dunia tidak stabil. Selain itu Huntington juga menunjukkan rasa kekhawatiran dari pihak barat terhadap bangkitnya peradaban non-barat, dalam hal ini tentu saja yang paling ditakuti adalah peradaban Islam. Hal itu terlihat dari pernyataan Huntington yang menggambarkan kecemasan barat ketika masyarakat non-barat, termasuk Islam mulai menjunjung nilai-nilai budaya mereka sendiri.

Kemudian pembahasan secara khusus tentang Islam dalam bukunya Huntington dimasukkannya kedalam bagian ke-empat. Dimana dalam bagian empat tersebut Huntington membangun konstruksi kesimpulan bahwa konflik yang terjadi antara kaum muslim dan kaum non-muslim menyebabkan terjadinya pecah konflik secara global. Karena menurutnya negara-negara yang merasa serumpun akan memberikan dukungannya. Dalam bagian tersebut Huntington mengambil contoh konflik yang terjadi di negara-negara Islam untuk menguatkan argumennya bahwa konflik yang terjadi pada level lokal oleh kaum muslim menyebabkan pecah konflik yang berskala global. Dalam membangun opini Huntington menggunakan contoh-contoh seperti perang di Afganistan, perang teluk, konflik Arab dan Israel, konflik kelompok syi'i Lebanon dengan kelompok Maronit. Huntington ingin membangun sebuah pandangan bahwa konflik lokal yang terjadi atau yang dialami kaum muslim, menjadi penyebab pecahnya konflik yang lebih luas. Sehingga dalam hal ini Islam ditempatkan pada objek peradaban yang menyebabkan terjadinya benturan peradaban. Secara keseluruhan, Huntington lebih banyak berbicara soal konflik yang akan terjadi antara Islam dan barat. Namun Huntington banyak melakukan kesalahan ketika melakukan penjabaran soal Islam. Huntington terlalu menempatkan Islam pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kasus ini. Islam dijadikan objek penempatan kesalahan sekaligus penyebab konflik. Konstruksi mengenai cerita-cerita yang tidak menguntungkan bagi umat Islam ini kemudian memancing berbagai tanggapan yang bersifat mengkritik terhadap buku karya Huntington yang berjudul "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order". Karena memang ada beberapa hal yang kurang tepat yang telah dilakukan Huntington dalam menggambarkan Islam. selain itu ada juga beberapa kelemahan atas konstruksi bangunan teori yang diajukan Huntington.

Secara pendekatan teoritis misalnya, terdapat kelemahan yang dilakukan oleh Huntington dalam membangun teorinya. Dimana terdapat inkonsistensi pendekatan yang dilakukan oleh Huntington. Dia tidak konsisten dalam menggunakan pendekatan paradikma realis dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Padahal Huntington ingin menghasilkan bagian dari teori *" World power politics"* dimana teori tersebut termasuk dalam paradikma realis dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Namun ketika Huntington menjelaskan mengenai pembentukan aliansi dalam dunia internasional, justru Huntington menempatkan

peradaban sebagai landasan atau dasar pembentukan sebuah aliansi. Dimana menurut Mian Muhammad, untuk mengidentifikasi dasar dari pembentukan aliansi akan lebih tepat jika menggunakan teori kepentingan nasional yang merupakan bagian dari paradikma realis dalam Ilmu Hubungan Internasional, bukannya menggunakan landasan peradaban seperti yang diakukan Huntington. Selain itu teori Huntington juga memiliki kelemahan dalam pendekatan unit analisis yang digunakan. Dimana unit analisa yang digunakan oleh Huntington adalah peradaban. Namun Huntington gagal mendefinisikan peradaban yang seharusnya definisi tersebut bisa dipahami sebagai pemahaman universal sebagai peradaban, karena peradaban merupakan entitas yang sangat besar, sehingga dibutuhkan pendefinisian yang bisa dipahami secara universal. Selain itu Huntington juga telah gagal dalam mendefinisikan peradaban Islam. Dalam membangun argumen dalam teorinya, Huntington lebih mengedepankan prinsip-prinsip geografis dalam membagi peradaban dunia. Sementara Islam merupakan agama yang universal, sehingga peradaban Islam tidak bisa dibatasi oleh prinsip-prinsip geografis yang memisahkan antar peradaban sebagaimana telah disampaikan Huntington. Sehingga Huntington telah gagal dan salah total dalam mengidentifikasi peradaban Islam yang seharusnya bersifat universal tanpa dibatasi oleh batas-batas geografis (Ashraf, 2012).

Selain itu Huntington juga telah melakukan generalisasi yang berlebihan. Huntington tidak mau melihat kenyataan bahwa peradaban barat ataupun Islam sebenarnya tidak dapat diidentifikasikan sebagai satu identitas yang akan bertindak sama. Peradaban barat maupun Islam masing-masing memiliki variasi yang berbeda-beda. Didalam internal peradaban barat maupun Islam, mereka memiliki variasi dinamika tersendiri. Bahkan tidak jarang telah terjadi konflik di dalam satu peradaban yang sama (Yang, 2009), (Crone, 2014; Yang, 2009).

Selain kelemahan-kelemahan dari pendekatan teoritis, argumen Huntington dalam teori *"Clash of Civilization"* juga memiliki kelemahan dari sisi *"historical aproach"*. Huntington telah berpendapat dalam bukunya bahwa konflik di era paska perang dingin banyak disebabkan karena adanya benturan antar peradaban yang berbeda. Namun sejarah telah membuktikan bahwa teori Huntington tersebut tidaklah benar. Karena fakta telah membuktikan bahwa konflik yang terjadi baik sebelum perang dingin, selama perang dingin, ataupun setelah (pasca) perang dingin, tidak terdapat korelasi yang signifikan mengenai hubungan antara peradaban dan konflik yang terjadi. Bahkan konflik yang terjadi baik sebelum, selama dan pasca perang dingin justru banyak terjadi antar negara-negara yang memiliki peradaban yang sama, misalnya konflik Bosnia, Teluk Persia dan Nagorno-Karabakh, konflik Sulu (Filipina)-Malaysia, bahkan konflik Indonesia-Timor Leste dan konflik antara pemerintah Indonesia-GAM. Dimana konflik-konflik yang terjadi tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan peradaban, tetapi disebabkan oleh kepentingan (Henderson & Tucker, 2001).

Pada masa pasca perang dingin banyak negara non-barat, (termasuk negara-negara Islam) yang kemudian bergabung kedalam sistem demokrasi. Dengan demikian justru fenomena yang terjadi adalah kebalikan dari tesis Huntington. Karena negara yang bergabung dalam sistem demokrasi atau "*Joint Democracy"* justru memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk berkonflik. Hal ini juga membuktikan bahwa Islam tidak menutup diri untuk melakukan akulturasi dengan peradaban ataupun kebudayaan di luar Islam. Bahkan pada realitasnya banyak negara-negara non-barat (termasuk negara-neagra Islam) yang bersedia mengadopsi modernisasi dari barat terutama dibidang tehnologi, kesehatan, kemampuan persenjataan dan yang lainnya, tanpa menjadi barat itu sendiri. Artinya beberapa kebudayaan dan peradaban barat dapat diakulturasikan oleh peradaban-peradaban non-barat, termasuk peradaban Islam. hal ini semakin menunjukkan kelemahan dari teori yang diajukan oleh Huntington.

Penempatan peradaban Islam sebagai peradaban yang dianggap sebagai *"trouble maker"* sebenarnya disebabkan oleh referensi tentang Islam yang digunakan oleh Huntington

dalam membahas dimensi Islam dalam buku *"The Clash of Civilization and the Remaking of World Order"* tersebut. Dia tidak melihat kehidupan peradaban Islam yang mempu menunjukkan toleransi terhadap peradaban di luar Islam. misalnya Huntington tidak menggunakan referensi kehidupan Islam di Indonesia yang notabene merupakan negara dengan jumlah penduduknya yang memeluk agama Islam terbesar di dunia. Padahal, agama (termasuk Islam) dengan segala dimensinya, bisa menjadi faktor penting yang berpotensi mampu mempengaruhi pola hubungan internasional. Oleh karena itu, memahami agama (termasuk memahami Islam) sangat penting tanpa mencampuradukkannya dengan berbagai fenomena sosial yang diciptakan oleh agama itu sendiri (Sheikh, 2014).

Islam di Indonesia Sebagai Model Peradaban Islam yang Inklusif

Gambaran dimensi Islam yang ada dalam buku "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order", berasal dari pemahaman Huntington mengenai Islam yang bersumber dari referensi Islam Timur Tengah yang untuk saat ini cenderung menunjukkan fenomena konflik. Sebut saja seperti Libya, Suriah, Iraq, Mesir, Yaman yang sering dilanda konflik. Fenomena itu yang dimaknai oleh Huntington bahwa Islam adalah peradaban yang seolah-olah selalu bersinggungan dengan kekerasan dan konflik.

Padahal seharusnya terlebih dahulu dia harus melakukan studi yang mendalam untuk memahami tentang "Islam" supaya dapat menggambarkan Islam secara komperehensif. Dimana menurut Hamim Ilyas dalam tulisannya, *"ISLAM RISALAH RAHMAT DALAM AL-QURAN (Tafsir Q.S. al-Anbiya', 21: 107)",* menyebutkan bahwa belum ada suatu kesepahan untuk memahami apa itu "Islam". Hamim Ilyas menyebutkan bahwa *"Islam merupakan risalah rahmat yang telah populer di kalangan umat. Namun konsepnya -sepanjang pengetahuan penulis- belum dielaborasi secara serius dan memadai, sehingga pengetahuan tersebut tidak berkembang menjadi wacana yang menghasilkan ketentuan atau kriteria tentang keislamaan yang jelas dan operasional"*. Namun demikian, dia kemudian mencoba untuk menjelaskan "Islam" dengan cara menggunakan salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an untuk membangun kerangka konseptual terkait "Islam" itu sendiri. Ayat yang digunakan tersebut adalah Q.S. al-Anbiya', 2l: 11O7, yang artinya: "*Kami tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam".* Dalam tulisannya tersebut, Hamim Ilyas menyebutkan bahwa Islam merupakan suatu organisme yang hidup. Sehingga ketika Islam dinyatakan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, maka berarti agama Islam itu memberikan kasih dan memberikan kebaikan secara aktual terhadap seluruh alam. "Islam" yang tidak memberikan kasih dan kebaikan secara aktual, berarti menjadi agama yang laknat. Kemudian dia menyimpulkan bahwa "Islam itu adalah rahmat dan agama yang tidak menjadi rahmat itu bukan Islam" (Ilyas, 2007).

Dalam tulisannya tersebut, Hamim Ilyas dengan jelas mengatakan bahwa "Islam itu adalah rahmat dan agama yang tidak menjadi rahmat itu bukan Islam". Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memberikah Rahmat, (dalam bahasa Arab: *rahmah)* yaitu *riqqah taqtadli al-ihsan ila al-marhum,* perasaan halus (kasih) yang kemudian mendorong untuk memberikan kebaikan kepada yang dikasihi, dan hal itu bersifat universal. Karena Islam harus memberikan rahmat kepada seluruh alam, dan bukan hanya bagi manusia saja, apalagi bagi orang muslim saja. Sehingga ketika Huntington menggambarkan secara panjang lebar terkait "Islam" dalam buku*"The Clash of Civilization and the Remaking of World Order"* dengan penjelasan yang cenderung "negatif" maka yang terjadi Hunitngton tidaklah sedang menjelaskan Islam. Tetapi dia sedang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penyimpangan terhadap Islam.

Kemudian pandangan Huntington tentang Islam dalam bukunya tersebut dapat dengan mudah dinegasikan dengan fenomena model Islam yang ada di Indonesia. Dimana pada kenyataannya Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk yang memeluk agama Islam terbesar di dunia memiliki fenomena kehidupan sosial masyarakatnya yang

justru menunjukkan hal yang berbanding terbalik dengan gambaran Islam yang dibahas oleh Huntington dalam bukunya tersebut. Islam mayoritas di Indonesia (mayoritas orang yang memeluk agama Islam di Indonesia). mampu merepresentasikan bahwa Islam merupakan agama yang bisa mengakomodasi kepentingan yang tidak hanya menjadi kepentingan bagi umat Islam, tetapi juga kepentingan umat diluar Islam atau diluar peradaban Islam. Mayoritas umat Islam di Indonesia mampu mentoleransi peradaban di luar Islam demi tercapainya perdamaian yang merupakan bagian yang diajarkan dalam agama Islam itu sendiri. Dan Islam mayoritas di Indoneisa sudah membuktikan hal itu dari masuknya Islam pertama kali hingga berkembang menjadi agama terbesar di Indonesia saat ini.

Islam mayoritas di Indonesia (mayoritas orang yang memeluk agama Islam di Indonesia). mampu merepresentasikan bahwa Islam merupakan agama yang bisa mengakomodasi kepentingan tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga umat diluar Islam atau diluar peradaban Islam. Mayoritas umat Islam di Indonesia mampu mentoleransi peradaban di luar Islam demi tercapainya perdamaian yang merupakan bagian yang diajarkan dalam agama Islam itu sendiri. Dan Islam mayoritas di Indoneisa sudah membuktikan hal itu dari masuknya Islam pertama kali hingga berkembang menjadi agama terbesar di Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat terwujud berkat lahirnya organisasi masyarakat yang berbasis agama Islam di Indonesia yaitu NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah, yang merupakan organisasi masyarakat berbasis agama Islam yang terbesar tidak hanya di indonesia, namun terbesar di dunia, sehingga NU dan Muhammadiyah dianggap sebagai representasi umat Islam di Indonesia mengingat secara jumlah anggotanya menjadi mayoritas atas keseluruhan pemeluk agama Islam di Indonesia.

Kedua organisasi Islam terbesar di dunia ini, menunjukkan fenomena yang bertolak belakang dengan apa yang telah digambarkan oleh Huntington dalam bukunya "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order". NU dan Muhammadiyah yang notabene adalah organisasi Islam terbesar di dunia justru menunjukkan sikap-sikap yang ***inklusif*** atau terbuka dengan identitas-identitas kebudayaan non-muslim. Di Indonesia, dua organisasi masyarakat Islam terbesar di dunia ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesaia dengan mengusung toleransi antar agama dan budaya yang berbeda. Bahkan ketika banyak organisasi Islam lain di Indonesia yang ingin memaksakan syariat Islam atau hukum Islam sebagai dasar hukum negara Indonesia, NU dan Muhammadiyah mengambil sikap lain dengan tetap konsisten mendukung Pancasila yang dianggap sebuah sistem yang lebih bisa menghargai hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki orang-orang non-muslim. NU dan Muhammadiyah juga menunjukkan sikap bertoleransi antar agama ataupun antar budaya dan peradaban (Yusdani, 2006). Dua organisasi Islam besar ini tetap konsisten ingin menjaga nilai-nilai persatuan dan toleransi ditengah kondisi masyarakat yang memang memiliki keragaman budaya serta perbedaan keyakinan di Indonesia. Kedua ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu sesungguhnya adalah representasi sejarah peradaban Islam di Indonesia yang sudah berlangsung begitu lama. Bermuara dari sumber yang sama (Rasulullah Saw), NU dan Muhammadiyah menjelma sebagai organisasi keagamaan yang mencerminkan tipologi masing-masing. Tentu saja, karakter dan watak yang dimiliki dari masing-masing organisasi ibarat jalan bercabang yang muaranya sama. Sehingga penulis sama sekali tidak bermaksud untuk mendikotomikan kedua belah pihak. Dengan kata lain NU dan Muhammadiyah memang memiliki perbedaan pada beberapa dimensi, namun kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mampu menunjukkan sikap toleransi yang tinggi sehingga kedua organisasi ini dapat di sandingkan dalam bingkai semangat menghargai perbedaan dan keterbukaan, terlebih pada dimensi peradaban secara luas dan kebudayaan pada level yang lebih khusus.

Andaikata muncul pertanyaan mana Islam yang benar-benar asli maka jawabannya jelas tak ada. Sebab semua umat Muslim di dunia niscaya sepakat bahwa Islam yang *kaffah*

hanyalah merujuk kepada sosok Rasulullah Saw semata; tidak ada yang lain. Dan Islam sejak zaman Rasulullah hingga sekarang telah melintasi pergulatan waktu sangat panjang. Dinamika realitas yang terus jumbuh selama 15 abad itu terbendung menjubahi kehidupan umatnya (Mustofa, 2015). Sehingga NU dengan semangat keberagaman dan Muhammadiyah dengan semangat pembaharuan mampu menampilkan wajah Islam yang bisa dijadikan sebagai model dan acuan bagi umat Islam di seluruh dunia untuk bisa menghadirkan wajah Islam yang mengajarkan kedamaian sehingga mampu berkontribusi dalam menjaga perdamaian di seluruh dunia.

Islam Nusantara (NU) dan Islam Berkemajuan (Muhammadiyah) Sebagai Praktik Islam "Inklusif" di Indonesia

Model Islam di Indonesia yang bersifat inklusif, diartikulasikan ke dalam dua konsep yang dipraktikkan di Indonesia. Konsep yang pertama dinamakan "Islam Nusantara" yang diusung oleh Nahdlatul Ulama. Diskursus mengenai Islam Nusantara, menjadi dinamika tersendiri bagi perkembangan studi keislaman di Indonesia, terutama setelah terselenggaranya Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 33 pada bulan Agustus tahun 2015, dimana saat itulah diskursus tentang Islam Nusantara mulai dihembuskan. Definisi atau penjelasan mengenai Islam Nusantara memang masih dalam perdebatan, dan para intelektual Islam di Indonesia masih belum menemukan kata sepakat dalam memaknai konsep Islam Nusantara tersebut baik secara etimologi ataupun terminologi.

Namun demikian dalam tulisan ini akan dibahas terkait beberapa penjelasan atau definisi sebagai acuhan untuk memahami Islam Nusantara. Namun sebelumnya perlu diingat bahwa Islam Nusantara bukanlah sebagai ajaran, tetapi Islam Nusantara adalah bentuk perwujudan dari Islam secara faktual yang bisa dilihat secara sosiologis ataupun antropologis dalam masyarakat di "Nusantara (Indonesia)". Keberadaannya secara etimologi tentunya berbeda dengan Islam yang ada di Arab maupun yang ada di Barat (Irham, 2015).

Guru besar Filologi Oman Faturrahman, menjelaskan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang empirik dan distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan sastra yang ada di Indonesia (Mahbib, 2015). Lebih lanjut, Faturrahman juga ikut merintis analisa untuk menjelaskan Islam Nusantara secara historis-filologis. Metode tersebut dilandaskan pada penyelidikan teks-teks islam lama atau kuno dari para ulama yang pernah hadir di Nusantara di masa lampau.

Sementara Mustofa Bisri, dalam melihat Islam Nusantara lebih menekankan sebagai "sistem nilai", dan juga penerapannya dalam menanggapi masalah-masalah aktual yang ada dari waktu ke waktu. Mustofa Bisri memaknai Islam Nusantara cenderung melihatnya pada nilai-nilai yang selama ini diterapkan, diresapi, dan dijadikan prinsip oleh warga NU, seperti *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang/harmoni), *tawassut* (moderat), *ta'addul* (keadilan), dan *'amr ma'ruf nahi munkar*. Sehingga dalam konteks ini Islam Nusantara ditempatkan secara aksiologis (Luthfi, 2016a).

Selain itu, Islam Nusantara juga didekati secara historis antropologis. Dimana ketua PBNU Said Aqil Siradj, menyatakan : Islam Nusantara adalah Islam yang khas, yang ada di Indonesia, yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, serta adat istiadat yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, Said Aqil Siradj melihat bahwa budaya suatu daerah atau negara tertentu sejatinya memiliki posisi yang setara dengan budaya yang ada di negara Arab dalam menyerap dan menjalankan ajaran Islam. Tradisi Islam Nusantara menunjukkan tradisi Islam dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, dan melambangkan kebudayaan Islam di Indonesia (Luthfi, 2016b).

Pengertian diatas secara unik hendak mendorong komparasi yang kritis terhadap Islam yang berkembang dalam kebudayaan Arab. Islam di Indonesia, atau di kawasan lain di dunia, pada prinsipnya bersifat sejajar dengan Islam versi Arab. Penafsiran atas Islam tidak

dapat dimonopoli atau diseragamkan. Perbedaan-perbedaan sejarah, tradisi, hingga karya seni maupun sastra ikut membentuk perkembangan Islam disuatu negara atau masyarakat. Islam Nusantara mengutamakan relasi dan kesinambungannya dengan budaya local. Islam Nusantara berpijak pada perubahan yang sifatnya moderat, kompromis, dan menjauhi cara-cara kekerasan terhadap dinamika budaya masyarakat di Indonesia. Lebih lanjut Islam Nusantara pun dapat bertransformasi sebagai kekuatan kebangsaan dan kemajuan yang digelorakan oleh Soekarno pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada akhirnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara sederhana Islam Nusantara dapat dipahami sebagai sebuah gagasan nilai yang terkandung dalam pemikiran mayoritas masyarakat nusantara (Indonesia) yang beragama Islam, dengan ciri-ciri utamanya yaitu sifat inklusifisme dan toleransi terhadap nilai-nilai di luar Islam yang berkembang di nusantara.

Kehadiran Islam Nusantara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari "orang tua kandungnya", yaitu organisasi masyarakat yang berbasis agama Islam di Indonesia yaitu NU (Nahdlatul Ulama), yang merupakan organisasi masyarakat berbasis agama Islam yang terbesar tidak hanya di indonesia, namun juga terbesar di dunia. Dimana NU pada tahun 2014 diperkirakan memiliki anggota kurang lebih 83 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia (Manshur, 2014). Sehingga anggota dari NU dianggap sebagai representasi umat Islam di Indonesia mengingat secara jumlah anggotanya menjadi mayoritas atas keseluruhan pemeluk agama Islam di Indonesia.

Nahdlatul 'Ulama (*Kebangkitan 'Ulama* atau *Kebangkitan Cendekiawan Islam*), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. NU sebagai organisasi Islam yang besar sangat menjunjung tinggi nilai keberagaman. Hal ini dapat dilihat dari sejarah NU sendiri yang dilatarbelakangi oleh perjuangan kaum pesantren untuk memperjuangkan keberagaman dalam Islam.

Sikap mengahargai keberagaman dari NU, dapat dilihat dari perjuangan kaum pesantren (cikal bakal NU), Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah. Kemudian kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebsan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar.

Dilihat dari sejarah kemunculan Nahdlaul Ulama sudah menggambarkan betapa semangat untuk menghargai keberagaman yang ada di dalam organisasi tersebut menjadi

fondasi awal terbentuknya organisasi Islam terbesar ini. Bahkan semangat keberagaman tersebut pada awalnya justru muncul sebagai gerakan menghargai perbedaan yang memberikan kontribusi di level internasional, yang kemudian dampak dari perjuangan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas hingga saat ini. NU didirikan untuk menciptakan kehidupan yang beradab dan memberikan manfaat bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya bagi orang Islam saja, apalagi untuk anggota NU saja. Hal tersebut tercermin dari muqadimmah dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama 2010 yang berbunyi:

> *"Bahwa agama Islam merupakan rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi semesta alam) dengan ajaran yang mendorong terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan hidup bagi segenap umat manusia di dunia dan akhirat* (Preambule of Article of Association of Nahdlatul Ulama, 2010).

Dari kutipan muqadimmah dalam AD/ART Nahdlatul Ulama tersebut menunjukkan bahwa NU didirikan bukan hanya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Islam saja, apalagi hanya untuk anggota dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Tapi NU didirikan dengan tujuan memberikan manfaat bagi semua alam dan seisinya, termasuk didalamnya masyarakat-masyarakat diluar peradaban Islam baik yang ada di Indonesia ataupun pada level internasional. Semangat pergerakan NU dalam dimensi dakwah atau memperkenalkan dan mempromosikan Islam kepada dunia sangat dipengaruhi oleh sejarah penyebaran agama Islam yang dilakukan secara damai oleh walisongo.

Transmisi Islam yang dipelopori Walisongo merupakan perjuangan brilian yang diimplementasikan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan jalan dan alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal, serta mudah ditangkap oleh orang awam dikarenakan pendekatan-pendekatannya konkrit dan realistis, tidak *njelimet*, dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Model ini menunjukkan keunikan sufi Jawa yang mampu menyerap elemen-elemen budaya lokal dan asing, tetapi dalam waktu yang sama masih berdiri tegar di atas prinsip-prinsip Islam (Minftahuddin, 2015). Semangat perjuangan Walisongo inilah yang menjadi semangat perjuangan ormas NU hingga saat ini. Sehingga nampak jelas bahwa Islam yang diusung oleh NU merupakan penempatan agama dan keyakinan yang bisa memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi semua kalangan masyarakat sekalipun masyarakat yang posisinya diluar Islam.

Selain kehadiran NU dengan konsep Islam Nusantara, Indonesia juga memiliki Muhammadiyah yang mengembangkan dan mempraktikkan konsep Islam Berkemajuan. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H).

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi Islam besar, yang memiliki cita-cita ingin memurnikan ajaran Islam yang selama ini dianggap dalam pengamalannya masih belum murni dan banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari kepercayaan yang lain. Tetapi meskipun demikian dalam level hubungan antar umat beragama ataupun hubungan dengan masyarakat diluar peradaban Islam, Muhammadiyah memiliki sifat-sifat yang bisa menghargai peradaban ataupun kebudayaan diluar peradaban atau kebudayaan Islam. Perjuangan Muhammadiyah memang berfokus pada pemurnian ajaran Islam, tetapi dengan tidak memarjinalkan peradaban-peradaban ataupun kebudayaan diluar Islam. Bahkan Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi Islam yang paling berkompromi dengan modernisasi.

Sikap kepedulian Muhammadiyah terhadap masyarakat yang memiliki kebudayaan ataupun perdadaban, bahkan kepercayaan atau agama yang berbeda dapat kita lihat dalam

Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Jika kita merujuk dari Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, dapat kita lihat bahwa Muhammadiyah dalam konteks hubungan sosial dengan masyarakat yang memiliki keyakinan, budaya, serta peradaban yang berbeda maka Muhammadiyah lebih mengedepankan pada terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera yang tidak hanya ditujukan kepada umat Islam atau anggota Muhammadiyah saja tetapi semua masyarakat. Hal tersebut dengan jelas tertuang pada poin pertama Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Dimana "*Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk malaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi".* Dalam poin ini Muhammadiyah memiliki harapan untuk terciptanya masyarakat utama, adil, makmur. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat muslim atau masyarakat Muhammadiyah, tetapi masyarakat secara umum.

Terkait dengan praktik gerakan Muhammadiyah telah mengusung gagasan Islam Berkemajuan. Gagasan ini sendiri mulai hangat diperbincangkan, bahkan di kalangan internal Muhammadiyah sendiri, sejak konsep ini mulai dimunculkan dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-46 pada tahun 2010 yang diselenggarakan di Yogyakarta. Namun munculnya konsep tersebut pada tahun 2010 masih menjadi sebatas wacana publik, hingga kemudian wacana Islam Berkemajuan tersebut ditegaskan sebagi jati diri gerakan Muhammadiyah yang dikenal dengan istilah "gerakan pencerahan" pada Muktamar berikutnya yang diselenggarakan di Makasar pada tahun 2015 (Maarif, 2020).

Istilah Islam Berkemajuan sendiri dapat dimaknai sebagai bentuk respon warga Muhamadiyah terhadap globalisasi. Dengan adanya globalisasi yang seolah tidak terbendung, lantas Muhammadiyah mengambil sikap untuk menonjolkan sifat Islam yang kosmopolitan. Artinya Muhamadiyah secara sadar menganggap dirinya sebagai agian dari masyarakat global yang sudah seharusnya juga memberkan kontribusi terhadap kemajuan global, yang tidak hanya terbatas pada warga Muslim saja, atau warga Indonesia saja, apalagi hanya terbatas pada warga Muhammadiyah saja (Burhani, 2016). Gerakan untuk memajukan yang dilakukan Muhammdiyah berlaku global tanpa batas wilayah dan identitas sebagaimana sifat Islam yang diturunan untuk dapat bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Sehingga kelahiran gerakan Islam Berkemajuan dengan mengambil posisi sebagai Islam Kosmopolitan dalam globalisasi menunjukkan bahwa Muhammadiyah juga siap untuk berkolaborasi dengan peradaban di luar Islam untuk bersama-sama membangun peradaban yang inklusif.

Konsep Islam Berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah di tengah globalisasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan cara mempertegas jati diri yang selama ini memang sudah melekat pada diri Muhammadiyah itu sendiri sejak kelahiran orgaisasi tersebut, yang memang terlahir dengan semangat memberikan manfaat bagi alam semesta. Perubahan yang sangat cepat serta arus interaksi global yang sangat masiv dengan adanya revolusi insudtri dan transportasi membuat Muhammadiyah semakin yakin untuk menempati posisi sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia global dengan konsep "Islam Berkemajuan". Kata berkemajuan sendiri sejatinya sudah sangat melekat pada gerakan Muhammadiyah. Misalanya saja kita bisa melacak sejarah kata berkemajuan sendiri yang dalam beberapa kesempatan diutarakan oleh sang pendiri Muhammadiyah itu sendiri yaitu Kiai Dahlan, yang pernah menyampaikan istilah "pemimpin kemajuan Islam" dalam tulisannya yang berjudul "Tali Pengikat Hidup Manusia". Selain itu Kiai Dahlan juga pernah menyampaikan bahwa menjadi ulama atau kiya harus berkemajuan dan pantang lelah untuk berkonribusi terhadap Muhammadiyah (Kahfi, 2018). Dengan demikian keberadaan gagasan Islam Berkemajuan, sebenarnya bukanlah hal baru bagi Muhammadiyah.

Peran Muhammadiyah yang bersifat kosmopolitan demi kemajuan umat manusia di dunia dibuktikan dengan berbagai kiprah Muhammadiyah dalam berbagai bidang di dunia internasional. Misalnya saja Muhamadiyah secara aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang bersifat lintas batas negara. Melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) misalnya, Muhammadiyah sering terlibat dalam mengatasi krisi kemanusiaan yang terjadi di dunia internasional. tidak hanya itu, di bidang pendidikan, Muhammadiyah juga mengembangkan sayap Islam berkemajuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan peradaban dunia. Selain berperan aktif dalam dunia pendidikan di Indoensia, Muhammadiyah pada tahun 2021 juga sudah mulai berkontribusi di bidang pendidikan di negara lain, dengan mendirikan universitas Muhammadiyah di Malaysia dengan nama dengan nama Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM). Selain itu pada tahun yang sama, Muhammadiyah juga resmi Muhammadiyah medapatkan izin pembukaan sekolah pada jenjang kanak-kanak hingga Sekolah Dasar dari Pemerintah Australia melalui *Victorian Registration and Qualifications Authority (VRQA)* Department Education Victoria. Sekolah tersebut diberi nama *Muhammadiyah Australia College (MAC)*. Dengan demikian, Islam Berkemajuan tidak lagi hanya sebagai wacana bagi Muhammadiyah untuk menunjukkan kontribusinya terhadap dunia internasional, tetapi secara pasti Muhammadiyah sudah melakukannya secara praktik.

4. SIMPULAN

Dari pembahasan dalam tulisan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yang akan menuntun kita untuk memahami dimensi Islam yang dibahas oleh Huntington, dalam bukunya yang berjudul "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order". Dalam penjelasannya mengenai Islam, Huntington terlalu memojokkan Islam dengan melakukan generalisasi yang berlebihan. Huntington gagal memahami Islam itu sendiri secara objektif. Dalam memberikan gambaran mengenai Islam yang diprediksikan akan berbenturan dengan barat hanya dengan memaknai beberapa contoh kasus yang kebetulan dilakukan oleh beberapa orang yang juga secara kebetulan juga memeluk agama Islam. Selain itu konseptual yang dibangun huntington tentang peradaban "barat" dan peradaban "Islam" juga tampak jelas kerancuan indikator yang digunakan. Apakah menggunakan klasifikasi wilayah, agama, kebudayaan, tidak terlalu jelas dan membingungkan.

Namun yang jauh lebih penting daripada itu dapat disimpulkan dalam tulisan ini bahwa model Islam di Indonesia yang dipraktikkan oleh dua organisasi Islam terbesr di dunia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dengan konsep "Islam Nusantara" dan Muhammadiyah dengan konsep "Islam Berkemajuan" yang ada di Indonesia, mampu menunjukkan sifat yang bertolak belakang dengan Islam yang digambarkan oleh Huntington dalam bukunya tersebut. Model Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan yang bisa kita lihat perwujudannya dalam organisasi Islam terbesar di dunia yaitu NU dan Muhammadiyah mampu menunjukkan sikap toleransi dan menjalankan Islam sebagai agama yang mampu memberikan manfaat bagi semua. Dengan kata lain model Islam inklusif di Indonesia telah membuktikan bahwa teori yang dibangun oleh Huntington tentang benturan antar peradaban serta pembahasan dimensi Islam dalam bukunya yang berjudul "*The Clash of Civilization and the Remaking of World Order",* kurang tepat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ashraf, M. M. T. (2012). The Clash of Civilizations? A Critique. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), *32*(2), 521–527. Retrieve From https://www.bzu.edu.pk/PJSS/Vol32No22012/Final_PJSS-32-2-19.pdf

Burhani, A. N. (2016). Islam Nusantara VS Berkemajuan. In A. Mu'ti, F. R. Ulhaq, A. Khoirudin, & A. F. Fanani (Eds.), *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan Catatan Kritis*

Muktamar Teladan ke-47 Muhamamdiyah di Makasar 2015 (1st ed.). Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Crone, M. (2014). Religion and Violence: Governing Muslim Militancy through Aesthetic Assemblages. *Millennium*, *43*(1), 291–307. https://doi.org/10.1177/0305829814541166

Fukuyama, F. translated by M. A. (2004). *The End of History and The Last Man*. Yogyakarta: Qalam.

Henderson, E. a, & Tucker, R. (2001). Clear and Present Strangers : The Clash of Civilizations and International Conflict. *International Studies Quarterly*, *45*(February 1999), 317–338. https://doi.org/10.1111/0020-8833.00193

Huntington, S. P. translated by Ismail, M. S. (2012). *THE CLASH OF CIVILIZATION AND THE REMAKING OF WORLD ORDER*. Yogyakarta: Qalam.

Huntington, S. P. (1993). The clash of civilization? *Foreign Affairs*. https://doi.org/10.2307/1252166

Ilyas, H. (2007). Islam Risalah Rahmat Dalam Al-Quran (Tafsir Q . S . al-Anbiya ', 21 : 107). *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, *6*(2), 257. Retrieved from http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8500/1/HAMIM%20ILYAS%20%20ISLAM%20RISALAH%20RAHMAT%20DALAM%20AL-QURAN%20(TAFSIR%20Q.S.%20AL-ANBIYA',%202I%20IOY).pdf

Irham. (2015). Mengaji Islam Nusantara Sebagai Islam Faktual _ NU Online. Retrieved January 29, 2017, from http://www.nu.or.id/post/read/61182/mengaji-islam-nusantara-sebagai-islam-faktual

Kahfi, M. (2019). Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan: Selayang Pandang. *SIASAT*, *3(1), 39–46*. https://doi.org/10.33258/siasat.v2i1.15

Luthfi, K. M. (2016a). Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal. *SHAHIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary, 1(1), 1*. https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.53

Luthfi, K. M. (2016b). Kontekstualisasi Filologi dalam Teks-teks Islam Nusantara. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, *14(1)*, 114–128. https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.523

Maarif, A. S. (2020). Islam Berkemajuan, Apa Itu? (I). *Suara Muhamadiyah*. Retrieved from https://suaramuhammadiyah.id/2020/05/08/islam-berkemajuan-apa-itu-i/

Mahbib. (2015). Apa yang Dimaksud dengan Islam Nusantara? *NU Online*. Retrieved from http://www.nu.or.id/post/read/59035/apa-yang-dimaksud-dengan-islam-nusantara

Manshur, I. (2014). Jumlah Warga NU 83 Juta Jiwa di Indonesia, Benarkah? Retrieved January 1, 2017, from http://www.muslimedianews.com/2014/05/jumlah-warga-nu-83-juta-jiwa-di.html

Minftahuddin, M. (2015). Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).

https://doi.org/10.21831/moz.v5i1.4338

Mufid, A. S. (2013). Paham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Dan Tantangan Kontemporer Dalam Pemikiran Dan Gerakan Islam Di Indonesia. *Harmoni, 12(3), 8–18*. Retrieved from https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/149

Mustofa, S. (2015). Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Islam Berkemajuan: Melacak Akar Epistemologis dan Historis Islam (di) Nusantara. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 10(2)*. https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.2.405-434

Preambule of Article of Association of Nahdlatul Ulama (2010). Indonesia.

Sheikh, M. K. (2014). The Religious Challenge to Securitisation Theory. *Millennium: Journal of International Studies, 43(1), 252–272*. https://doi.org/10.1177/0305829814540853

Yang, Y. (2009). Analyze the One-Sidedness of "Clash of Civilizations." *Journal of Politics and Law, 2(3)*. https://doi.org/10.5539/jpl.v2n3p97

Yusdani, Y. (2006). Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Al-Mawarid, 16. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol16.art7

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES
Volume 3, Nomor 2, Januari 2022, pp. 77-85
ISSN: 2685-7766

Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Warga Berbasis Infomasi Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta

Iqbal Aidar Idrus [1*], Ummi Zakiyah[2]
[1]Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1045 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia
[2]Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1045 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

Info Artikel
Dikirim: 10 Nov, 2021
Diterima: 20 Jan, 2022
Dipublikasi: 31 Jan, 2022

Kata Kunci:
Aplikasi; Informasi; Inovasi; Pelayanan Publik

Koresponden:
Iqbal Aidar Idrus
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

Email:
iqbal.aidar@uta45jakarta.ac.id

Sitasi Cantuman:
Idrus, I. A. & Zakiyah, U. (2022). Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Warga Berbasis Infomasi Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. *Journal of Political Issues. 3(2); 77-85*. https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.69

DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.69

Lisensi:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)
OPEN ACCESS

ABSTRAK

Abstract *The Provincial Government of DKI Jakarta provides the application of the Electronic Information-Based Population Administration Management System (Si Mas Gesit) to make it easier for the public to obtain the necessary information about the management of the population administration. As for this research aims to; 1) Identify the provision of public service information in the innovation of local government in the form of website applications and 2) Analyze how to optimize the application utilization of The Administrative Management System of Population Based Electronic Information (Si Mas Nimble). The research method used is qualitative. The analytical techniques used are qualitatively descriptive. The results showed that si Mas Gesit application there are six services that can be submitted by the community. Among others, the management of KTP-El, Kertu Child Identity (KIA), Family Card (KK), Moving In DKI, Moving Come Outside DKI, and Moving Come In DKI. And this application has mail governance features, daily service archive information at the village service counter that is managed and stored digitally with barcode security system. Utilization of Si Mas Nimble Application through system monitoring shows good utilization. In addition, it is necessary to optimize the utilization of applications by the public at large. The strategy of introduction and socialization of Si Mas Gesit Application is necessary and developed to facilitate the community in obtaining its population documents digitally.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Berbasis Informasi Elektronik (Si Mas Gesit) untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang persyaratan yang diperlukan terkait dengan pengelolaan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyampaian informasi pelayanan publik dalam inovasi pemerintah daerah dalam bentuk aplikasi web dan menganalisis bagaimana mengoptimalkan penggunaan sistem manajemen administrasi berbasis warga informasi elektronik (Si Mas Gesit). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Si Mas Gesit berisi enam layanan yang dapat diberikan oleh masyarakat. Diantaranya pengurusan kartu tanda penduduk, kartu tanda pengenal anak (KIA), kartu keluarga (KK), perjalanan dalam DKI, perjalanan luar DKI, dan perjalanan dalam DKI. Aplikasi ini memiliki fitur manajemen surat menyurat, informasi catatan layanan harian di loket layanan desa dikelola secara digital dan disimpan menggunakan sistem keamanan barcode. Penggunaan aplikasi Si Mas Gesit melalui sistem monitoring menunjukkan efisiensi penggunaan yang baik. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan aplikasi oleh masyarakat umum. Pengenalan dan sosialisasi aplikasi Si Mas Gesit diperlukan dan dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh izin tinggal digital.

Tentang:

Iqbal Aidar Idrus, menyelesaikan studi S2 Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016. Penulis juga sedang menempuh studi S3 di Universitas Brawijaya. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Ummi Zakiyah, menyelesaikan studi S2 Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016. Saat ini penlusi merupakan dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Hak Cipta© 2022. Dimiliki oleh Penulis,
Dipublikasi oleh Journal of Political Issues.
Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia memutuhkan pelayanan ahkan dapat dikatakan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. UU Pelayanan Publik no 25 Tahun 2009 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pelayanan publik merupakan perwujudan hubungan yang jelas mengenai hak tanggung jawab, kewajiban dan wewenang para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan pulik sesuai dengan peraturan umum. asas usaha dan pemerintahan yang baik penyelenggaraan pelayanan seagaimana yang dipersyaratkan undang-undang serta perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pulik.

Pelayanan pulik adalah ukuran kinerja pemerintah yang paling terlihat. Publik dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang mereka terima. Untuk itu kualitas pelayanan pulik di seluruh kementerian lembaga menjadi isu mendasar yang perlu segera ditingkatkan (Kurniawan, 2017). Untuk menyikapi peningkatan pelayanan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah menerapkan kebijakan yang sejak tahun 2014 yang merupakan tahun inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memunculkan ide atau reaksi kreatif terhadap cara kerja metode pelayanan pulik.Hal ini dikarenakan masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun kebutuhan tersbeut seringkali tidak sesuai dengan harapan karena dari pengalaman pelayanan publik yang muncul selama ini: kompleks,lamban, mahal dan mempersulit pelayanan (Menpan 2019).

Persyaratan inovasi pemerintah daerah secara jelas tertuang pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam memuat kebijakan inovasi pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip, peningkatan efisiensi, meningkatkan kualitas,meningkatkan kualitas penyajian, tidak ada konflik kepentingan, terhadap kepentingan umum, dilakukan secara teruka; menjunjung tinggi nilai-nilai keenaran, dan dapat diartikan sebagai hasil ukan untuk dirinya sendiri. Inovasi kepegawaian bidang pelayanan kepada masyarakat merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh Negara dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan kemakmuran dan kemandirian masyarakat dan daerah. Tujuan inovasi pemerintah daerah adalah mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapainya melalui pelayanan publik. Wacana inovasi pelayanan publik saat ini memiliki implikasi penting bagi penyelenggaraan pelayanan pulik di Indonesia dimana kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat dan terbuka dalam kondisi sekarang (Gumilar, 2019).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara informasi disajikan dan memfasilitasi akses informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintahan dapat meningkatkan operasional dan pengelolaan layanan berbasis TIK salah satunya adalah penerapan konsep e-government atau yang di kenal dengan digital government (Odendaal 2003). Di Indonesia pelaksanaan e-government tercapai setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemangan E-Government. Inpres ini dimaksudkan untuk menjadi dasar penyeimbang kedudukan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan akuntabel, efektif dan efisien serta peran serta masyarakat dalam pemerintahan. Penyampaian informasi berbasis TIK dapat terintegrasi dan difasilitasi oleh pengguna informasi sehingga pelayanan publik dapat lebih efisien dan efektif serta tepat sasaran khususnya pada masyarakat.

Semua instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah harus memunculkan ide atau tanggapan inovatif terhadap praktikmetode pelayanan publik. Namun pengelolaan kependudukan tersebut dinilai rumit terutama bagi warga yang bekerja di Jakarta khususnya yang berdomisili di Desa Cipedak Kecamatan Jagakarsa. Berawal dari keluhan masyarakat terutama yang bekerja jarak yang cukup jauh dan sering terjebak macet, dikarenakan untuk mengurusi administrasi ke dinas kependudukan minimal tiga kali pulang pergi ke kantor, sehingga warga harus mengambil cuti mendapat izin dan terkadang tidak masuk kantor untuk mengantar dokumen yang mereka inginkan harus selesai. Hal ini dikarenakan informasi persyaratan pengelolaan arsip kependudukan belum dilaksanakan secara optimal, ditambah belum adanya sarana komunikasi yang menghubungkan warga dengan aparat desa dan sebaliknya. Pentingnya arsip kependudukan sebagai kebutuhan dasar pengelolaan dokumen instansi lain oleh karena itu penyediaan arsip kependudukan harus sederhana dan cepat (Hadi, 2019).

Kelemahan lainnya adalah belum adanya sistem pengelolaan arsip dan korespondensi digital dimana surat dan arsip dapat dengan mudah ditemukan hal ini dikarenakan kurangnya ruang penyimpanan arsip konvensional. Sebagai kerahasiaan apabila terdapat permasalahan hukum mengenai keaslian isi surat pengakuan serta keamanan warga yang kehilangan kerusakan dokumen aslinya.Berdasarkan permasalahan terkait pelayanan kepada masyarakat banyak inovasi dan terobosan inovatif yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan reformasi pemerintahan dengan menghadirkan penilaian terhadap upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan publik organisasi, data kota dan pelaksanaan reformasi birokrasi dan inovasi di daerah (Sakti, 2019).

Namun penelitian ini mengkaji upaya Pemprov DKI Jakarta berinovasi melalui sistem manajemen administrasi kependudukan (Si Mas Gesit) berbasis informasi elektronik Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam mengidentifikasi penyampaian layanan publik inovasi pemerintah daerah dalam bentuk aplikasi website dan menganalisis bagaimana mengoptimalkan penggunaan sistem manajemen administrasi kependudukan berbasis TIK. Layanan Dukcapil dengan inovasi "Si Mas Gesit" telah menjadi salah satu penerima Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2019 dengan inovasi pemerintah daerah, BPBD telah membuat DKI Jakarta mendapatkan penghargaan tersebut.Sebelumnya inovasi ini dalam pelayanan tingkat kelurahan masih tersedia dan bersifat manual sehingga orang sering harus meluangkan waktu untuk mengelola dokumen manajemen kependudukan mereka. Dengan inovasi pelayanan yang leih baik diharapkan efisiensi operasional instansi dan hasil pelayanan kepada masyarakat menjadi leih baik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tentang gagasan persepsi pendapat atau keyakinan orang dan tidak dapat diukur dengan angka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian terhadap buku-uku referensi, laporan, jurnal dan media lain yang berhuungan dengan subjek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Publik

Pada Konsep pelayanan publik telah dikemukakan oleh banyak ahli. Bahkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 definisi pelayanan pulik dinyatakan dengan jelas. Pelayanan publik mrupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar semua warga negara dan penduduk atas suatu arang pelayanan atau pelayanan administrasi yang dierikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan dasar tertentu yang tingkat kepuasannya hanya dapat dialami oleh pelayan atau yang dilayani tergantung pada

kemampuan operator memberikan pelayanan untuk memenuhi harapan pengguna Moenir (2002). Pelayanan publik juga sebgai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam lingkup pemenuhan kebutuhan pelayanan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang bagi setiap warga negara dan orang-orang atas barang jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik khsusnya pada sebuah digital governance dalam memanfaatkan digitalisasi sebagai pelayanan yang cepat dan tetap dalam pengunaanya.

Definisi di atas memperjelas bahwa pelayanan publik merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui kegiatan orang lain untuk memantu mempersiapkan atau mengurus apa yang dibutuhkan orang lain. Dengan demikian pelayanan publik yang baik setidaknya harus memenuhi unsur-unsur kinerja pelayanan publik yang baik yaitu: sistem prosedur dan metode perilaku personel atau peralatan ketersediaan sarana dan prasarana serta respon masyarakat seagai pelanggan. Tercapainya faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana suatu pelayanan publik menjadi pelayanan yang sejahtera.

Konsep penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu cara untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti pelayanan kebutuhan dasar dalam hal ini pelayanan dibidang kesehatan dan bidang pendidikan dasar yang merupakan pelayanan dasar dan pelayanan publik pada administrasi barang dan jasa) (Hardiyansyah. 2011). Adapun jenis penyelenggaran pelayanan publik yang dikaji pada penelitian ini adalah jenis pelayanan umum yang bersifat administratif. Penyelenggaran pelayanan yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat administrasi seperti: pemuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, Kartu Identitas anak (KIA), surat kematian, semua bentuk pelayanan yang bersifat administrative yang berhubungan dengan pemerintah daerah setempak baik kelurahan,kecamatan dan dinas terkait yang menangani pelayanan administrasi.

Kinerja pelayanan publik juga harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pelayanan publik sebagaimana Batinggi dan Ahmad (2013) menyatakan oleh karena itu dalam upaya peningkatan pelayanan perlu adanya disiplin antara penyedia layanan di sektor publik seperti:

a) Menetapkan standar pelayanan artinya standar tidak hanya berhuungan dengan standar pelayanan produk tetapi juga dengan standar prosedur pelayanan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas.
b) Bersikap terbuka terhadap kritik dan saran serta keluhan memberikan semua informasi yang diperlukan dalam layanan. Penyedia layanan publik harus memiliki berbagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan kritik dan saran serta harus secara efektif menyampaikan dan beragai informasi yang diperlukan kepada komunitas klien.
c) Perlakukan semua orang dengan adil. Kata adil di sini berarti dengan memberikan sebagian barang tertentu dalam penyelenggara agar memiliki pilihan yang bersifat transparan.
d) Menjelaskan atau membenarkan sesuatu dalam proses pemberian pelayanan apabila terjadi penyimpangan terkait pemberian pelayanan maka setiap pegawai dillini pelayanan pada semua tingkatan, dari atasan sampai bawahan ketika mendeteksi penyimpangan harus segera melakukan konfirmasi atau klarifikasi sesuai dengan kemampuannya.
e) Memberikan kemudahan akses pelayanan bagi semua pelanggan pelayanan. Unit pelayanan yang telah disediakan pelayanan publik harus benar-benar dapat diakses.
f) Selalu memberikan pembaruan dan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan

Dalam hal ini penyedia layanan dan pelaksana layanan harus terus melakukan pembaruan dan perbaikan secara responsive, konsisten dengan kontriusi komunitas pelanggan dan evaluasi kinerja layanan serta proaktif pada manajemen.

Inovasi Pemerintahan Daerah

Inovasi dipahami sebagai upaya untuk menjadi sesuatu yang baru. Kemudian pendapat lain yang dikemukakan oleh Setyteringrum 2009 mendefinisikan inovasi sebagai suatu objek yang juga berarti suatu produk baru atau suatu tindakan yang tersedia untuk diadopsi dan harga produk tersebut berada di dunia usaha atau dalam konteks komersial. Penelitian sebelumnya membahas tentang inovasi di pemerintah daerah berfokus pada identifikasian pola perilaku dan cara di mana kepemimpinan politik administratif dan kepemimpinan dapat mendorong inovasi yang efektif dan sering dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi di tingkat lokal namun belum membahas hubungan antara staf dan pejabat terpilih atau kepemimpinan sebagai variabel independen seperti kajian Damanpour dan Schneider (2009), dimana pada kajian tersebut inovasi hanya berfokus pada beberapa indicator saja, sehingga inovasi harus menjadi pembedah dan sesuatu yang baru dari sebelumnya dalam hal ini ada peningkatan dalam memberikan pelayanan. Penelitian empiris ini membahas dua pertanyaan yang belum menjadi fokus utama penelitian inovasi seelumnya terutama berkenaan dengan pemerintah daerah.

Dalam hal ini kita bisa melihat beberapa penelitian terdahulu dimana Kimerly L. Nelson Curtis H. Wood dan Gerald T membahas mengenai Innovation Management in Local Government: An Empirisal Analysis of Suuran Cities mendefinisikan inovasi pemerintah daerah tidak hanya sebagai penemuan tetapi sebagai perubahan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Beberapa kebijakan dan implementasi program didasarkan pada "praktik terbaik" yang khas dari pemerintah daerah yang berbeda. Selesai tetapi pemerintah kota jarang dapat meminjam ide tanpa modifikasi dalam hal ini harus di implemtasikan suatu ide baru atau inovasi bukan hanya sebagai sebuah rencana yang menjadi sebuah konsep saja. Inovasi memerlukan beberapa penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu memenuhi aspek kebijakan dan mendukung pemangku semua kepentingan dalam hal ini kepentingan yang harus di penuhi yaitu kebutuhan masyarakat (Nelson, et.al, 2011) .

Inovasi memberikan sesuatu yang baru dan berbeda dalam kualitas dan kuantitas dari produk atau jasa yang sudah ada. Inovasi pelayanan publik dikatakan berhasil apabila merupakan hasil dari penciptaan dan penerapan inovasi produk dan jasa inovasi, proses pelayanan inovasi, metode pelayanan inovasi, kebijakan inovasi ,pelayanan publik sistem pelayanan (Mochammad, 2019). Pertama inovasi produk atau jasa adalah perubahan tampilan dan desain suatu produk atau jasa. Kedua inovasi prose meningkatan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada komibnasi perubahan organisasi prosedur dan kebijakan yang diperlukan untuk berinovasi. Ketiga inovasi metode layanan adalah perubahan baru dalam cara berinteraksi dengan pengguna layanan. Keempat inovasi strategis atau kebijakan perubahan visi dan misi tujuan dan strategi serta alasan baru untuk menyimpang dari kenyataan yang ada. Kelima inovasi sistem adalah interaksi sistemik yang mencakup cara-cara aru atau yang dipengaruhi (Muluk,2008).

Inovasi Pelayanan Penyediaan Informasi Dalam Aplikasi Si Mas Gesit

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Suku Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Dukcapil) melalui Satuan Pelayanan (Satpel) Kelurahan Cipedak melakukan inovasi pelayanan dengan memperkenalkan sistem pengelolaan administrasi kependudukan yang mengandalkan informasi elektronik (Si Mas Gesit) untuk memudahkan masyarakat. Si Mas Gesit adalah aplikasi yang dirancang untuk memerikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk elektronik. Aplikasi tersebut dirancang sesuai inovasi pemerintah daerah dalam bentuk website/aplikasi Si Mas Gesit alamat

http://simasgesit.kepenresidenancapil.jakarta.go.idcipedak, warga langsung mendapat informasi tentang persyaratan yang diperlukan. Manfaatnya adalah pengaturan administrasi yang dipersingkat penghematan waktu dan penghindaran praktik perantara (Pemkot Jakarta Selatan, 2019).

Dalam sistem aplikasi tersebut masyarakat dapat memberikan enam pelayanan yaitu mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk (KIA), Kartu Keluarga (KK), Pindah ke DKI Pindah/ke Luar DKI dan Pindah Dalam DKI. Aplikasi Si Mas Gesit digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat kelurahan, meningkatkan transparansi pelayanan pengendalian dan akuntabilitas pemerintah di kelurahan. Inovasi ini juga memungkinkan untuk mengurangi hilangnya waktu serta biaya transportasi yang dikeluarkan orang untuk satu kali perjalanan pulang pergi untuk memastikan kelengkapan administrasi. Selanjutnya dalam pengelolaan dokumen digital disimpan melalui data digital harga bisa lebih aman. Penggunaan aplikasi komputer merupakan salah satu solusi cerdas untuk menghadapi dinamika perubahan di era digitalisai khsusunya pada system e-government.

Di situs tersebut fungsi pengelolaan surat informasi layanan harian yang disimpan di loket layanan desa dikelola secara digital dan disimpan menggunakan sistem keamanan arcode. Data arsip yang dapat diambil oleh petugas Klaim dapat diperiksa lebih cepat dan bertahap mulai dari staf hingga manajemen secara elektronik dan digital. Aplikasi Si Mas Gesit berpotensi dan memungkinkan untuk terhubung dengan wilayah kerja unit pelayanan di wilayah metropolitan DKI Jakarta, yang juga membutuhkan sistem yang sama dan kini direplikasi di lokasi yang berbeda. Karena aplikasi ini memecahkan masalah yang ada di perkotaan di seluruh DKI Jakarta dan penerapan ini berdampak mengurangi jumlah masyarakat yang pergi ke loket pelayanan desa apalagi kondisi pandemic saat sekarang ini, mengurangi terjadinya kerumuman dalam pelayanan tersebut. Dengan aplikasi ini sangat membantu pelayanan yang dimana dulunya mengantri untuk mengajukan permohonan kemudian kembali lagi untuk mengambilnya. namun kini masyarakat hanya datang sekali yaitu untuk mendapatkan yang diinginkan serta dapat menggunakan sumber daya di era modernisasi saat sekarang ini. Aplikasi Si Mas Gesit terus berkarya dan berkemang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan izin tinggal dalam bentuk digital. Kecamatan yang telah mereplikasi program aplikasi Si Mas Gesit di Provinsi DKI Jakarta saat ini hanya Kecamatan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jakarta Selatan, 2019).

Implementasi inovasi pelayanan publik berasis Aplikasi tersebut secara umum akan berhasil memenuhi kriteria dan tolak ukur keerhasilan suatu inovasi. Pertama dalam hal inovasi produk atau jasa terjadi perubahan tampilan dan desain produk atau jasa. Aplikasi Si Mas Gesit merupakan produk layanan berasis aplikasi yang baru saja dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta dari manual lama dan konvensional beralih ke layanan digital dan berasis aplikasi yang memungkinkan proses dan interaksi layanan kapan saja di mana saja, hal tersebut juga di terapkan di mall pelayanan publik yang dimana semua bentuk pelayanan admiistratif tersedia di sana dan bisa langsung mengurusi semuanya dalam sekali kunjungan, dimana terdapat banya instansi pemerintahan dan lembaga lainya.

Kedua tentang kebaruan layanan aplikasi Si Mas Gesit ini adalah model layanan terbaru dengan sistem pengumpulan model yang dirancang hanya oleh pemerintah DKI Jakarta dan belum tersedia di lembaga negara. Namun hal ini harus menjadi model dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Ketiga reformasi tersebut bersifat metodologis dengan sistem pick up and drop off artinya dulu ketika masyarakat membutuhkan pelayanan masyarakat harus datang ke meja pelayanan, namun sekarang berbeda dan inovasi-inovasi baru yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat. Keempat inovasi strategis atau kebijakan adalah perubahan visi misi tujuan dan strategi serta

alasan baru untuk menyimpang dari kenyataan yang ada. Layanan aplikasi Si Mas Gesit yang diluncurkan termasuk sebuah inovasi baru bertujuan untuk memberikan informasi pelayanan publik, yang dirancang dalam inovasi pemerintah daerah berupa alamat aplikasi dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah.

Kelima inovasi sistemik adalah interaksi sistemik yang mencakup cara-cara baru atau yang diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor lain atau dengan kata lain perubahan tata kelola. Inovasi tersebut berpotensi dan memungkinkan untuk terhubung dengan wilayah kerja unit pelayanan di wilayah metropolitan DKI Jakarta yang juga memutuhkan sistem yang sama dan kini direplikasi di lokasi yang berbeda di wilayah DKI Jakarta. Karena aplikasi ini memecahkan masalah yang ada di perkotaan di seluruh DKI Jakarta, penerapan ini berdampak mengurangi keutuhan masyarakat untuk pergi ke loket pelayanan yang dulunya mengantri untuk menyerahkan dokumen kemudian kembali lagi untuk mengambilnya sehingaa mempermudah masyarakat dalam menikmati pelayanan dalam era digitalisasi government dalam hal ini pelayanan publik berbasis aplikasi yang sangat membantu dan mempermudah proses pengurusan administrative di pemerintahan.

4. SIMPULAN

Pengelolaan kependudukan dinilai rumit terutama bagi penduduk yang bekerja di Jakarta,Mereka mengeluh bahwa mereka harus melakukan setidaknya tiga kali perjalanan di sekitar kantor lurah sampai mereka menyelesaikan dokumen yang mereka inginkan. Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Penduduk Berasis Informasi Elektronik atau Si Mas Gesit ini dibuat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Kedudukan Sipil (DUKCAPIL). Inovasi ini hadir untuk mempermudah pengiriman dokumen kependudukan. Sebelum adanya inovasi ini pelayanan di tingkat kelurahan masih bersifat manual sehingga untuk mengurus mengurus dokumen kependudukan seringkali masyarakat membutuhkan waktu lama untuk kembali dan seterusnya. Hal tersebut dijawab oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) , dengan program inovasi Si Mas Gesit Masyarakat DKI Jakarta khusunya dalam mengurus Administrasi kependudukan tidak terlalu bertele-tele lagi dan tanpa harus bolakalik ke kelurahan dan menghaiskan waktu dalam pengurusannya. Hal ini cukup di lakukan melalui Aplikasi Si Mas Gesit melalui perangkat elektronik dengan menyiapkan persyaratan yang diperlukan dan hanya datang ke kelurahan jika sudah jadi dan tinggal mengambilnya, akan tetapi sayangnya program tersebut belum semuanya di terapkan di seluruh wilayah kelurahan yang ada di DKI Jakarta untuk kemudahan pelayanan dala mengurus administrasi kependudukan alhasil program tersebut sukses dilaksanakan oleh beberapa Kelurahan DKI Jakarta yang dapat mengoptimalkan dalam pelayanan serta data tersebut dapat di arsipkan dan mudah di cari jika suatu saat diperlukan dalam kepengurususan administrasi kependudukan.

Untuk program tersebut penulis menyarankan agar program “Si Mas Gesit” agar segera di replikasikan/digunakan di semua wilayah atau semua kelurahan yang ada di DKI Jakarta, hal ini dengan tujuan agar pelayanan inovasi dapat berjalan merata serta dapat memudahkan semua masyarakat DKI Jakarta dalam pengurusan administrasinya tanpa pelu bolak-balik dan ribet dalam mengurus dokumen yang penting bagi pribadi setiap warga dalam bernegara. Penulis juga memberikan saran agar provinsi/daerah lain dapat mencontoh apa yang dilakukan pemerintah provinsi Dki Jakarta melalui Satuan Pelayanan Kelurahan Cipedak dalam berinovasi pelayanan public sehingga membuat pemerintah daerah semakin berkembang dan maju.

5. DAFTAR PUSTAKA

Batinggi, A dan Badu Ahmad. (2013). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Offset

Damanpour, F., & Schneider, M. (2008). Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers. *Journal of Public Administration Research and Theory, 19(3), 495–522*. https://doi.org/10.1093/jopart/mun021

Gumilar, M. G. (2019). Inovasi Pemerintah Daerah Jogja Smart Service Dalam Menciptakan Smart And Liveable City Di Kota Yogyakarta. Jurnal Gama Societa, 3(1), 19-27. Doi: https://doi.org/10.22146/jgs.50012.

Hadi, F. (2019). Satpel Dukcapil Cipedak Bikin Terobosan Pelayanan Kependudukan Bernama Si Mas Gesit. Retrieved from wartakota.tribunnews.com: https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/01/satpel-dukcapil-cipedak-bikin-terobosan-pelayanan-kependudukan-bernama-si-mas-gesit (Diakses tanggal 5 November 2020)

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan. Implementasinya*. Yogyakarta : Gava Media

Nelson, K. L., Wood, C. H., & Gabris, G. T. (2011). Innovation management in local government: an empirical analysis of suburban municipalities. *International Journal of Organization Theory & Behavior, 14(3), 301–328*. https://doi.org/10.1108/ijotb-14-03-2011-b001

Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum, 10(3).* https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794.

Menpan. (2019). *Si Mas Gesit Bantu Warga Cipedak Urus Administrasi*. Retrieved from menpan.go.id: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/si-mas-gesit-bantu-warga-cipedak-urus-administrasi (Diakses tanggal 5 November 2020)

Mochammad, R. (2019). Inovasi Pelayanan Publik. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 1-20.* Retrieved from https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/1335

Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Askara, Jakarta.

Muluk, K. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.

Odendaal, N. (2003). Information and communication technology and local governance: understanding the difference between cities in developed and emerging economies. *Computers, Environment and Urban Systems, 27(6), 585–607.* https://doi.org/10.1016/s0198-9715(03)00016-4

Pemkot Jakarta Selatan. (2019). Si Mas Gesit Dukcapil Cipedak Mudahkan Warga Urus Dokumen Kependudukan. Retrieved from selatan.jakarta.go.id: https://selatan.jakarta.go.id/news/2019/07/si-mas-gesit-dukcapil-cipedak-mudahkan-warga-urus-dokumen-kependudukan#:~:text=Suku%20Dinas%20Kependudukan%20dan%20Pencatatan,dokumen%20%20kependudukan%20bagi%20warga%20Kelurah

an (Diakses 5 November 2020)

Sakti, B. (2019). Kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam era reformasi. Pareto : *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 2(1), 35*. https://doi.org/10.32663/pareto.v2i1.917

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES
Volume 3, Nomor 2, Januari 2022, pp. 86-97
ISSN:2685-7766

Implementasi Sendai Framework Terhadap Respons Bencana Alam Di Filipina Tahun 2016-2020

Safira Tasya Asadel [1], Andi Kurniawan[1], M. Chairil Akbar Setiawan[1*]
[1]Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12540, Jakarta-Indonesia

Info Artikel
Dikirim: 03 Nov, 2021
Diterima: 25 Jan, 2022
Dipublikasi: 31 Jan, 2022

Kata Kunci:
Filipina; Keamanan Manusia; Respon Bencana; Sendai Framework;

Koresponden:
M. Chairil Akbar Setiawan
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12540, Jakarta-Indonesia

Email:
mchairilakbars@upnvj.ac.id

Sitasi Cantuman:
Asadel, S. T., Kurniawan, A. & Setiawan, M. C. A. (2022). Implementasi Sendai Framework Terhadap Respons Bencana Alam Di Filipina Tahun 2016-2020. *Journal of Political Issues. 3(2); 86-97.* https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.70

DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.70

Lisensi:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)
OPEN ACCESS

ABSTRAK

Abstract *The Provincial Government of DKI Jakarta provides the application of the Electronic Information-Based It is undeniable, disasters can be a big threat in the field of economic, social, political, and others for the affected areas. Started from the various major disasters that occurred one of them was the Tsunami in Aceh in 2004, a framework for cooperation between countries was born that contained a strategy and a systematic approach to reducing vulnerability and risk of hazards called the Hyogo Framework of Action (HFA) which was adopted in 2005-2015. Due to its success in several respects, various countries agreed to continue this collaboration called the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) which was adopted in 2015-2030. The Philippines as a country that is prone to disasters such as typhoons because it is located in The Pacific Ring of Fire participated in ratifying the cooperation voluntarily. One form of commitment from the Philippines is to implement the Build Back Better program and carry out good collaboration with national and international actors. Through this research, researchers want to see how SFDRR can help The Philippines as a disaster-prone country develops its disaster management, especially in emergency response.*

Abstrak Tidak dapat dipungkiri, bencana dapat menjadi ancaman besar baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain bagi wilayah terdampak. Berawal dari berbagai bencana besar yang terjadi salah satunya Tsunami di Aceh tahun 2004, lahirlah sebuah kerangka kerjasama antar negara yang berisi strategi dan pendekatan sistematis untuk mengurangi kerentanan dan risiko bahaya yang bernama Hyogo Framework of Action (HFA) yang diadopsi di tahun 2005-2015. Karena keberhasilannya di beberapa hal, berbagai negara sepakat untuk melanjutkan kerjasama ini yang bernama Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) yang diadopsi di tahun 2015-2030. Filipina sebagai negara yang rentan akan bencana seperti angin topan karena berlokasi di Cincin Api Pasifik turut serta dalam meratifikasi kerjasama tersebut secara sukarela. Salah satu bentuk komitmen dari Filipina adalah melaksanakan program Build Back Better dan melaksanakan kolaborasi baik dengan aktor nasional maupun internasional. Melalui penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana SFDRR dapat membantu Filipina sebagai negara rentan bencana mengembangkan manajemen bencananya khususnya di dalam tanggap darurat bencana.

Tentang:
Safira Tasya Asadel, adalah mahasiswa di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Andi Kurniawan, menyelesaikan studi S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2013. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

M. Chairil Akbar Setiawan, menyelesaikan studi S2 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Hak Cipta© 2022. Dimiliki oleh Penulis,
Dipublikasi oleh Journal of Political Issues.
Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

1. PENDAHULUAN

Dengan lahirnya ilmu hubungan internasional pada masa-masa awal Perang Dunia II, bencana menjadi isu utama. Krisis Rudal Kuba pada tahun 1962 menandai dimulainya manajemen darurat dan pengembangan pertahanan sipil yang bertujuan melindungi pemerintah dan masyarakat dari dampak perang nuklir. Ketika Uni Soviet menembakkan rudal, pembuat kebijakan pertahanan melakukan pekerjaan identifikasi untuk mengevakuasi pejabat publik dan warga AS. Selain proses pelembagaan penanggulangan bencana, Amerika Serikat juga mendanai penelitian bencana untuk mengetahui perilaku manusia dalam merespon bencana (Sinulingga, 2016).

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) periode 2015-2030 merupakan sebuah bentuk perjanjian antar negara yang menandatangani perjanjian tersebut untuk melakukan manajemen bencana di negaranya masing-masing. Kerangka ini sendiri diadopsi dari *Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction* yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 18 Maret 2015 bertempat di Sendai, Miyagi, Jepang. Ada beberapa indikator prioritas suatu negara untuk memenuhi komitmennya di bawah SFDRR, yaitu:

1. Prioritas 1: Memahami risiko bencana
2. Prioritas 2 : Memperkuat manajemen risiko bencana
3. Prioritas 3: Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan ketahanan
4. Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif dan "*Build Back Better*"

Dari beberapa negara di Asia Tenggara, Filipina merupakan negara yang menarik untuk dibahas karena Filipina rentan terhadap bencana alam. Filipina adalah negara kepulauan, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Filipina, dengan 7.107 pulau. Karena negara yang terletak di Cincin Api Pasifik, Filipina rentan terhadap bencana seperti angin topan, letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, dan kekeringan. Penyebab terjadinya bencana alam ini adalah faktor iklim dan lingkungan yang tidak stabil. Selain terletak di Cincin Api Pasifik, Filipina juga sangat aktif dalam aktivitas seismik. Selain di wilayah Palawan, juga terdapat risiko tinggi terkait kenaikan muka air laut di sepanjang pantai Filipina, yang meningkatkan risiko tersebut. Filipina rentan terhadap bencana alam, bencana biasanya menyebabkan bencana lain, sehingga bencana ini saling terkait. Selain menimbulkan kerawanan masyarakat dan dampak ekonomi, bencana yang saling terkait inilah yang menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan perumahan. Beberapa bencana di Filipina antara lain letusan gunung Mayon pada Januari 2018, Badai Tropis Tembin pada Desember 2017, dan gempa Juli 2017 (CEDM-HA, 2018).

Penanggulangan bencana di Filipina sendiri berawal dari Perang Dunia II dan lebih fokus pada persiapan perang. Presiden Manuel Quezon mengeluarkan *Executive Order* EO335 pada tahun 1941 untuk mempersiapkan penduduk jika terjadi perang yang meluas ke kawasan Pasifik dan mengambil langkah-langkah untuk mengelola dan mengoordinasikan keterlibatan sipil dalam keadaan darurat dengan membuat manajemen darurat sipil. Di bawah EO335, *National Emergency Commission* dibentuk bekerja sama dengan *Provincial Emergency Committee* yang didirikan di setiap negara bagian dan diawasi oleh *Municipal Emergency Committees* dan *City Emergency Committees*. Kemudian pada bulan November 1968 dibuat *Executive Order* EO159 yang menetapkan organisasi penanggulangan bencana di instansi pemerintah, antara lain instansi pemerintah, instansi pemerintah, instansi pemerintah, instansi pemerintah, instansi dan bidang politik, serta badan usaha milik negara. EO159 dibuat sebagai tindakan pencegahan jika terjadi bencana, tetapi misi ini terhambat oleh biaya (World Bank, 2005).

Pada tahun 2010, Parlemen memberlakukan *Republic Act* 10121 (RA 10121) terkait dengan undang-undang manajemen dan mitigasi risiko bencana di Filipina. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan negara yang rentan terhadap bencana alam serta mengurangi kerusakan dan kerugian jiwa serta harta benda yang diakibatkan oleh bencana. RA10121 mengembangkan kebijakan dan rencana untuk semua aspek penanggulangan bencana, termasuk tata kelola yang baik, penilaian risiko dan sistem peringatan dini, kesadaran dan pemahaman, pengurangan faktor risiko, respons yang efektif dan kesiapan pemulihan dini, serta kebijakan dan tindakan. Peraturan ini merupakan inisiatif yang komprehensif, komprehensif dan terintegrasi untuk memitigasi dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari bencana seperti perubahan iklim, terutama keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan di semua sektor dan tingkatan (Commision on Audit).

Dalam penelitian ini, penulis meninjau beberapa literatur seperti "*Philippines: Disaster Risk Profile and Disaster Risk Reduction (DRR) Framework: Natural Calamities*" yang ditulis oleh Harold James E. Doroteo. Di dalam literatur ini menjelaskan bahwa Filipina pada dasarnya terkena gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir dan angin topan dan bencana alam lainnya. Rata-rata, 20 gempa bumi diamati setiap hari (kebanyakan terlalu lemah untuk dirasakan). Lokasinya yang berada di Pacific Hurricane Belt/Highway juga membuatnya rentan terhadap kejadian cuaca ekstrim. Garis pantai yang luas juga rentan terhadap tsunami, membuat negara ini rentan terhadap naiknya permukaan laut dan gelombang badai. Hal ini pada gilirannya menyebabkan fenomena sekunder, banjir, tanah longsor, angin muson (sangat kuat), dan kekeringan. Karena terletak di Cincin Api Pasifik, negara ini sering mengalami gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Sejak lempeng tektonik besar telah terjadi di daerah ini, data statistik tentang gempa bumi besar berkekuatan lebih kecil sangat teratur. Telah terjadi 5 gempa bumi dahsyat dan korban jiwa dalam dua dekade terakhir (1990-2010), 15 di antaranya tewas dan 119 luka-luka. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 207 juta peso Filipina. Gempa bumi Luzon 1990, tsunami Teluk Morro dan runtuhnya Menara Ruby adalah yang terburuk (Doroteo, 2015) .

Literatur yang juga digunakan penulis berjudul "***Five Years Beyond Sendai – Can We Get Beyond Frameworks?***" oleh Ben Wisner. Artikel ini mengajukan berbagai pertanyaan yang muncul selama 5 tahun adopsi Sendai Framework dilakukan oleh beberapa negara. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah terkait pemahaman tentang bencana, dan tindakan pemerintah dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam HFA dan SFDRR. Terkait pemahaman tentang bencana, peneliti menjelaskan bahwa bencana tidaklah "alami" dan menyimpulkan bencana alam adalah konsep yang salah dan menyesatkan. Proses fisik yang membahayakan atau kegiatan alam menjadikan manusia rentan dan terekspos oleh bencana. Kerentanan disebut sebagai sesuatu yang situasional dan bukanlah karakteristik yang permanen. Sekelompok orang yang rentan dibuat rentan karena proses sosial dan banyak kemungkinan sekelompok orang tersebut menjadi semakin rentan atau semakin tangguh dengan keputusan kebijakan. Pasca 2015, terdapat tujuh inisatif yang terjadi akibat dinamika dari geopolitik dan politik intra dan antar lembaga dengan janji bahwa akan adanya perdamaian yang tercipta pasca 2030. Tujuh inisiatif tersebut meliputi (i) *Sustainable Development Goals*, (ii) *Paris Agreement* (meliputi *UN Framework Convention on Climate Change*), (iii) *Addis Ababa Action Agenda* (*Financing for Development*), (iv) *World Humanitarian Summit*, (v) *New Urban Agenda*, (vi) berbagai inisiatif perdamaian dan keamanan regional, serta (vii) *Sendai Framework* (Wisner, 2020) .

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tema manajemen bencana dalam fase respon bencana karena Filipina adalah salah satu negara yang rentan bencana dan telah menyambut baik diadopsinya SFDRR dengan ikut meratifikasi SFDRR pada tanggal 19 Maret 2015 yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah Filipina atau instansi terkait untuk fokus pada penanggulangan bencana di Filipina.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk memakai metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki deskripsi yang berbeda-beda seperti menurut John W. Cresswell, penelitian kualitatif adalah cara untuk menggali dan memahami pentingnya banyak individu atau kelompok orang untuk masalah sosial dan kemanusiaan. Sementara, menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, penelitian kualitatif mencakup interpretasi dunia dan metode naturalistik. Artinya peneliti kualitatif yang mempelajari hal-hal di lingkungan alam berusaha memahami atau menjelaskan fenomena berdasarkan makna yang diberikan oleh manusia. (Bakry, 2016) Untuk data yang digunakan, penulis akan menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari buku, artikel jurnal, maupun situs berita atau situs pemerintah.

3. LANDASAN TEORITIK

Human Security

Keselamatan manusia itu sendiri memiliki dua arti: pertama, perlindungan terhadap ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan penindasan. Kedua, perlindungan terhadap gangguan yang tiba-tiba dan berbahaya terhadap gaya hidup masyarakat, baik di rumah, di tempat kerja maupun di masyarakat (Azis, 2004) Dalam hal ini, *United Nations Development Programme* (UNDP) memiliki indikator keselamatan sendiri untuk memastikan bahwa keselamatan manusia tidak tergantikan, dengan indikator seperti keamanan ekonomi, nutrisi, kesehatan, lingkungan dan keamanan pribadi, publik dan politik.

Terdapat dua pernyataan terkait kerjasama yang pertama, menyelesaikan masalah tertentu, hal ini bisa terjadi antar negara yang bahkan saling bermusuhan seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin atau Israel dan Hizbullah dalam pertukaran tahanan mereka, antagonis, bahkan musuh, bekerja sama pada kesempatan untuk menyelesaikan masalah tertentu, tanpa menangani konflik yang lebih luas – dengan kata lain, untuk mengelola tetapi tidak menyelesaikan masalah mereka. konflik. Arti kedua dari istilah tersebut, menggambarkan suatu hubungan, mengacu tidak hanya pada interaksi tertentu tetapi juga menyiratkan keinginan dari pihak aktor untuk memelihara dan mendorong interaksi tersebut melalui pemecahan masalah bersama. Multilateral juga memiliki dua bentuk, dalam arti strategi diplomatik yang digunakan oleh negara-negara untuk mengkoordinasikan kebijakan di antara tiga atau lebih aktor atau kerjasama dalam arti kedua. Multilateral lainnya sebagai kata sifat tanpa isme sering digunakan untuk merujuk pada taktik ad hoc yang diadopsi oleh negara atau kelompok negara dalam mengejar tujuan yang ditentukan, dalam definisi pertama kerjasama (Zartman & Touval, 2010). Selain pendekatan kolaboratif, pendekatan transdisipliner juga penting untuk dilakukan dalam menjamin keamanan insani dengan mengajak seluruh individu untuk melakukan analisis baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global (Ramadayanti, 2020)

Filipina sebagai negara yang rawan akan bencana perlu untuk melakukan penanggulangan bencana dengan perspektif human security. Hal ini disebabkan karena di konsep tersebut individu menjadi referent yang berarti pengidentifikasian terkait keamanan yang harus diperhatikan diutamakan kepada individu. Filipina telah mengutus dewan yang dapat mengambil alih tanggung jawab *National Disaster Risk Management Council* (NDRRMC) di tingkat provinsi, kota, maupun pedesaan sehingga dengan konsep ini kita dapat melihat lebih jauh apakah pendekatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan prinsip keamanan manusia. Tipe-tipe ancaman yang dihadapi juga diperhatikan di dalam konsep ini. Filipina telah melakukan pemetaan terkait wilayah dengan risiko tinggi terhadap bencana sebagai wujud identifikasi dalam persiapan pra bencana. Pemetaan ini penting untuk

mengetahui apa yang dapat dilakukan dan dipersiapkan untuk mewujudkan negara yang tangguh akan ancaman bencana yang terus mengintai.

Manajemen Bencana dan International Norms

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau menghancurkan kehidupan dan penghidupan masyarakat baik karena faktor alam maupun tidak alami dan faktor manusia, yang mengakibatkan kerusakan jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda dan efek psikologis. Definisi penderitaan juga mencakup tiga aspek utama yakni terjadinya suatu peristiwa atau kegagalan menimbulkan ancaman dan kerusakan, suatu peristiwa atau hambatan yang mengancam kehidupan, keberadaan dan keberfungsian masyarakat, dan ancaman yang menyebabkan hilangnya nyawa dan menghalangi masyarakat untuk mengelola sumber daya (Purnama, 2017)

Selain itu, bencana alam juga dapat dipahami sebagai kerusakan serius yang disebabkan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia. Bencana alam dapat menyebabkan hilangnya nyawa, kerusakan harta benda dan kerusakan serius pada lingkungan. Akibatnya, konsekuensi dari bencana alam sangat parah dan tidak berdaya bagi masyarakat yang terkena dampak dan membutuhkan. Ancaman dapat timbul dari kejadian alam yang ekstrim yang dapat menyebabkan kerusakan dan membahayakan nyawa manusia, kerugian harta benda, hilangnya mata pencaharian dan kerusakan lingkungan. Bencana seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, dll bisa disebut ancaman. Sedangkan kerentanan adalah kondisi yang mengurangi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk bersiap menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Risiko itu sendiri merupakan peluang yang muncul dan menimbulkan kerugian akibat ancaman keamanan dan/atau kerentanan. Potensi adalah sumber daya atau kekuatan yang dimiliki masyarakat dan lingkungannya yang memungkinkannya untuk secara cepat mencegah, mempersiapkan diri, merespons, dan pulih dari bencana alam. Jika kita mempertimbangkan penilaian risiko bencana alam, ancaman dan kerentanan masyarakat di daerah yang terkena dampak dapat dikurangi jika mereka memiliki kapasitas yang sesuai (PMI, 2007)

Gambar 1 Siklus Bencana

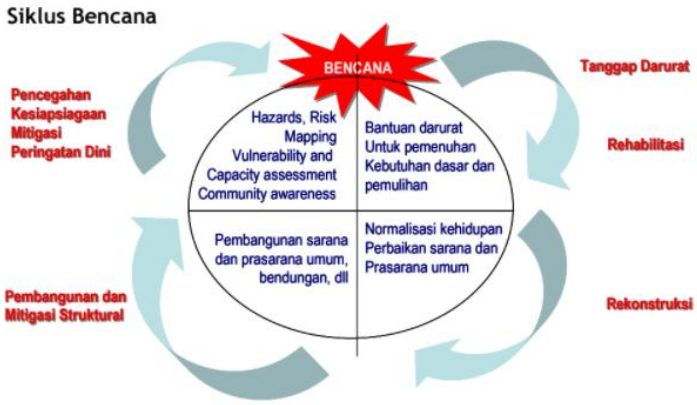

Sumber: Materi – Pengantar Manajemen Bencana Pelatihan KSR Dasar, 2007

Selain itu, SFDRR menjadi sebuah *international norms* yang disetujui dan ditandatangani oleh beberapa negara sebagai suatu aturan yang mengatur manajemen bencana. *International norms* telah ada sejak zaman dahulu dibuktikan dengan artifak yang ditemukan oleh para arkeologis di Sungai Nil, yang menjelaskan hubungan diplomatic antara Mesir dan kekuatan besar tetangganya di masa dinasti *New Kingdom* abad ke-18. Artifak

yang ditulis dengan Bahasa Akkadian ini menunjukan bahwa negara antar bagian telah mengadopsi sebuah kode perilaku yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan peringkat, protokol yang harus diterapkan saat berinteraksi, serta memegang teguh kepercayaan bersama tentang sikap yang tepat. Beberapa dekade terakhir ini peneliti mulai mengapresiasi international norms sehingga mereka mulai menganalisis dampaknya di berbagai arena kebijakan termasuk hak asasi manusia, intervensi kemanusiaan, sanksi, korupsi, monitor pemilihan, persenjataan, imigrasi, dll. Di awal abad ke-20, Presiden *United States* Barack Obama menyebutkan bahwa seluruh negara harus mematuhi standar yang memerlukan kekuatan sehingga hal tersebut dapat memperkuat mereka yang patuh dan mengisolasi mereka yang melanggar. *International norms* adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan politik dunia dan menjadi bagian dari kebijakan luar negeri. Norma dianggap sebagai sumber informasi bagi para pembuat keputusan bagaimana negara harus bertindak di suatu isu dan apa yang dapat dilakukan di situasi terkini (Raymond, 2021)

Filipina yang telah meratifikasi SFDRR dapat melihatnya sebagai *international norms* yang menjadi acuan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan serta mengatur bagaimana manajemen bencana harus dijalankan di Filipina. Dengan adanya SFDRR, Filipina dapat memperbaiki dan meninjau kembali apakah tindakan yang telah mereka lakukan telah sesuai dan apa yang seharusnya diperbaiki sehingga kapasitas yang dimiliki oleh Filipina dalam melakukan tanggap darurat bencana menjadi lebih baik lagi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman Insani di Filipina

Dalam hal iklim, Filipina adalah salah satu yang paling rentan terhadap dampak buruk. Perubahan iklim yang disebabkan oleh ekosistem yang rapuh (termasuk terumbu karang dan lautan) Fauna), populasi pesisir yang besar, efek cuaca yang sering terjadi Ekstrem di mana kekuatan cenderung meningkat. Dampak perubahan iklim diperhitungkan Ini akan menjadi faktor penting yang menyebabkan topan yang lebih kuat dan naiknya permukaan laut. Meningkatnya gelombang badai di wilayah pesisir. Gelombang badai yang kuat diperkirakan akan berdampak Lebih dari 40% penduduk pesisir tinggal di permukiman informal, Kemungkinan akan menghadapi efek pertama dari gelombang badai dan banjir (CEDM-HA, 2018)

Menurut laporan *World Risk Index* 2020, Filipina memiliki angka yang cukup tinggi dari tingkat ancaman terhadap cuaca ekstrim di 2020 dengan skor 42.30. Indikator ini menjelaskan bahwa tingkat ancaman kepada suatu masyarakat dari akibat cuaca ekstrim.

Tabel 1 Skor Negara dengan Cuaca Ekstrim

Country	Score	Level
Vanuatu	86.77	Very high
Tonga	61.21	Very high
Dominica	62.74	Very high
Antigua and Barbuda	68.92	Very high
Solomon Islands	40.04	Very high
Guyana	44.92	Very high
Brunei Darussalam	57.61	Very high
Papua New Guinea	30.79	Very high
Philippines	42.30	Very high
Guatemala	36.52	Very high

Sumber: World Risk Index, 2020

Upaya Kolaboratif Antar Sektor

Respons bencana di Filipina umumnya dilakukan oleh NDRRMC atau organisasi dibawah NDRRMC yang berada di tingkatan area, provinsi, kota/kabupaten, ataupun *barangay* (perkampungan). Pedoman yang dapat dilakukan dalam melakukan respons bencana sendiri telah dijelaskan di dalam *National Disaster Risk Reduction and Management Plan* 2020-2030 (NDRRMP). NDRRMP adalah dokumen yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh *Office of Civil Defense* (OCD) yang menetapkan tujuan dan sasaran khusus untuk mengurangi risiko bencana bersama-sama dengan tindakan terkait untuk mencapai tujuan ini sesuai dengan RA 10121. Tujuan dari NDRRMP sendiri adalah untuk memberikan arahan dan panduan strategis kepada pemerintah nasional, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, sektor swasta dan mitra di bidang bencana dan ketahanan iklim di Filipina, memperkuat tata kelola bencana dan iklim, serta berkontribusi terhadap norma internasional yang telah disetujui yang salah satunya adalah SFDRR. Untuk memastikan koherensi dan kepatuhan terhadap kerangka waktu pembangunan dan kebijakan global dan nasional agenda, cakupan dokumen ini adalah dari tahun 2020 sampai dengan 2030. Sejalan dengan itu, dokumen tersebut harus diimplementasikan, dipantau, dan dievaluasi berdasarkan kerangka waktu berikut: jangka pendek (2020-2022), jangka menengah (2023-2025), dan jangka panjang (2026-2030) (OCD, 2020)

Untuk menghadapi bencana alam besar dan pemerintah telah menetapkan bahwa negara sedang dalam situasi genting, Filipina mungkin akan mendapatkan permintaan khusus untuk melakukan pendampingan yang memenuhi gap yang dimiliki Filipina dalam kapasitas nasional. *Philippine International Humanitarian Assistance Cluster* (PIHAC) adalah kerangka institusi dan koordinasi dalam melakukan mobilisasi pendampingan internasional. Terdapat pula *Philippines International Humanitarian Assistance Reception Center* (PIHARC) yang menjadi one-stop-shop yang memfasilitasi penyaringan, proses ekspedisi dan masuknya tim kemanusiaan internasional, peralatan dan donasi dalam bentuk apapun. Apabila pemerintah meminta atau menyetujui pendampingan internasional, koordinasi akan diinisiasi diantara agensi yang memimpin masing-masing klister. PIHAC dipimpin oleh *Department of Foreign Affairs* (DFA) bersama dengan *Department of Social Welfare and Development* (DSWD), *Department of Health* (DOH), *Department of National Defense* (DND), *Department of Finance* (DOF) dan *Department of Budget and Management* (DBM) untuk mengatur donasi yang datang dari mitra internasional. Sejak Filipina menandatangani HFA di tahun 2005, negara tersebut telah mengembangkan kapasitasnya untuk membangun ketahanan akan bencana bersama dengan ratifikasi. Sebelum adanya SFDRR, Pemerintah Republik Filipina telah menandatangani RA 10121 di tanggal 27 Mei 2010. RA 10121 adalah peraturan mengenai tindakan penguatan sistem penanggulangan dan manajemen bencana Filipina, Penyediaan kerangka pengurangan dan pengelolaan risiko bencana nasional, Pelembagaan rencana penanggulangan dan penanggulangan risiko bencana nasional, Alokasi pendanaan, dan lainnya. RA 10121 juga dikenal sebagai "*Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010*". Dalam peraturan inilah Filipina mengatur mengenai penguatan kapasitas untuk PRB, kerjasama internasional, promosi rencana PRB, dan lainnya.

Sementara itu, sumber daya manusia juga hadir dari *Philippine Red Cross* (PRC) dengan sukarelawan yang siap membantu dalam respons bencana. *Volunteer Service Office* menangani program yang bertujuan untuk mendorong orang khususnya warga Filipina untuk menjadi sukarelawan dengan berbagi sumber daya, waktu, dan upaya meringankan penderitaan manusia. Tetapi, PRC tidak menutup kemungkinan apabila ada sukarelawan dari luar negeri yang ingin bergabung untuk membantu. Kemudian, AHA Centre juga menyediakan sukarelawan di dalam program AHA Centre yang berfokus pada respons bencana yaitu *ASEAN-Emergency Response and Assessment Team* (ASEAN-ERAT). Anggota dari ASEAN-ERAT sendiri beragam, dimulai dari NDMOs dan otoritas pemerintah terkait, kemudian masyakat sipil, Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, sektor

swasta, dan akademisi. Hingga di tahun 2020, ASEAN-ERAT telah mencapai lebih dari 300 anggota yang datang dari 10 negara anggota ASEAN dan 32 pelatih yang siap memberikan pelatihan kepada calon anggota ASEAN-ERAT dan memberikan pelatihan lanjutan terhadap anggota lainnya (AHA Centre, 2020)

Hambatan dalam Implementasi Sendai Framework

Setelah Filipina menandatangani SFDRR, Filipina telah menjadikan SFDRR sebagai salah satu norma internasional yang menjadi panduan dalam mengambil keputusan maupun mengimplementasikan manajemen bencana yang tepat. Tetapi dalam proses manajemen bencana khususnya respons bencana di lapangan, ditemukan beberapa hambatan yang terjadi selama proses respons bencana.

Prioritas pertama dari SFDRR menyebutkan perlunya pemahaman resiko bencana. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Senate Economic Planning Office* di Filipina walaupun pemerintah Filipina telah menetapkan Kerangka Pendidikan untuk Bencana masih banyak ditemukan masyarakat yang kurang paham akan resiko bencana khususnya yang terjadi di wilayahnya. Selain itu, bencana juga seringkali menjadi isu sampingan sehingga perhatian akan bencana dalam bentuk sumber daya maupun penelitian masih kurang dilaksanakan.

Kemudian, di dalam prioritas kedua disebutkan bahwa perlunya memperkuat tata kelola bencana untuk mengurangi resiko bencana. Sebenarnya, pemerintah Filipina telah mengeluarkan berbagai kebijakan akan bencana khususnya kebijakan dengan SFDRR sebagai latar belakangnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya *National Defense Strategy* 2018-2022, NDRRMP, NDRP, PDP 2017-2022, dan berbagai kebijakan lainnya. Sebelum penandatangan SFDRR, pemerintah Filipina juga telah mengeluarkan RA 10121 yang menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah Filipina dalam mengatur pengurangan resiko bencana dan manajemen bencana khususnya setelah terjadi angin topan Haiyan di tahun 2013 yang menjadi salah satu kasus bencana angin topan di Filipina yang menyebabkan jumlah korban jiwa dan kerugian terbesar. Tetapi dengan berbagai kebijakan tersebut pemerintah masih kurang mengimplementasikan kebijakan manajemen bencana.

Prioritas ketiga di SFDRR menyebutkan bahwa perlunya melakukan investasi pengurangan resiko bencana untuk menciptakan ketahanan. Setiap tahunnya terjadi kenaikan anggaran untuk pengurangan resiko bencana dan manajemen. SFDRR selalu menekankan akan pentingnya untuk mengatasi resiko bencana terlebih dahulu. Sayangnya, pemerintah Filipina masih belum melaksanakan hal ini dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan *Commision on Audit* (COA) melaporkan bahwa alokasi pendanaan bencana menunjukan besarnya pengeluaran yang dikeluarkan saat respons bencana. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Filipina lebih mengalokasikan anggarannya saat respons bencana daripada untuk persiapan. Kemudian, *Philippine Development Plan* (PDP) 2011-2016 pun melaporkan bahwa pencairan dana bencana kepada korban memakan waktu 9-12 bulan. Keterlambatan ini biasanya disebabkan kegagalan pemerintah daerah untuk memenuhi kriteria dan ketentuan yang dibuat oleh institusi pendanaan. Akibatnya, proses respons bencana hingga pemulihan menjadi lebih lambat daripada seharusnya.

Prioritas keempat atau yang terakhir adalah menambah persiapan bencana untuk respons efektif dan "*Build Back Better*" dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Untuk melakukan respons efektif, tentunya wilayah tersebut memerlukan kapasitas yang memadai. Kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah menyebabkan fungsi pengurangan resiko bencana dan manajemen terhambat. Penilaian nasional yang dibuat oleh Biro Pemantauan Pemerintah Daerah di 2013 menunjukan bahwa hanya 23% pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah rentan bencana yang telah siap untuk bencana dalam bentuk pencegahan, kapasitas lembaga, dan koordinasi. Aktivitas pengurangan resiko bencana juga tidak menjadi prioritas utama di beberapa pemerintah daerah dengan beberapa kabupaten

yang jarang terjadi bencana merasa tiada kepentingan untuk mengimplementasikan program manajemen bencana.

Upaya Pemerintah Filipina

Di dalam prioritas pertama SFDRR terkait pemahaman resiko bencana, Filipina telah membuat proses signifikan dengan mengumpulkan informasi yang komprehensif dan terkini menggunakan berbagai teknologi seperti GIS, *Light Detection and Ranging* (LiDAR), *Interferometric Synthetic Aperture Radar* (IfSAR), simulasi computer, dan pemetaan. Kumpulan informasi inilah yang dapat memberikan pemahaman dalam menentukan resiko bencana dan kerentanan komunitas. Di tingkat nasional, lembaga teknis seperti *Philippine Institute of Volcanology and Seismology* (PHIVOLCS), *Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration* (PAGASA), *National Mapping and Resource Information Authority* (NAMRIA), UP *Resilience Institute* dan Mines and *Geoscience Bureau* (MGB) telah membuat mandat untuk penilaian resiko multi-hazard seperti erupsi vulkanik, gempa bumi, tsunami, longsor, dan angin topan. Hal ini dapat membantu untuk melakukan respons bencana karena adanya penilaian resiko yang dapat memprediksi bencana yang akan terjadi.

Prioritas kedua SFDRR mengenai penguatan tata kelola bencana untuk mengatasi resiko bencana juga telah diupayakan Filipina. RA 10121 masih menjadi fondasi hukum nasional terkuat dalam menyediakan instrument legal dan kerangka kebijakan dalam pengurangan resiko bencana dan manajemen. Sementara, di dalam pengaturan lembaga NDRRMC menjadi lembaga tertinggi dalam pembuatan keputusan dengan tingkat DRRMC yang tersedia di setiap area, provinsi, kota/kabupaten, dan barangay serta BDRRMC yang bertanggung jawab dalam melaksanakan operasi manajemen bencana di wilayah masing-masing sesuai dengan peraturan pengurangan resiko bencana dan manajemen.

Kemudian, prioritas ketiga SFDRR mengenai investasi pengurangan resiko bencana untuk ketahanan telah dilakukan sejak 2008 oleh *National Economic and Development Authority* (NEDA) yang telah mengembangkan pengurangkan resiko bencana. Di dalam RA 10121 disebutkan bahwa pendanaan bencana untuk daerah tidak boleh kurang dari 5% dari pendapatan regular yang harus disisihkan untuk pengurangan resiko bencana dengan rasio 70% untuk pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dan 30% didedikasikan untuk *Quick Response Fund* (QRF). *Department of Finance* Filipina juga telah mengelaborasi strategi perlindungan keuangan nasional untuk meningkatkan ketahanan terhadap resiko bencana.

Terakhir untuk prioritas keempat SFDRR yaitu menambah persiapan bencana untuk respon efektif dan "Build Back Better" dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemerintah Filipina telah menyusun NDRP dan NDRRMP dan diadopsi untuk berbagai bahaya dan skenario bencana dengan partisipasi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Pusat operasi NDRRMC juga telah dibentuk untuk pemantauan, evaluasi, dan koordinasi operasi tanggap bencana dengan OCD melakukan Penilaian Risiko dalam masa pra bencana, *Actions Programs and Protocols* (PDRA-APP), dan peningkatan kapasitas untuk kesiapsiagaan darurat, *Incident Command System*, *Search and Rescue* dan *Post-Disaster Needs Assessment* (PDNA). OCD, dalam kemitraan dengan mitra pemerintah lainnya, termasuk DILG, dan *Philippine Public Safety College* (PPSC) terus mendukung pemerintah daerah tentang manajemen bencana.

Urgensi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

Jika melihat kerangka kerjasama serupa seperti *Paris Agreement*, SFDRR lebih membahas mengenai manajemen bencana sementara di dalam *Paris Agreement* lebih membahas mengenai adaptasi perubahan iklim. Kedua kerangka kerjasama tersebut tidak mengikat negara secara hukum, tetapi dalam prosesnya *Paris Agreement* dibahas oleh para

negosiator dan mereka sepakat bahwa perjanjian ini harus mengikat secara hukum untuk memberi dorongan bagi negara untuk merancang dan memperbarui kontribusi yang ditentukan secara nasional untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan membatasi pemanasan global hingga 2^{o} Celsius. Negara-negara ini harus melaporkan kemajuan mereka di dalam konferensi seperti *Conference of Parties* 26 (COP26) (MacLellan, 2021).

Sementara itu, SFDRR yang tidak mengikat secara hukum sehingga membuat negara tidak merasa diwajibkan untuk meningkatkan standar manajemen bencana mereka. Padahal bencana juga dapat terjadi seiring dengan perubahan iklim sehingga dapat menjadi tindakan efektif bagi negara untuk mempersiapkan dan merespon saat ada kejadian darurat di negaranya masing-masing apabila terjadi bencana. Jika melihat dampak SFDRR di Filipina sendiri yang menjadikan SFDRR menjadi panduan utama dalam segala kebijakan mengenai pengurangan resiko bencana, SFDRR perlu juga menjadi perhatian bagi seluruh negara melihat dampak bencana yang dapat menganggu kehidupan masyarakat di segala aspek seperti aspek ekonomi, lingkungan, dll.

5. SIMPULAN

Filipina sebagai negara yang rentan akan bencana dengan letak geografisnya di Cincin Api Pasifik perlu menyiapkan segala upaya untuk mengatasi bencana. Bencana demi bencana seringkali menimpa negara Filipina seperti angin topan, siklon tropis, gempa bumi, banjir, dan lainnya. Rangkaian bencana yang terjadi dari tahun 2016-2020 di Filipina telah memberikan pemahaman penuh akan pentingnya kebijakan, kapasitas, investasi untuk PRB, dan pendanaan. Seluruh upaya PRB telah dilakukaSayangnya, upaya pemerintah nasional Filipina ini tidak terdistribusi dengan baik. Kunci dari PRB yang baik menurut teori human security salah satunya adalah kolaboratif dan transdisipliner di seluruh cakupan wilayah baik internasional, regional, nasional, wilayah, provinsi, kota/kabupaten, dan barangay. Tetapi, prioritas SFDRR seringkali terlihat hanya dipahami oleh pemerintah nasional ataupun lembaga internasional saja tanpa melihat bahwa terdapat beberapa pemerintah daerah yang masih belum menerapkan prioritas SFDRR secara baik. dengan SFDRR sebagai salah satu panduannya.

Namun, melihat hambatan dan pelaksanaan yang terjadi di Filipina selama tahun 2016-2020 dalam mengatasi bencana dengan panduan norma internasional seperti SFDRR, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran untuk pemangku kebijakan dan organisasi yang fokus akan bencana. Pertama, peneliti melihat perlunya dibentuk Departemen Bencana dalam jajaran kabinet pemerintah di Filipina. Bencana selalu menjadi isu sampingan dan Filipina telah membentuk NDRRMC sebagai badan manajemen bencana. Namun, melihat struktur organisasi yang diisi oleh departemen pemerintah yang menyebabkan seakan-akan berjalan sendiri karena masing-masing departemen memiliki kepentingannya sendiri, rasanya perlu untuk Filipina membentuk departemen khusus untuk bencana karena negaranya yang memang rentan akan bencana. Kedua, Filipina perlu memastikan ketersedian informasi mengenai bencana mudah diakses dan penelitiannya dapat didukung untuk memberikan pemahaman mendalam akan resiko bencana di Filipina. Selain dapat membantu kinerja pemerintah dan organisasi yang bergerak di bidang bencana, masyarakat juga dapat terbantu dengan akses informasi ini agar dapat melakukan persiapan lebih sebelum terjadinya bencana dan meminimalisir kerugian yang mereka alami. Ketiga, Filipina telah mengatur pengalokasian dana untuk fase persiapan adalah 70% sesuai dalam RA 10121. Tetapi melihat praktek yang terjadi di lapangan, dana yang digunakan lebih banyak dikeluarkan dalam fase respons bencana. Hal ini tentunya menghambat respons efektif dan kepentingan "*Build Back Better*" karena proses evakuasi dan kerugian yang dialami akan lebih besar daripada jika pendanaan lebih difokuskan untuk fase persiapan. Selanjutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah nasional serta kerjasama internasional perlu diberikan perhatian khusus. Kejelasan koordinasi ini penting untuk memberikan informasi mengenai apa saja

yang sebenarnya dibutuhkan saat wilayah terjadi bencana dan apakah kebutuhan para korban telah terpenuhi.

6. DAFTAR PUSTAKA

AHA Centre. (2020). *12 Years of the ASEAN-ERAT Missions*. Retrieved from The Column AHA Centre: https://thecolumn.ahacentre.org/insight/vol-67-12-years-of-the-asean-erat-missions/

Azis, A. (2004). Menelaah Konsep Human Security: Studi Kasus Penanganan Masalah Pengungsi Afghanistan di Australia (1999-2002). *Global Vol 7 No 1 November 2004*, 82-83. DOI: Retrieved from https://doi.org/10.7454/global.v7i1.235

Bakry, U. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

CEDM-HA. (2018). *Philippines Disaster Management Reference Handbook.* Hawaii: Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance.

Commision on Audit. (n.d.). *Disaster Management Practices in the Philippines: An Assesment.* Philippines: Commision on Audit Republic of the Philippines.

Doroteo, H. (2015). Philippines: Disaster Risk Profile and Disaster Risk Reduction (DRR) Framework: Natural Calamities. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/287817230_Disaster_Risk_Profile_and_Disaster_Risk_Management_Framework_of_the_Philippines_Natural_Disasters

MacLellan, L. (2021, November 22). *Is The Paris Climate Agreement Legally Binding? Expert Explain*. Retrieved from World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2021/11/paris-climate-agreement-legally-binding/

OCD. (2020). *National Disaster Risk Reduction and Management Plan 2020-2030.* Queson City: Office of Civil Defense - Policy Development and Planning Service.

PMI. (2007). *Pelatihan KSR Dasar: Kumpulan Materi.* Jakarta: Palang Merah Indonesia.

Purnama, S. (2017). *Modul Manajemen Bencana.* Bali: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Ramadayanti, E. (2020, March 26). *Covid-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement.* Retrieved from FH Unpad: https://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/

Raymond, G. (2021). *International Norms and the Resort to War.* Boise: Boise State University.

Sinulingga, A. (2016). Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional. *Andalas Journal of Internasional Studies Vol. 5 No. 1*, 17-27. DOI: https://doi.org/10.25077/ajis.5.1.17-27.2016

Wisner, B. (2020). Five Years Beyond Sendai: Can We Get Beyond Frameworks? *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 239-249. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s13753- 020-00263-0

World Bank. (2005). *Natural Disaster Risk Management in the Philippines: Enhancing Poverty Alleviation Through Disaster Reduction.* World Bank. URI: http://hdl.handle.net/10986/8748

Zartman, I., & Touval, S. (2010). *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism.* Cambridge: Cambridge University Press.

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES
Volume 3, Nomor 2, Januari 2022, pp. 98-106
ISSN: 2685-7766

Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani

Oni Lestari[1], Hendra Wijayanto[1*]
[1]Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus Jakarta, Jakarta Utara, 14350, Jakarta-Indonesia

Info Artikel
Dikirim: 08 Nov, 2021
Diterima: 26 Jan, 2022
Dipublikasi: 31 Jan, 2022

Kata Kunci:
Implementasi; Kartu Tani; Kebijakan; Pupuk Bersubsidi;

Koresponden:
Hendra Wijayanto

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus Jakarta, Jakarta Utara, 14350, Jakarta-Indonesia

Email:
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Sitasi Cantuman:
Lestari, O. & Wijayanto, H.. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani. *Journal of Political Issues. 3(2); 98-106.* https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.68

DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.68

Lisensi:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)
OPEN ACCESS

ABSTRAK

Abstract *This study aims to determine the implementation of subsidized fertilizer distribution policies through the farmer card program to pineapple farmers in Siwarak Village, Karangreja District, Purbalingga Regency, based on the Decree of the Director General of Agricultural Infrastructure and Facilities Number 11/Kpts/SR.310/30/2020 concerning Technical Instructions for the Implementation of Provision and Distribution of Subsidized Fertilizers for Fiscal Year 2020. The method used in this research is descriptive qualitative and data acquisition is done through structured interviews, field observations and documentation review. The results showed that the making of Farmers' Cards in Siwarak Village was in accordance with the regulations, namely proposal, issuance and redemption, but in its application it was still not optimal. Supporting factors for implementation are the presence of competent human resources, adequate budget and community participation. The inhibiting factors are seen from the limited distance and cost in accessing subsidized fertilizers, obstacles in the preparation and validation of the Group Needs Definitive Plan (RDKK) and the weak network in accessing Farmer Cards.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani pada petani nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, berlandasakan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 11/Kpts/SR.310/30/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan perolehan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan serta telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan Kartu Tani di Desa Siwarak sudah sesuai pada regulasi yaitu pengusulan, penerbitan dan penebusan, namun dalam penerapannya masih belum optimal. Faktor pendukung dari implementasi yaitu adanya sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai dan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat dilihat dari adanya keterbatasan jarak dan biaya dalam mengakses pupuk subsidi, hambatan dalam penyusunan dan validasi Rencana Defintif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta lemahnya jaringan dalam mengakses Kartu Tani.

Tentang:
Oni Lestari, Penulis saat ini telah lulus studi S-1 Sarjana Ilmu Administrasi Publik di Univesitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Hendra Wijayanto, menyelesaikan studi S2 di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2014. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Hak Cipta 2022. Dimiliki oleh Penulis,
Dipublikasi oleh Journal of Political Issues.
Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, salah satu kekayaan alam yang melimpah terletak di darat berupa lahan pertanian yang sangat luas. Sebagai negara agraris sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian bagi mayoritas penduduk Indonesia. Pertanian juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi negara. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis PDB sektor-sektor yang mencatatkan pertumbuhan secara positif, yakni sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,44 persen, sektor pengadaan air sebesar 1,28 persen, sementara itu pertumbuhan PDB sektor pertanian tetap berkontibusi positif yakni 2,19 persen. (Direktorat Jenderal Holtikultura Kementrian Pertanian, 2020).

Pada kenyataannya, pertanian merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kesejahteraan petani belum meningkat secara merata dibandingkan dengan pekerja di sektor industrialisasi dan perdagangan. Pemerintah sebagai badan utama penyelenggara negara memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan petani. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan petani mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

Pembangunan pertanian dilaksanakan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan diimbangi dengan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna. Untuk menunjang kegiatan pertanian diperlukan komponen yang dapat memperlancar proses produksi. Salah satu faktor terpenting dalam proses produksi pertanian adalah penggunaan pupuk. Untuk mengurangi penurunan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan pemupukan yang tepat dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitas (Hartatik, et al, 2015).

Ketersediaan pupuk yang cukup baik dari segi kualitas dan kuantitas sangat ditentukan dari peran serta dari pemerintah daerah setempat. Salah satu peran pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan pupuk yang dihadapi petani adalah dengan menyediakan pupuk bersubsidi. Kebijakan suplementasi pupuk di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 1970-an hingga saat ini. Dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, maka pemerintah melakukan upaya pengawasan terhadap alokasi pupuk bersubsidi melalui Presiden RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang pada Pengawasan.

Dalam rangka menyempurnakan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi yang banyak menemukan kendala dilapangan, serta guna menjamin transparasi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani maka pemerintah membuat program Kartu Tani untuk memudahkan petani dalam mengakses dan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kartu tani menurut Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 521.1/ 014723 tentang Petunjuk Teknis Kartu Tani Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) di Provinsi Jawa Tengah, kartu tani merupakan Kartu debit BRI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran Pupuk Bersubsidi di mesin Electronic Data Captur (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transkasi perbankan pada umumnya (Biroinfrasda Jawa Tengah, 2020).

Salah satu darah di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah yang telah menerapkan program Kartu Tani adalah di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Selain terkenal dengan desa wisata alam, Desa Siwarak merupakan sentral penghasil nanas di Kecamatan Karangreja sekaligus penghasil nanas terbesar di Kabupaten Purbalingga. Luas wilayah Desa Siwarak adalah 672.750 Ha yang terdiri dari tanah perumahan, sawah, tegalan, hutan negara dan lain-lain. Sekitar 1.507 penduduk Desa Siwarak bekerja sebagai buruh tani serta petani 861 jiwa, mayoritasnya adalah petani nanas baik sebagai pemilik maupun penggarap.

Pada dasaranya penggunaan Kartu Tani bagi petani nanas Desa Siwarak akan memberikan keuntungan bagi petani, khusunya dalam melakukan penebusan pupuk berusbsidi yang didapatkan dikios pupuk lengkap (KPL) desa. Namun, berdasarkan observasi awal penggunaan Kartu Tani di Desa Siwarak belum optimal dikarenakan informasi Kartu Tani belum menyeluruh ke seluruh petani nanas Desa Siwarak, proses distribusi Kartu Tani tercetak cukup lama sehingga menghambat petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Serta adanya permasalahan dalam proses penyusunan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang mana data tersebut digunakan sebagai syarat administrasi dalam pendaftaran kartu tani.

Berkenan dengan hal tersebut, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi dari program kartu tani pada petani nanas di Desa Siwarak. Dengan harapan adanya program kartu tani ini dapat dijadikan peluang besar bagi petani nanas untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sebagai bahan penunjangpertanian nanas di Desa Siwarak dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, menjadikan petani nanas untuk memilki keinginan mengakses dan memanfaaatkan Kartu Tani. Serta sebagai upaya bagi pemerintah utnuk dapat meningkatkan dan mewujudkan kesejateraan petani Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa adanya tambahan manipulasi dalam hasil penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Pada penelitian ini digunakannya metode pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, data primer didapat dari hasi observasi, wawancara serta telaah dokumentasi yang sudah dilaksanakan di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder didapat dari informasi yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari arya tulis ilmiah, buku, ataupun berita di berbagai media. Infroman pada peneltian ini berjumlah tiga belas yang terdiri dari dua bagian seksi produksi tanaman pangan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, dua pegawai Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangreja, satu pegawai BRI KCP Unit Karangreja, dua ketua kelompok tani dan 5 petani nanas Desa Siwarak.

3. LANDASAN TEORITIK

Kebijakan Publik

James Anderson (2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu masalah atau arah tindakan yang disengaja yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sekumpulan aktor untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik sebagaimana dikutip dalam Arifin Tahir (2011), menyatakan bahwa "kebijakan publik adalah pilihan apakah pemerintah akan melakukannya atau tidak". lakukan tidak dieksekusi. Artinya, pemerintah dapat memutuskan untuk melakukan sesuatu, harus ada tujuan, dan kebijakan negara harus mencakup semua tindakan pemerintah, bukan hanya pernyataan yang diinginkan pemerintah atau pejabatnya. Ini juga merupakan kebijakan nasional bahwa pemerintah tidak melaksanakannya.

Selain itu, Mulyadi (2016) menyatakan bahwa kebijakan publik mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai kehumasan, masalah publik, dan sumber daya yang ada untuk dilaksanakan bersama oleh pemerintah untuk kepentingan lain. proses kerja yang berkesinambungan dan saling berhubungan dengan seseorang untuk kepentingan masyarakat. Berbagai proses tersebut meliputi pengembangan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Ketiga tahap ini tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung. Tahap pembangunan berjalan dengan baik, namun kebijakan tidak selalu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tahapan implementasi dan evaluasi menjadi penting untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan harus dikaitkan dengan pandangan ahli bahwa kebijakan yang dibuat pada tiap tahun harus dilaksanakan. Oleh karena itu, menurut Edward III perlu dilaksanakan kebijakan tersebut dengan berbagai alasan dan perspektif. Implementasi politik diperlukan karena ada isu-isu politik yang perlu dibenahi dan diselesaikan. Edward III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan menanyakan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Winarno, 2012).

Menurut buku Guntur Setiawan (2004) tentang Pelaksanaan Birokrasi Pembangunan, ia menyatakan pejabat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap implementasi kebijakan yanga ada. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan ukuran keberhasilan kebijakan pemerintah (Agustino, 2006).

Model Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan *"integrated implementation model"* yang dikemukakan Soren C Winter (2003). Dimana Soren mengemukakan terdapat tiga variabel yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan antara lain:

1. Perilaku Hubungan Antar Organisasi (*Behavior Realtionship Between)*

   Dimensinya mencangkup Komitmen dan Koordinasi, komitemen adalah kesepakatan bersama dengan intansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksanaan program. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan munculnya rasa egoism diantara organisasi pelaksana program yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi. Semntara itu, pada tataran koordinasi pola hubungan antar organisasi sangat urgen dan berpengaruh terhadap penetuan strategi suatu implementasi. Pengaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi.

2. Perilaku Aparat Birokrasi Tingkat Bawah (Street Level Bureaucratic Behavior)

   Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan silur kewenangan formal (diskersi), sehingga menurut Lipsky (1980) perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya menyimpang dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Dalam implementasi tersebut diutamakan adanya hubungan antara masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Dengan demikian birokrasi level bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementasi kebijakan publik, dan kinerjanya ditentkan dengan adanya standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya

3. Perilaku Kelompok Sasaran (Target Grup Behavior)

   Dimensinya mencakup respon positif dan negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan. Perilaku kelompok sasarann kebijakan dalam implementasi kebijakan public adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negative (Winter, 2003).

Kebijakan Sosial

Dalam rangka mencapai tujuan bangsa, maka dibuatlah kebijakan kesejateraan rakyat *(Social Welfare).* Menurut Suhartoo (2009) kesejateraan sosial diartikan sebagai sebuah

keadaan yang mana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,dan kebutuhan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan memiliki kemampuan dalam upaya mengembangakan potensi diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi hidup sosial. Sementara itu, kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyakat banyak. (Suharto, 2005).

Pengertian Program

Menurut Nawawi (2007) mengemukakan bahwa program dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksankan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yan telah ditentukan dan dijalankan. Setiap program kebijakan yang disusun disusun selalu mengacu pada kebijakan dan program yang telah ditentukan.

Pendapat lain berbeda, menurt Arikunto (2014) menyebutkan bahwa program merupakan suatu sistem, dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan tidak hanya satu kali namun dilakukan secara rutin dari mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir. Sehingga dapat disiimpulkan bahwa program merupakan sederatan kegiatan yang dilaksankan lebih dari satu kali namun berkelanjutan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai aturan perundang-undangan.

Kartu Tani

Dalam definisinya kartu tani adalah Kartu debit BRI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran Pupuk Bersubsidi mulai dari mesin Electronic Data Capture (EDC) dari Bank BRI yang ditempatkan di Pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Tujuan dari kartu tani adalah terwujudnya pendistribusian pupuk bersubsidi dengan asas 6 (enam) tepat, yaitu tepat dari segi jumlah, tepat dari segi jenis, tepat dari segi waktu, tepat dari segi tempat, tepat dari segi mutu, dan tepat dari segi harga beli. Serta sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan perbankan bagi petani, khususnya Jawa (Biroinfrasda Jawa Tengah, 2020). Proses pelaksanaan kartu tani dilakukan secara bertahap dimulai dari pendataan dan verifikasi data, penerbitan kartu tani, dan pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu anggota kelompok penggarap sawah

Pupuk Bersubsidi

Pupuk merupakan komponen yang paling penting dalam menunjang proses produksi pertanian, pemilihan pupuk yang berimbang memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hasil pertanian. Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau (Hartatik, et.al, 2015). Menurut Suparmoko (2014) dalam bukunya " Keuangan Pemerintah : Pengeluran dan Pembelanjaan" menyatakan bahwa subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah industri di tingkat besar dan industri di tingkat rumahan untuk mencapai tujuan tertentu dalam memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah.

Pupuk bersubsidi merupakan bahan kebutuhan yang diperlukan oleh petani yang mana pengadaannya dan penyaluran mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok penggarap sawa atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA. Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya, yang ditetapkan oleh mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. Penyaluran pupuk bersubsidi

harus memenuhi prinsip 6 tepat yaitu prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah harga, tempat, waktu dan kualitas barang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kartu Tani di Desa Siwarak

Berdasarkan hasil penelitian sosialisasi mengenai informasi program Kartu Tani terdapat perbedaan, hal tersebut berkaitan dengan keterlibatan dan keaktifan peran dari kelompok tani, masing-masing ketua RT dan Kepala Dusun (Kadus). Selanjutnya, pembuatan Kartu Tani di Desa Siwarak sudah berdasarkan pada peraturan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11/kpts/SR.310/B/03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 yaitu pengusulan, pencetakan dan penebusan.

Proses pembuatan Kartu Tani terutama dalam penditisubsianya berdasarkan hasil penelitian waktu yang diperlukan untuk distribusi Kartu Tani cukup lama, karena didalam prosedurnya pembuatan Kartu Tani harus memenuhi beberapa langka yang berbeda dengan kartu ATM biasa. Selain itu, partisipasi dari stakeholder yang terlibat juga mempengaruhi lamanya waktu distribusi kartu tani. Sehubungan dengan sarana dan prasana penujang program Kartu Tani di Desa Siwarak, berdasarkan hasil penelitian pada tingkatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sudah tersedia wifi, alat tulis menulis namun pada fasilitas utama seperti komputer mengalami kerusakan dan pencurian. Sementara itu pada Kios Pupuk Lengkap (KPL) terdapat sejumlah fungsi Elektronic Data Capture (EDC) yang digunakan untuk pelayanan Kartu Tani

Berdasarkan hasil temuan di lapangan kategori pupuk untuk tanaman nanas dan mutu pupuk subsidi sudah tersedia di KPL Desa Siwarak yaitu NPK ponska, UREA, SP36, ZA harga pupuk sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pejabat daerah. Sehubungan hasil penelitian, meskipun alokasi pupuk bersubsidi sudah sesuai HET dan kertesediaan pupuk untuk pertanian nanas sudah ada, namun terdapat perbedaan pandangan antara petani nanas dengan pemerintah dalam hal ini penyuluh pertanian terkait dengan jumlah pupuk yang ada pada Kartu Tani belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian nanas.

A. Perilaku Hubungan Antar Organisasi

a) Komitmen

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai komitmen yaitu terkait wujud konkrit yang diberikan oleh instasi pemerintah dalam hal ini seperti Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karangreja, serta Bank BRI KCP Unit Karangreja dalam melaksanakan Implementasi kebijakan penyaluran bersubsidi melalui program Kartu Tani. Berdasarkan hasil penelitian wujud komitmen dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga adalah dikerahkannya seluruh bagian dari dinas pertanian seperti peran penyuluh pertanian, adanya ketersediaan fasilitas, komunikasi akitf dan sosialiasi yang masif kepada organisasi tingkat bawah lainnya.

Wujud komitmen yang diberikan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karangreja adalah dengan pertemuan antar kelompok petani desa serta penggunaan berbagai media baik cetak maupun elektronik yang berkembang yang dimilki oleh BPP. Sementara itu, wujud komitmen yang dilakukan oleh Bank BRI KCP unit Karangreja adalah melalui kerjasama antarorganisasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terbuka berkaitan dengan penggunaan Kartu keanggotaan petani.

b) Koordinasi

Dalam mengimplementasikan Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani di Desa Siwarak melibatkan beberapa Instansi yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga melalui bagian tanaman pangan, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karangreja melalui penyuluh pertanian wilayah binaan Desa Siwarak , Pemerintah Desa Siwarak, serta Bank BRI KCP unit Karangreja dan organisasi masyarakat lain seperti kelompok tani desa. Berdasarkan hasil penelitian wujud koordinsi Dinas Pertanian dalam bentuk pertemuan penyuluh pertanian, adanya forum sesi diskusi.

Sementara itu, Balai Penyuluh Pertanian wujud koordnasinya melalui menjalin komunikasi dengan ketua kelompok tani dan dinas pertanian. Serta melakukan koordinasi dengan Bank BRI dalam mendata e-RDKK. Bank BRI KCP Unit Karangreja telah melaksanakan koordinasi melalui kerjasama antar kelompok tani dan penyuluh pertanian perihal penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Pihak kios pupuk lengkap melaksanakan koordinasi dalam hal penggunaan EDC dengan pihak BRI.

B. Perilaku Birokrasi Tingkat Bawah

Yang dimaksud dengan perilaku birokrasi level bawah adalah kemampuan dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karangreja, Penyuluh pertanian lapangan (PPL) Desa Siwarak, dan Pegawai Bank BRI KCP Unit Karangreja dalam menjalankan program Kartu tani di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga diluar kewenangan formal (Diskresi). Berdasarkan hasil penelitian, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) telah melaksanakan implementasi kebijakan secara diskersi hal tersebut dapat ditelaah dari pendekatan komunikasi secara personal dengan petani, melibatkan penuh pihak lain seperti PPL, KPL, dan BRI.

Sebagai penyuluh pertanian wilayah binaan Desa Siwarak juga telah melakukan diskresi dalam bentuk melaksanakan pendistribusian Kartu Tani, yang mana kegiatan tersebut merupakan tugas dari BRI KCP Unit Karangreja sebagai pihak pencetak Kartu Tani. Selain itu, PPL juga melibatkan ketua kelompok tani, pemerintah desa serta menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani dalam memberikan informasi tentang pertanian. Sementara itu, pihak BRI telah melakukan diskresi dengan komunikasi personal pada saat melakukan survei lapangan.

C. Perilaku Kelompok Sasaran

Berdasarkan pada hasil penelitian kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani di Desa Siwarak terdiri dari ketua kelompok tani, pemilik kios pupuk lengkap dan petani nanas Desa Siwarak. Dalam penelitian ini menunjukan masing-masing kelompok sasaran memilki respon positif dan respon negatif . Dari respon positif dilihat Kartu Tani dapat memberikan kemudahan bagi kelompok sasaran dalam mengakses ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih murah, dan menghindari adanya kelangkaan pupuk. Semantara itu, dari respon negatif ditunjukan dari tanggapan petani nanas terkait permasalahan dalam mengakses Kartu Tani yaitu sering terjadi Kartu Tani yang eror, dan jumlah pupuk subsidi belum cukup untuk pertanian nanas ketika jumlah pupuk pada Kartu Tani sudah mencapai habis.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penelitian ini dapat dilihat dari adanya Sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan keahilan yang dibutuhkan, SDM tersebut berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Purblingga dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karangreja, dan penyuluh pertanian lapangan Desa Siwarak, adanya anggaran APBN dan

APBD yang memadai, partisipasi ketua kelompok tani dan petani dalam penyusunan RDKK, dan adanya pendampingan yang telah terkoordinir dengan beberapa instansi.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupeten Purbalingga adalah keterbatasan jarak dan biaya transportasi bagi para petani yang jauh dari kios pupuk lengkap (KPL) sehingga membuat petani tidak dapat mengakses Kartu Tani, hambatan dalam proses validasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yaitu adanya perubahan data RDKK petani berkaitan dengan perubahan luas lahan pertanian, perubahan kepemilikan Kartu Tani bagi yang sudah meninggal, pergantian komoditas pertanian dan hal tersebut tanpa ada pelaporan ke pihak BPP. Sementara itu, dalam penyusunan RDKK di keanggotaan kelompok tani hambatanya terletak pada penyesuaian kebutuhan jumlah pupuk dengan luas lahan, masih banyak petani yang tidak mendaftarkan SPPT sehingga sulit mendapatkan kuota pupuk subsidi. Selain itu, perubahan penanaman jenis tanaman di Desa Siwarak membuat kebutuhan pupuk petani jauh lebih banyak. Dalam mengakses Kartu Tani hambatan terjadi di kios pupuk lengkap (KPL) Desa Siwarak yaitu seringkali terjadi kendala jaringan sehingga mempengaruhi pelayanan kartu anggota.

5. SIMPULAN

Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui kementerian pertanian, yang mana kebijakan pupuk bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan sosial. Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani di Desa Siwarak merupakan kebijakan dalam pemberian pupuk subsdi melalui bantuan teknologi berupa kartu ATM yang dapat diakses dalam Elektonik Data Capture (EDC) untuk memudahkan petani dalam melakukan aktifitas pertanian terutama dalam proses pembelian pupuk subsidi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani di Desa Siwarak sudah berjalan dan sesuai berdasarkan pada regulasi yang ada, namun dalam beberapa hal masih belum berjalan secara optimal. Dalam analisis menggunakan teori SorenC.Winter dapat diketahui masingmasing organisasi terkait memilki perilaku hubungan antar organisasi yang baik dalam wujud komitmen dan koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani. Sementara itu, perilaku birokrasi tingkat bawah dalam hal ini organisasi yang langsung melaksanakan tugas dilingkungan masyarakat telah mengimplementasikan kebijakan yang dibuat. Selain itu, melalui perilaku kelompok sasaran dapat diketahui, adanya respon positif dan respon negatif dari kelompok sasaran kebijakan dan masyarakat secara langsung adanya kebijakan penyaluran pupuk berubsidi melalui program Kartu Tani.

Faktor pendukungnya adalah sumber daya manusia (SDM), jumlah anggota yang mumpuni cukup untuk menjalankan tugasnya, didukung oleh adanya anggaran APBN dan APBD yang sesuai, serta keterlibatan masyarakat khususnya petani. Di sisi lain, kendalanya adalah jarak dan biaya yang terbatas karena petani jauh dari kios pupuk lengkap. Artinya, petani tidak memiliki akses ke Kartu Tani dan juga mengalami kegagalan saat validasi dan kompilasi data RDKK. Selain itu, lemahnya jaringan menjadi kendala bagi petani untuk mengakses kartu tani.

6. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anderson, J. 2012 *Public Policy Making, (Second ed.)*, New York : Holt,. Renehart and Winston, New York. AR

Arikunto, S. (2014). *Penlitian Tindakan Kelas.* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Biroinfrasda Jawa Tengah (2020). *Pengertian Kartu Tani*. April 2 2021. Retreived from Pengertian Kartu Tani - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id)

Direktorat Jenderal Holtikultura Kementrian Pertanian (2020). *PDB Triwulan II 2020, Sektor Pertanian Tumbuh Paling Tinggi. April 2 2021*. Retrieved from http://hortikultura.pertanian.go.id/?p=5494

Hartatik, W., Husnain, H., & Widowati, L. R. (2015). Peranan Pupuk Organik dalam Peningkatan Produktivitas Tanah dan Tanaman. *Jurnal Sumberdaya Lahan, 9(2).* Retrieved from: http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jsl/issue/view/JSL%20Vol.9%282%29%20Dec.2015

Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Nawawi, H. (2007). *Metode penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press

Lipsky, M. (1980) *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*.; New York: Russell Sage Foundation.

Setiawan, G. (2004). *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pusatak

Suharto . (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Suharto, E. (2005), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko. (2014). *Keuangan Pemerintahan*: Pengeluaran dan Pembelanjaan. Penerbit Rineka Cipta.

Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.* Jakarta: Pustaka Indonesia Press

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik.* Yogyakarta: CAPS.

Winter, S. C. (2003). *Implementation Perspective*:Status and Reconsideration. Dalam Handbook of Public Administration. London: Sage Publications Ltd

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES
Volume 3, Nomor 2, Januari 2022, pp. 107-114
ISSN: 2685-7766

Vaksin dan Sentimen Publik: Sebuah Analisis

Iradhad Taqwa Sihidi[1*], Achmad Apriyanto Romadhan[1], Dedik Fitrah[2], Mariano[1]
[1]Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, 65145, Jawa Timur, Indonesia
[2]Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, 65145, Jawa Timur, Indonesia

Info Artikel
Dikirim: 30 Des, 2021
Diterima: 28 Jan, 2022
Dipublikasi: 31 Jan, 2022

Kata Kunci:
Kebijakan Vaksin; Sentimen Publik; Twitter

Koresponden:
Iradhad Taqwa Sihidi

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, 65145, Jawa Timur, Indonesia

Email: iradhad@umm.ac.id

Sitasi Cantuman:
Sihidi, I. T., Romadhan, A. A., Fitrah, D., & Mariano, M. (2022). Vaccines and Public Sentiment: An Analysis. Journal of Political Issues, 3(2), 107-114. https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.72

DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.72

Lisensi:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)
OPEN ACCESS

ABSTRAK

Abstract *This study discusses public sentiment on the Covid-19 vaccination policy in Indonesia. The public sentiment that is formed is studied through the information presented on Twitter social media, where there is a clear division. The public response is divided into two, namely, supporting the implementation of the vaccination program and refusing vaccination. The descriptive qualitative method with the primary data source was obtained through Twitter. The source of the data obtained becomes an analytical tool to see the public perception formed, among others, based on the keywords reject the vaccine, emotions in text, sentiment valence, and the frequency of the dominant word. Another study source is based on previous research journals that discuss vaccination and Covid-19. The results showed that the public sentiment related to the implementation of vaccinations tended to be positive or supportive of carrying out the vaccination program. The conclusion is obtained through the dominance of the analyzed data with the central tendency to support the direction of government policy. This positive sentiment is in line with the wishes of the government and the public, who expect the normalization of life after the Covid-19 pandemic. This research shows social media as a means of democracy because there is public participation in policy implementation. The limitations of this research are due to the concise duration of data collection, namely 12 November -12 December 2020 due to the limitations of the Twitter API policy data limit, so that to be more comprehensive in recording public sentiment, it is necessary to extend the data mining time and also use Social Network Analysis (SNA) so that the map can be mapped the actors are more visible.*

Abstrak Kajian ini membahas perihal sentimen publik atas kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Sentimen publik yang terbentuk dikaji melalui informasi yang tersaji di media sosial Twitter dimana terlihat pembelahan yang jelas. Respon publik terbagi menjadi dua yaitu mendukung pelaksanaan program vaksinasi dan menolak vaksinasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data utama yang diperoleh melalui Twitter. Sumber data yang diperoleh menjadi alat analisis untuk melihat persepsi publik yang terbentuk antara lain berbasis pada kata kunci tolak vaksin, emotions in text, sentiment valence, dan frequency kata yang dominan. Sumber kajian lain didasarkan pada jurnal penelitian terdahulu yang membahas seputar vaksinasi dan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen publik yang terbentuk berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi cenderung positif atau mendukung untuk dijalankan program vaksinasi. Kesimpulan diperoleh melalui dominasi data yang dianalisis dengan kecenderungan utama mendukung arah kebijakan pemerintah. Sentimen positif tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah dan publik yang mengharapkan normalisasi kehidupan pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini berkontribusi menunjukan media sosial sebagai sarana demokrasi karena terjadi partisipasi publik dalam implementasi kebijakan. Adapun keterbatasan penelitian ini karena durasi pengambilan data yang sangat singkat yakni 12 November -12 Desember 2020 karena keterbatasan limit data kebijakan API twitter, sehingga agar lebih komprehensif dalam merekam sentimen publik perlu memperpanjang waktu penambangan data dan juga menggunakan Social Network Analysis (SNA) agar peta aktornya lebih terlihat.

Tentang:

Iradhad Taqwa Sihidi, menyelesaikan studi S-2 di Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Saat ini merupakan dosen di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.

Achmad Apriyanto Romadhan menyelesaikan studi S-2 di Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2017. Saat ini merupakan dosen di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.

Hak Cipta© 2022. Dimiliki oleh Penulis,
Dipublikasi oleh Journal of Political Issues.
Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

Dedik Fitrah menyelesaikan studi S-2 di Magister Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 2016. Saat ini merupakan dosen di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

Mariano merupakan mahasiswa strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Covid-19 di Indonesia sejak diumumkannya pertama kali pada 2 Maret 2020 telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang. Wabah ini menimbulkan sederetan gejolak serius dalam bidang perekonomian dan kesehatan masyarakat (Olivia et al., 2020). Di bidang kesehatan, peningkatan kasus positif dalam jumlah yang besar terbagi dalam dua gelombang utama antara lain gelombang pertama yang dimulai sejak November 2020-Januari 2021 dan gelombang kedua sejak Mei 2021 (Charlotte Setijadi, 2021). Tercatat bahwa kasus permingguan mengalami peningkatan empat kali lipat (27 Oktober-2 November 2020 sebanyak 24.932 kasus dengan puncak pada bulan Januari dengan 89.052 kasus) untuk gelombang pertama dan tujuh kali lipat (11-17 Mei 2021 sebanyak 35.470 kasus dan 6-12 juli 2021 sebanyak 253.600 kasus) untuk gelombang kedua. Sedangkan dalam bidang perekonomian, untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang begitu masif di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, maka pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan kriteria dan level tertentu. Akibat berbagai pembatasan kegiatan masyarakat tersebut menyebabkan perlambatan dari sisi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan (Asep Suryahadi, 2021).

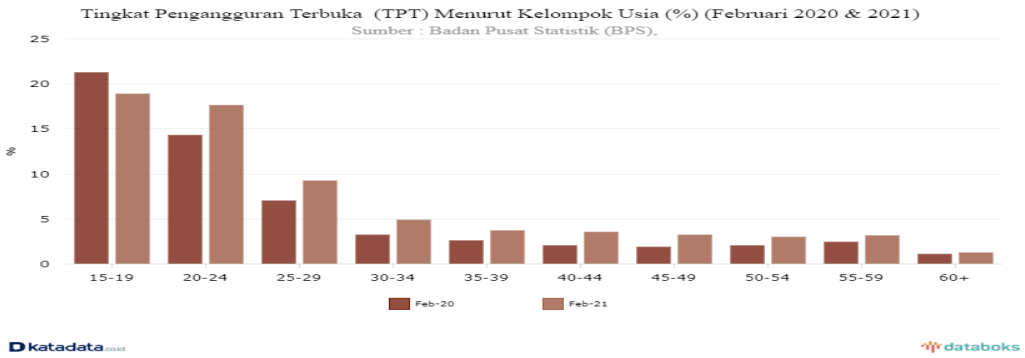

Gambar 1 Angka Pengangguran Terbuka di Indonesia (Katadata, 2021)

Peningkatan jumlah pengangguran, kasus Covid-19 yang tinggi dan berbagai permasalahan yang terjadi selama masa pandemi, maka pemerintah menginisiasikan untuk melaksanakan vaksinasi secara menyeluruh (Arifin & Anas, 2021). Vaksinasi ini dianggap perlu sebagai upaya normalisasi kehidupan yang terganggu selama masa pandemi. Pemerintah melaksanaan program vaksinasi selama dua periode yaitu periode pertama berlangsung dari Januari sampai April 2021 dengan fokus vaksinasi untuk 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik di 34 provinsi dan periode kedua dimulai sejak April 2021 hingga Maret 2022 untuk masyarakat Indonesia sejumlah 181,5 juta orang (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021). Selama periode tingginya kasus Covid-19 di dunia, penggunaan vaksin yang masih terbatas ketersediaannya menjadi rebutan dari berbagai negara untuk mengurangi peningkatan kasus Covid-19 di negaranya masing-masing (Mithani et al., 2021). Demikian pula Indonesia dengan peningkatan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi memaksa pemerintah untuk mengupayakan ketersediaan vaksin yang cukup untuk keperluan dalam negri (Auliya, 2021).

Jenis vaksin Covid-19 yang beredar di Indonesia sampai antara lain *Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V, Convidecia, Janssen*. Pelaksanaan program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah tidak sedikit menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pro dan kontra tersebut timbul akibat banyaknya berita yang beredar di publik tentang konspirasi atas tujuan dari diberikannya vaksin kepada seluruh rakyat ((Rahman & Islam, 2021). Beberapa argument kontra vaksin Covid-19 adalah bahwa vaksin ini dapat memberikan efek samping dan juga kehalalannya. Selain itu juga dari peran *public figure* seperti anggota DPR, oknum dokter, youtuber, dan beberapa oknum lainnya semakin menambah kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Sehingga data penolakan vaksin oleh masyarakat seperti di beberapa wilayah yang bersedia menerima vaksin Covid-19 di Aceh hanya 46% sedangkan di Sumatera Barat sebesar 47% dan beberapa argument lain yang dibangun sebagai upaya untuk menolak vaksin Covid-19.

Sedangkan yang pro akan vaksin Covid-19 ingin agar seluruh bidang kehidupan dapat berjalan dengan baik sesegera mungkin sehingga dengan tingginya tingkat vaksinasi maka peluang untuk pembatasan kegiatan masyarakat dapat diperkecil. Berbagai perdebatan yang ada lebih massif terjadi di media social twitter dengan memasukan kata kunci tolak vaksin untuk melihat dan menganalisis sentiment publik yang dibangun oleh kedua belah pihak. Media sosial berperan dalam debat publik (Ceron, & Memoli, 2016). Hal ini dianggap sebagai perwujudan ruang demokrasi yang sesungguhnya, karena setiap orang memiliki kesempatan dan kesempatan yang sama (Best & Meng, 2015). Topik yang dibahas di media sosial dapat membuka ruang bagi komitmen politik dan dilakukan dengan cara komunikasi dan egalitarianism (Justwan, et.al, 2018). Selain itu, peran media sosial dalam merespon kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah bisa menjadi sarana untuk mengkritisi hal tersebut (Chrona & Bee, 2017) seperti pro-kontra program pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dampak penggunaan media sosial *Twitter* dalam membahas masalah publik dapat memperkuat komitmen politik di ruang public (Mutsvairo & Wasserman, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang vaksin Covid-19 dan tanggapan masyarakat atas program vaksinasi antara lain Rahman & Islam (2021) yang meneliti tentang "*Early approval of COVID-19 vaccines: Pros and Cons*" menemukan bahwa oreintasi pembuatan vaksin adalah untuk menangkal adanya virus Covid-19 agar kehidupan masyarakat dapat berjaln kembali secara normal sehingga keberadaan vaksin harus diterima oleh smua kalangan untuk mempercepat normalisasi kehidupan. Saddik et al (2021) meneliti tentang "*Determinants of healthcare workers perceptions, acceptance and choice of COVID-19 vaccines: a cross-sectional study from the United Arab Emirates*" menjelaskan bahwa vaksin yang paling utama harus diberikan kepada tenaga kesehatan. Ini karena peluang tenaga kesehatan terkena Covid-19 menjadi sangat tinggi. Alleaume et al (2021) meneliti tentang *"Intention to get vaccinated against COVID-19 among the general population in France: Associated factors and gender disparities"* menggunakan survei Coconel nasional yang dilakukan selama *lockdown* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan penolakan vaksin, di seluruh populasi, dan secara terpisah antara pria dan wanita menemukan bahwa penolakan terhadap vaksin disebabkan oleh keyakinan bahwa vaksin tidak aman.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya maka penelitian ini akan mencoba mengalisi pro dan kontra terhadap program pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan melihat *sentiment public* yang terekam di *twitter* melalui wacana tolak vaksin dan juga pro terhadap vaksin yang kemudian membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sekiranya penelitian ini dapat dengan jelas memetakan argumentasi yang dibangun baik melalui tagar agar dengan jelas memetakan hal-hal yang berkaitan dengan wacana pro dan kontra vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber olahan data utama yang diperoleh melalui media sosial twitter. Tujuan utama adalah untuk menganalisis sentimen publik terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19. Data diambil dalam kurun waktu 12 November-12 Desember 2021. Penggunaan media sosial sebagai sumber data analisis adalah pola baru dengan memetakan sentimen publik yang terbentuk melalui perdebatan-perdebatan di media sosial terhadap kebijakan tertentu. (Freelon, D., McIlwain, C., & Clark, 2018). Fokus kajian ini melihat persepsi yang terbangun di publik berkaitan dengan peta pro - kontra terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia berbasis media sosial twitter. Sentimen-sentimen yang terbentuk dipetakan secara detail melalui data) untuk menganalisis kecenderungan publik dalam menanggapi suatu kebijakan dan argumentasi apa yang dikembangkan untuk memaksimalkan sentiment yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, kesehatan dan social masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dengan tingkat penyebaran dan angka kematian akibat Covid-19 yang sangat tinggi (Abdullah, 2020). Perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia yang signifikan mendorong pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain pembatasan kegiatan masyarakat (PKM), pelaksanaan program vaksinasi menyeluruh dan berbagai kebijakan lainnya (Olivia et al., 2020). Salah satu kebijakan penting dalam mengatasi ancaman Covid-19 yang sedemikian masifnya adalah melalui program vaksinasi. Program ini menjadi salah satu program penting yang digagas oleh pemerintah untuk mengatasi peningkatan perkembangan Covid-19 di Indonesia (Pramono, 2021). Namun kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat sehingga berbagai sentimen, tanggapan dan argumentasi terpolarisasi melalui berbagai wadah salah satunya adalah media sosial.

Sentimen dan argumentasi yang terbangun melalui media social yang paling dominan dalam menanggapi program vaksinasi adalah Twitter. Pemanfaatan media sosial Twitter sebagai sarana mengakses topik tertentu memungkinkan pengguna untuk mengetahui sebanyak mungkin topik atau isu mana yang selalu *trending* dan viral (Kaya, 2017) Kesempatan ini digunakan sebagai model baru dalam menciptakan narasi publik tentang isu-isu tertentu untuk mempengaruhi pandangan publik ketika mengevaluasi sesuatu (Murthy, 2018). Bahkan, upaya ini dan berbagai aktivitasnya diprakarsai sebagai wadah untuk menyebarluaskan isu-isu yang dipicu oleh maraknya penggunaan media sosial sebagai situs jejaring publik di mana kesadaran akan isu-isu sosial bersifat dikotomis ((Isa & Himelboim, 2018). Penyebaran isu atau tren di media sosial twitter misalnya sentimen publik dalam menanggapi program vaksinasi terpolarisasi menjadi dua bagian utama yaitu pihak yang mendukung adanya kebijakan pelaksanaan vaksinasi dan juga beberapa pihak yang cenderung menolak pelaksanaan program vaksinasi.

Kajian ini menganalisis sentimen publik yang terbentuk dari media social twitter dengan pola menggunakan kata kunci tolak vaksin. Pemetaan polarisasi yang ada menggunakan kata kunci menjadi teknik yang sangat penting saat menggunakan media sosial, khususnya Twitter (Liao, et.al., 2021). Pendapat ini sesuai dengan pernyataan Fuchs (2017) bahwa penggunaan kata kunci mutlak diperlukan ketika menggunakan tren dan isu publik yang sedang populer saat ini untuk menjangkau debat publik yang dibangun di media sosial. Efeknya Anda dapat memetakan dengan benar dan lebih optimal semua aktivitas di media sosial untuk mendukung kualitas pencarian Anda untuk survei tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut maka kata kunci tolak vaksin apabila ditelusuri mendapatkan banyak informasi yang berkaitan dengan hal tersebut melalui aktivitas di media social twitter. Perlu dicatat bahwa keberadaan aktivitas publik dikondisikan oleh aktivitas trendi serta informasi

pelengkap yang diperkuat oleh berita di media online dalam bentuk berita yang semakin transparan.

```
search term: tolak  vaksin
include retweets: yes
retry on rate limit: yes
results type: mixed
number of tweets: 700
language: id
```

```
edges             | 212
--------------------------
Done.
Adding text to network...Done.
Creating igraph network graph...Done.
Collecting tweets for search query...
Search term: tolak  vaksin
Requested 700 tweets of 18000 in this search rate limit.
Less tweets requested than remaining limit retryOnRateLimit set to FALSE.
Rate limit reset: 2021-12-08 16:31:03
tweet   | status_id           | created              | screen_name
-----------------------------------------------------------------------
Min ID | 1465412711714418691 | 2021-11-29 20:09:51 | @KomjenMemed
Max ID | 1468503779016249344 | 2021-12-08 08:52:39 | @BagindaAgungKu3
Collected 289 tweets.
Done.
```

Gambar 2 Hasil Pencarian Dengan Kata Kunci Tolak Vaksin

Dari 289 *tweets* yang terkumpul berdasarkan pencarian dengan kata kunci tolak vaksin *quote tweets* sejumlah 7 (gambar 3). *Quotes tweets* sendiri memungkinkan pemilik *tweets* dengan mudah melihat setiap kali *tweet* tertentu yang telah diretweet bersama dengan komentar. Fitur tersebut disediakan oleh Twitter untuk memastikan pemilik *tweets* melihat perkembangan argumen yang terbangun dari *tweets* yang diposting. Kebijakan pemisahan antara *retweet* dan komentar adalah kebijakan baru dari pihak Twitter untuk memberikan kemudahan kepada pemilik *tweets* dalam melihat sentimen yang ada. Berkaitan dengan kata kunci tolak vaksin maka pemilik *tweet* yang sangat dominan akan memiliki peran penting untuk bisa melihat sejauh mana argumentasi yang dibangun oleh berbagai pihak yang meneruskan postingan yang ada. Jika sebelumnya antara *retweet* dan komentar menjadi satu bagian maka terdapat pemisahan untuk memudahkan pemetaan argumentasi yang dibangun.

```
search term: tolak  vaksin
include retweets: yes
retry on rate limit: yes
results type: mixed
number of tweets: 700
language: id
```

```
Collected 289 tweets.
Done.
Generating twitter activity network...
--------------------------
collected tweets | 289
quote tweets     | 7
reply tweets     | 36
retweets         | 169
tweets           | 77
nodes from data  | 43
nodes            | 332
edges            | 212
--------------------------
Done.
Adding text to network...Done.
Creating igraph network graph...Done.
```

Gambar 3 Total Tweet beserta jaringanya

Terdapat juga beberapa balasan yang berkaitan dengan *tweets* tolak vaksin sejumlah 36 *tweets.* Balasan-balasan yang ada di media sosial *twitter* sebagai wadahnya dapat

membuka ruang dialog publik sehingga memunculkan perdebatan-perdebatan lain dan membentuk kubu pro & kontra sebagai bentuk dominasi publik atas tanggapan informasi program vaksinasi tersebut. Beragam argumentasi & narasi yg dibangun sekaligus sebagai proses pembentukan jati diri politik yang mendorong publik menciptakan polarisasi-polarisasi eksklusif dalam menanggapi kebijakan yang ada (Oxford Analytica, 2021). Dari jumlah *tweets* sebanyak 77 *tweets* di*retweets* sebanyak 169 kali. Dari aktvitas di *twitter* berkaitan dengan kata kunci tolak vaksin tersebut maka terdapat 43 *tweets* atau *nodes from data* yang saling berhubungan satu sama lain. Algoritma *twitter* memungkinkan untuk memetakan isu-isu yang banyak dibahas dengan beberapa klasifikasi tertentu sehingga memudahkan dalam menganalisis sentimen publik yang terbangun terhadap satu isu yang sedang terjadi.

Salah satu manfaat meningkatkan penggunaan media sosial adalah antusiame publik dalam memperoleh informasi. Data menunjukkan bahwa terdapat pengguna *twitter* yang sangat signifikan di Indonesia. Ketertarikan pengguna Indonesia terhadap *twitter* karena kecepatan informasi yang dapat diperoleh melalui *twitter* dibadingkan media sosial lainnya. Sehingga jika terdapat kasus atau isu tertentu seperti pro-kontra adanya pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 maka semakin kelihatan perdebatan yang dibahas di media sosial *twitter*. Informasi yang dihasilkan oleh *platform Twitter* sangat berguna ketika digunakan untuk melakukan analisis atas suatu isu. Dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada kuartal II 2019, pengguna internet Indonesia mencapai 196,7 juta. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan pada tahun 2018. Data yang tercatat pada laporan *finansial Twitter* kuartal ke III tahun 2019 menunjukkan bahwa pengguna aktif harian di *platform Twitter* meningkat 17% ke angka 145 juta pengguna (Sihombing & Nataliani, 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut maka yang berkaitan dengan pencarian menggunakan kata kunci tolak vaksin memunculkan *nodes* sejumlah 332 dan *edges* sejumlah 212. Secara konseptual *nodes* dan *edges* memiliki perbedaan yang sangat signifikan. *Nodes* adalah aktor/individu dalam jaringan dan *edges* adalah hubungan antar aktor. *Nodes* memungkinkan untuk membentuk argumen-argumen tertentu sehingga dapat menggiring argumentasi publik. Sedangkan *edges* lebih berkaitan tanggapan antar sesama aktor yang dapat mempengaruhi argumen public yang diperbincangkan tersebut. Peran aktor dalam menggiring argumentasi publik sangat dominan di media sosial *twitter* apalagi dengan adanya tagar yang dapat dengan signifikan membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, peran aktor yang berkecimpung di media sosial *twitter* sangat dibutuhkan dalam perkembangan suatu isu (Ray et al., 2017). Aktor perlu memberi dampak yang besar, terutama saat penggiringan isu di media sosial, jadi aktor mengambil andil penting dengan target utama untuk menyebarkan berita dan informasi, tapi setidaknya mereka yang mengetahuinya (Zhang & Liang, 2018).

Perbincangan publik melalui media sosial Twitter yang dikaji dengan analisis sentimen publik memperlihatkan beberapa ruang lingkup hasil yang bersumber dari kemasifan perdebatan tentang isu pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia (Gambar 4). Data analisis yang diperoleh salah satunya adalah bentuk emosi yang tercipta melalui tanggapan-tanggapan yang disampaikan, ditanggapi atau diperdebatkan. Kecenderungan perdebatan tersebut menimbulkan polarisasi tanggapan dengan jumlah persentasi yang berbeda-beda. Pelaksanaan program vaksinasi sebagai objek perdebatan utama dan juga dari data yang diperoleh dengan menggunakan kata kunci pencarian tolak vaksin memiliki persentasi tertinggi adalah *trust* atau kepercayaan sebesar 27,59%. Jumlah *trust* menunjukkan bahwa mayoritas perdebatan yang terjadi di twitter berkaitan dengan isu pelaksanaan program vaksinasi didominasi oleh pihak yang menyatakan setuju untuk dilaksanakan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

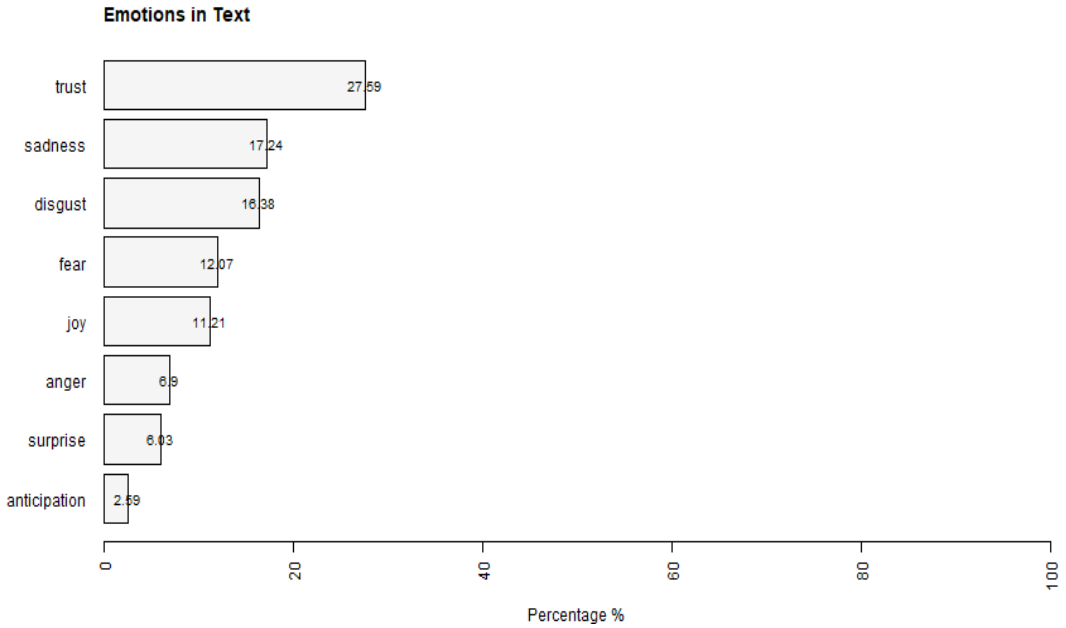

Gambar 4 Emosi terhadap kata kunci tolakvaksin

Trust memiliki persentasi yang dominan dibandingkan dengan cakupan emosi lainnya menunjukkan bahwasanya respon publik terhadap kebijakan vaksinasi sangat positif. Perdebatan argumentasi yang dibangun memiliki substansi yang lebih terukur dan terarah yaitu dengan mempertimbangkan perkembangan Covid-19 di Indonesia. Peningkatan Covid-19 apabila tidak diatasi dengan cepat maka akan makin memperburuk situasi di berbagai bidang kehidupan. Lumpuhnya berbagai sektor tersebut harus sesegera mungkin dapat diantisipasi salah satunya dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pelaksanaan program vaksinasi (Zimmerman, 2021). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mendatangkan vaksin dari berbagai negara menjadi suatu langkah konkret untuk segera membebaskan Indonesia dari Covid-19, sehingga masyarakat banyak yang mendorong untuk mewujudkan Indonesia bebas Covid-19 dan mendukung propraganda pemerintah tersebut (Gynada Winshine & Haryono, 2021).

Dominasi *trust* menunjukkan bahwa respon publik sangat baik dalam menanggapi kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi tersebut. Selain itu, *sadness*/kesedihan memiliki persentasi tertinggi kedua setelah *trust* sebesar 17,24%. Argumentasi yang dibangun dalam perdebatan di media sosial twitter menunjukkan bahwa pihak yang merasa sedih dengan kebijakan pelaksanaan program vaksinasi cukup bersaing dengan pihak yang menyetujui pelaksanaan program vaksinasi tersebut. Salah satu keresahan yang diperdebatkan adalah konspirasi seputar vaksin yang diberikan. Keyakinan untuk menerima vaksin termanipulatif dengan isu-isu yang keliru misalnya cairan vaksin mengandung unsur babi, oknum dokter yang meragukan peruntukkan vaksin sebagai upaya mematikan bukan menyembuhkan, efek vaksin yang dapat menyebabkan kelumpuhan, konspirasi elit global dan berbagai argumentasi lainnya (Sarinho et al., 2021).

Perbedaan tanggapan dalam perdebatan di twitter juga menunjukkan argumentasi beberapa pihak yang menilai bahwa program vaksinasi adalah program yang memuakkan dengan jumlah persentasi *disgust* sebesar 16,38%. Kemuakan tersebut karena merasa bahwa upaya pemerintah dalam mensosialisasikan perihal vaksinasi cendrung kearah memaksakan kehendak. Bagi beberapa oknum menilai bahwa keputusan untuk divaksin atau tidak adalah hak setiap orang untuk menentukan sehingga tidak dapat dipaksa. Selain itu, adanya pemberitaan seputar vaksin Covid-19 yang kurang valid dan beredar luar dipublik dan juga informasi yang diperoleh melalui pemerintah yang berbeda-beda menambah keraguan untuk melakukan vaksinasi. Padahal seharusnya informasi seputar vaksin perlu untuk

disosialisasikan secara terstruktur sehingga masyarakat tidak merasa ragu untuk menyertakan dirinya dalam mengikuti program vaksinasi Covid-19 (Mandal & Mandal, 2021).

Selain itu, emosi yang ditunjukkan dalam perdebatan melalui media sosial twitter adalah rasa *fear*/ketakutan dengan jumlah persentasi sebesar 12,07%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan argumen yang diperdebatkan menimbulkan ketakutan tersendiri karena berita-berita yang beredar cenderung menilai negatif perihal penggunaan vaksin tersebut. Selain itu, ketakutan yang lebih dominan adalah berkaitan dengan efek samping ditambah dengan pemberitaan yang mengatakan bahwa efek samping antara lain mengalami kelumpuhan dan buta. Isu hoax tentang pelaksanaan program vaksinasi tentu saja tidak hanya dirasakan di Indonesia bahkan di seluruh dunia mendapatkan permasalahan yang sama karena informasi yang tidak valid dijadikan sebagai landasannya (Suwantika et al., 2020). Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi perlu untuk dimasifkan kepada masyarakat karena akses informasi yang tanpa batas saat ini memiliki pengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang isu vaksinasi Covid-19 (Faturohman et al., 2021).

Tanggapan atas argumen yang diperbicangkan melalui media sosial twitter juga memberikan perasaan *joy*/sukacita dengan jumlah persentasi sebesar 11,21%. Beberapa pihak menganggap bahwa dengan adanya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 maka Indonesia dapat keluar dari pandemi yang telah mengakibatkan kelumpuhan di berbagai sektor antara lain kesehatan dan ekonomi. Akibat yang dirasakan oleh masyarakat beragam ditambah dengan jatuhnya korban jiwa diberbagai daerah menambahkan keresahan masyarakat apabila Covid-19 tidak segera diatasi oleh pemerintah sehingga perasaan bahagia dengan adanya kebijakan pelaksanaan vaksinasi menjadi jalan tempuh yang tepat untuk meminimalisir dominasi Covid-19 di Indonesia (MS Shnawa, 2020). Dari data yang ditampilkan menunjukkan bahwasanya dominasi dari pendukung pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 lebih dominan dibandingkan dengan argumentasi menolak adanya vaksinasi.

Beberapa emosi lain dengan persentasi kecil antara lain *anger*/marah sebesar 6,9%, *surprise*/terkejut sebesar 6,03% dan *anticipation*/antisipasi sebesar 2,59%. Akumulasi dari berbagai persentasi data tersebut menunjukkan bahwasanya perdebatan perihal pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia mempolarisasi masyarakat berdasarkan argumen yang terbangun di twitter dengan berbagai tanggapan beragam lainnya. Artinya bahwa keterlibatan masyarakat berkaitan dengan isu-isu publik seperti isu vaksinasi ini mendapat perhatian lebih sehingga sentimen publik yang terbentuk dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan untuk mengatur kemungkinan-kemungkinan. Misalnya jika persentasi dengan emosi *sadness* maka yang perlu ditingkatkan adalah kepercayaan publik bahwa vaksin tidak akan berdampak apapun terhadap tubuh dikemudian hari. Sehingga kepercayaan masyarakat menjadi meningkat dan memberi diri untuk divaksin.

Perdebatan di media sosial Twitter selain memberikan pemetaan dalam hal emosi yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil selanjutnya juga menampilkan tiga sentimen yang terbentuk dalam menanggapi kebijakan pelaksanaan program vaksinasi oleh pemerintah (Gambar 5). Ketiga sentimen tersebut terbentuk melalui perbincangan yang sedemikian massif di Twitter. Ketiga sentimen tersebut meliputi sentimen positif yang tertuju pada dukungan atau dominasi perbicangan yang cenderung mendukung pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, sentimen negatif merujuk pada perbicangan yang menolak adanya pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dan valence lebih kepada kenetralan dalam menanggapi perbicangan perihal pelaksanaan program Covid-19 di Twitter. Ketiga sentimen ini terdapat beberapa hal yang menjadi landasan dalam menentukan posisi baik sebagai yang mendukung, menolak dan yang tidak memilih sikap apapun atau netral.

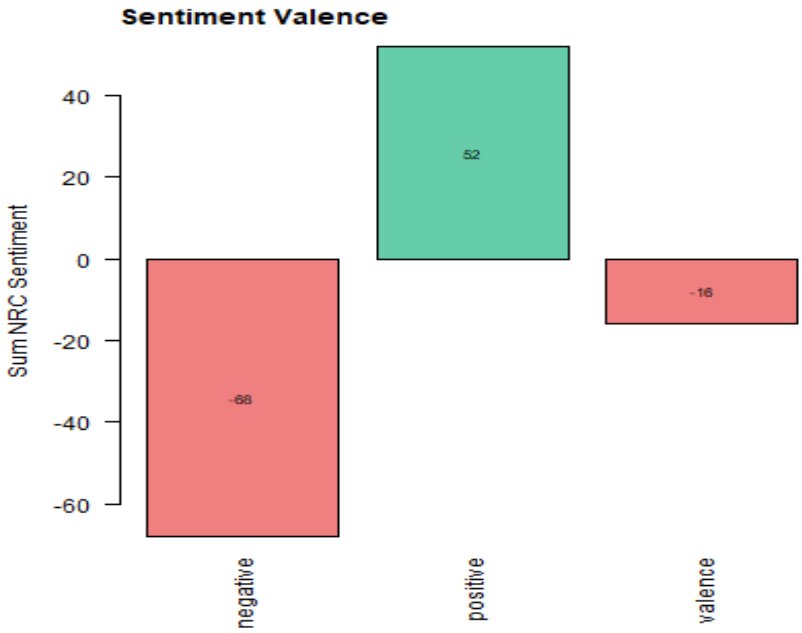

Gambar 5 Peta Sentimen Valence

Munculya tipe sentimen tersebut disebabkan oleh adanya perbicangan dan tanggapan atas perbicangan yang ada sehingga algoritma membaca perdebatan yang ada secara klasifikasi berdasarkan sentimen emosi. Sentimen positif yang berwarna hijau berada di angka 52 dan merupakan sentimen yang paling dominan diantara kedua sentimen yang lain. Sentimen positif merepresentasikan bahwa kecenderungan yang mendukung adanya kebijakan pelaksanaan program vaksinasi sangat baik. Sentimen ini didasarkan pada wacana mendukung pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah karena mempertimbangkan keadaan pandemi Covid-19 yang merajalela di Indonesia. Apabila tidak dilakukan antisipasi makanya ancaman dari sisi ekonomi karena pembatasan kegiatan masyarakat dan dalam bidang kesehatan dengan keadaan kapasitas dan fasilitas rumah sakit yang kurang memadai memungkinkan kejatuhan korban jiwa semakin banyak. Selain itu dari berbagai alasan lainnya yang menunjukkan keharusan bahwa pelaksanaan program vaksinasi menjadi kebutuhan mutlak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sesegera mungkin (Hayman et al., 2021).

Selain itu, sentimen negatif juga terbentuk melalui perdebatan yang ada dan berkisar di angka minus (-)68. Penempatan angka tersebut diperoleh melalui perbincangan yang terpola dengan baik berkaitan dengan penolakan atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi. Argumen yang diperdebatkan pun melingkupi kekwatiran atas efek samping dan juga pengaruh pemberitaan media sosial yang memberitakan secara tidak valid serta konspirasi seputar bahan pembuatan vaksin perihal halal dan tidaknya. Perdebatan serupa diperoleh melalui verifikasi pemberitaan online yang tidak tekonfirmasi secara baik dan dianggap sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat secara umum. Selain itu, kejadian yang diberitakan akibat efek vaksin pun dijadikan sebagai argument pembenaran atas penolakan vaksin Covid-19. Bahkan dari oknum dokter dan petugas kesehatan yang meragukan perlu atau tidaknya vaksinasi Covid-19 menambah keraguan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi (Susheela et al., 2022).

Sedangkan sentimen berikutnya yaitu valence berada di angka minus (-)16. Sentimen ini merupakan bentuk netral dari individu yang tidak memihak pada pihak yang mendukung pelaksanaan program vaksin dan pihak yang mendukung pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Kecenderungan untuk memilih tidak memihak disebabkan oleh masih adanya keraguan antara argumen pihak yang mendukung dan menolak dengan membiarkan

perdebatan kemudian menunggu konfirmasi valid dari berbagai pihak salah satunya dari pemerintah sebagai sumber informasi utama. Posisi sentimen valence ini menjadi hal yang wajar dalam suatu perdebatan apalagi di media sosial Twitter karena lebih menganggap bahwa perdebatan yang ada merupakan bagian dari tanggapan atas isu tertentu. Sehingga sentimen valence mengambil peran sebagai penikmat perdebatan dan memutuskan untuk tidak berpihak pada sisi manapun.

Wacana penguatan imunitas tubuh masyarakat di tengah pandemi yang merajalela diseluruh dunia mendorong pelaksanaan program vaksinasi menjadi kebutuhan mutlak setiap negara sehingga tidak mengherankan jika ketersediaan vaksin menjadi rebutan tiap negara. (Jethwa et al., 2021). Ketersediaan vaksin yang terbatas dengan tingkat kebutuhan di tiap negara yang sangat tinggi menjadi kendala sehingga tidak cukup satu jenis vaksin saja yang beredar bahkan di Indonesia (Georgiadis & Georgiadis, 2021). Perdebatan yang terangkum dari data-data tersebut menunjukkan bahwa dominasi dari masyarakat pendukung program vaksinasi lebih dominan. Artinya bahwa keinginan masyarakat untuk keluar dari cengkraman Covid-19 sangat tinggi walaupun tidak sedikit oknum yang menolak vaksinasi dengan argumentasinya tersendiri. Dominasi yang sangat kuat dari pihak yang mendukung pelaksanaan program vaksin menunjukkan bahwa masyarakat sudah sangat gandrung akan keadaan normal tanpa ada pembatasan kegiatan masyarakat.

Pencarian dengan kata kunci tolak vaksin sesuai dengan analisis yang terbentuk memunculkan kata-kata dominan (Gambar 6). Kata vaksin menjadi dominan karena pencarian utama menggunakan kata kunci tolak vaksin akan memetakan apa saja yang berhubung dengan perbicangan perihal vaksin. Penggunaan kata kunci tertentu akan mengarahkan pada objek tertuju sehingga informasi yang diperoleh sesuai (Bokaee Nezhad & Deihimi, 2022). Dengan demikian, kata vaksin yang paling disebut dalam menganalisis sentimen publik terhadap kebijakan pelaksanaan program ini karena perdebatan-perdebatan dan emosi yang terbentuk menunjukkan bahwa sentimen masyarakat terhadap kebijakan ini sangat positif. Artinya bahwa respon publik menganggap perlu untuk dilaksanakannya program vaksin agar kegelisahan publik terhadap Covid-19 dapat diatasi dan diantisipasi dengan segera.

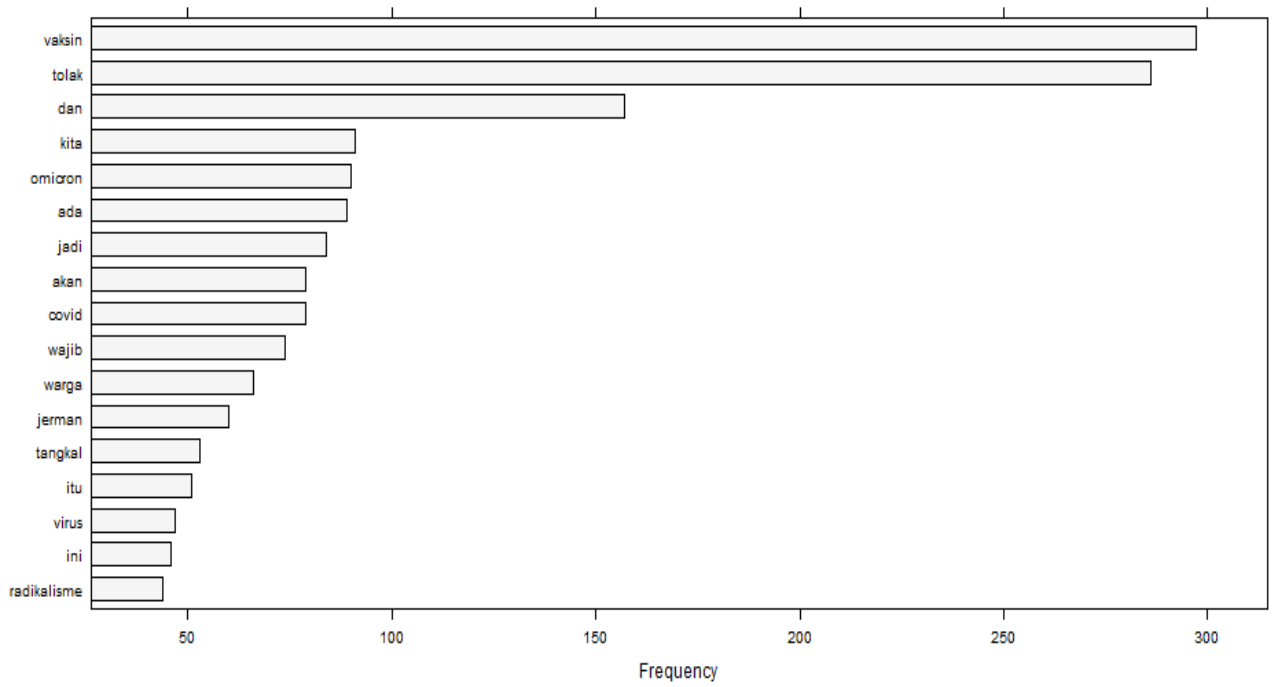

Gambar 6 Kata Kunci dominan

Sedangkan kata yang dominan muncul dalam narasi-narasi yang dibangun berkaitan dengan kata kunci tolak vaksin adalah kata tolak. Sentimen yang terbentuk dari kata ini mewakili pencarian tersebut dan merepresentasikan argumentasi oleh pihak yang menolak. Dominasi kata tolak memiliki efek yang kuat dalam pembentukan respon publik karena menganggap bahwa vaksinasi adalah upaya pemerintah untuk memaksakan kehendak masyarakat. Selain itu, argumen berbeda berkaitan dengan penolakan vaksin Covid-19 adalah berita hoax perihak efek samping dan juga komposisi vaksin yang diberikan non-halal (Bruder & Kunert, 2022). Vaksin dianggap sebagai konspirasi global yang kemudian dapat menjadi cara untuk mengendalikan manusia (Mahmud et al., 2021). Pernyataan demikian yang dianggap sebagai fakta oleh masyarakat sehingga tidak mengherankan jika permasalahan berkaitan dengan perkembangan berita hoax meningkat seiring dengan isu-isu yang diinformasikan kepada publik (Nurdiana et al., 2021).

Kata berikut yang menjadi narasi dalam analisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan pelaksanaan program Covid-19 adalah omicron. Omicron merupakan varian baru dari Covid-19 yang menjadi ancaman baru saat ini. Perdebatan seputar varian Covid-19 yang beragam dengan perbedaan dari sisi penyebaran, gejala dan tindakan antisipasi juga menjadi analisis perbincangan di media sosial Twitter. Perdebatan tersebut menimbulkan pertanyaan seputar perlu atau tidaknya vaksin booster sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran varian omicron ini. Namun, pihak yang menolak program vaksin menilai bahwa adanya vaksinasi sebelumnya dianggap tidak efektif karena memerlukan booster atau vaksin ketiga. Kekwatiran tersebut makin menambah ketidakyakinan akan implikasi dari vaksin tersebut bagi imunitas tubuh. Selain itu kecurigaan terhadap kinerja vaksin, waktu kekebalan dan juga kegunaan untuk tubuh menjadi faktor yang mempengaruhi golongan tolak vaksin untuk tetap senantiasa mempertahankan argumennya.

Namun, secara keseluruhan yang mendukung tetap dilakukannya vaksin dosis ketiga yaitu booster berargumen bahwa daya penerimaan tubuh tiap orang atas vaksin berbeda-beda sehingga perlu untuk dilakukan vaksin ketiga. Tujuannya agar tangkat kekebalan tubuh menjadi lebih paripurna sehingga lebih ampuh untuk menangkal Covid-19. Beberapa kata lain juga memiliki dominan masing-masing, tetapi diantara kata-kata tersebut yang menjadi dominan adalah kata vaksin dan kata tolak sesuai dengan kata kuncinya. Artinya bahwa dari keseluruhan perdebatan-perdebatan yang ada masing cenderung memposisikan program vaksin ini sebagai upaya terbaik untuk bisa menangkal penyebaran Covid-19 secara cepat. Pro dan kontra menjadi satu hal yang wajar karena setiap individu memiliki landasan argumentasinya masing-masing dan berhak atas rasa waspada. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh pemeritah adalah meningkatkan kepercayaan public terhadap produk kebijakan yang dibuat agar berdampak dan ditanggapi secara baik oleh masyarakat.

Secara visual, dominasi kata-kata yang menjadi narasi umum dalam analisis sentimen masyarakat terhadap program kebijakan pelaksanaan vaksinasi adalah kata vaksin dan tolak (Gambar 7). Kedua kata tersebut mewakili sentimen yang terbentuk dalam perdebatan yang muncul di media sosial Twitter. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa perdebatan perihal topik apapun dapat berpengaruh terhadap kecenderungan sentimen yang terbentuk. Bahkan dari sentimen emosi yang terpolarisasi secara konsisten menunjukkan bahwa dalam perdebatan di media sosial, narasi yang terbentuk paling banyak membahas perihal kata kunci tolak vaksin. Ditambah dengan argumen pendukung dari pihak *nodes* dan *edges* makin mempengaruhi gejolak persepsi yang terbentuk. Vaksin menjadi kata yang paling dominan karena objek yang dibahas adalah perihal vaksin sehingga kemungkinan untuk dibangun narasi secara berulang dengan kata kunci tersebut menjadi sangat dominan.

Gambar 7 World Cloud

Selain itu, dua dominasi kata vaksin dan kata tolak merepresentasikan argumen dari dua dominasi yang berbeda baik pendukung pelaksanaan program vaksin Covid-19 dan yang menolak. Perdebatan tersebut tetap membentuk persepsi publik atas topik yang dibicarakan dan juga membentuk respon publik terhadap isu yang sedang dibicarakan. Potensi untuk membentuk persepsi publik yang paling dominan memang dilakukan di media sosial Twitter karena didukung oleh fasilitas tagar dan berbagai kelebihan algoritma lainnya sehingga lebih mudah mengarahkan argumen yang dibagun terhadap isu apapun. Secara keseluruhan munculnya dominasi kedua kata kunci tersebut adalah bagian dari perdebatan yang terbentuk sebagai upaya untuk menanggapi isu publik berkaitan dengan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

4. SIMPULAN

Penyebaran isu atau tren di media sosial twitter misalnya sentimen publik dalam menanggapi program vaksinasi terpolarisasi menjadi dua bagian utama yaitu pihak yang mendukung adanya kebijakan pelaksanaan vaksinasi dan juga beberapa pihak yang cenderung menolak pelaksanaan program vaksinasi. Berdasarkan pencarian dengan kata kunci tolak vaksin maka dari data yang ada terlihat bahwa cakupan tweets yang terdiri dari 700 kali tweets dari jumlah 18000 sesuai dengan hasil pencarian pada 12 Agustus 2021. Data dan informasi yang diperoleh dari fenomena yang terjadi berupa interaksi antara pengguna di media sosial bisa sangat membantu dalam menentukan kecenderungan isu yang dibangun. Pelaksanaan program vaksinasi sebagai objek perdebatan utama dan juga dari data yang diperoleh dengan menggunakan kata kunci pencarian tolak vaksin memiliki persentasi tertinggi adalah trust atau kepercayaan sebesar 27,59%. Dari analisis sentimen publik yang terbentuk berdasarkan respon publik melalui perdebatan di media sosial Twitter menunjukkan bahwa dominasi sentimen yang terbentuk adalah mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Kecenderungan dukungan terbentuk dari beberapa hal antara lain sentimen emosi, dominasi *tweets*, *retweets*, *quote tweets* dan dominasi kata. Respon publik yang terbentuk menunjukkan bahwa sentimen masyarakat secara positif mendukung kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program vaksin dengan mempertimbangan keadaan Indonesia yang darurat Covid-19. Sentimen-sentimen yang terbentuk dipetakan secara detail melalui untuk menganalisis kecenderungan publik dalam menanggapi suatu kebijakan dan argumentasi apa yang dikembangkan untuk memaksimalkan sentimen yang ada.

Kontibusi penelitian terletak pada penegasanya soal kebermanfaatan media sosial sebagai sarana demokrasi karena memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk

merespon kebijakan yang dibuat pemerintah. Sedangkan keterbatasanya terletak pada durasi pengambilan data yang sangat terbatas/pendek yakni 12 November -12 Desember 2020 dan tidak adanya analisa soal jaringan aktor melalui metode Social Network Analysis (SNA) yang terbangun sehingga kurang komprehensif. Karena itu studi kedepanya dapat memperpanjang waktu pencarian data apalagi ditengah kebijakan pemberian vaksin booster dan dapat merekam peta relasi aktor melalui SNA.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I. (2020). COVID-19: Threat and Fear in Indonesia. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, *12*(5), 488–490. https://doi.org/10.1037/tra0000878

Alleaume, C., Verger, P., Dib, F., Ward, J. K., Launay, O., & Peretti-Watel, P. (2021). Intention to get vaccinated against COVID-19 among the general population in France: Associated factors and gender disparities. *Human Vaccines and Immunotherapeutics*, *17*(10), 3421–3432. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1893069

Arifin, B., & Anas, T. (2021). Lessons learned from COVID-19 vaccination in Indonesia: experiences, challenges, and opportunities. *Human Vaccines and Immunotherapeutics*, *17*(11), 3898–3906. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1975450

Asep Suryahadi, R. A. I. & A. Y. (2021). The Impact of Covid-19 and Social Protection Programs on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *57*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519

Auliya A. Suwantika, Febby V. Purwadi, Neily Zakiyah, Irma M. Puspitasari, Rizky Abdulah, Ajeng Diantini, C. B. & M. J. P. (2021). Multi-criteria decision analysis to prioritize the introduction of new vaccines in Indonesia by using the framework of the strategic multi-attribute ranking tool for vaccines (SMART vaccines). *Expert Review of Vaccines*, *20*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14760584.2021.1874926

Best, M. L., & Meng, A. (2015). Twitter Democracy: Policy versus identity politics in three emerging African democracies. *ACM International Conference Proceeding Series*, *15*. https://doi.org/10.1145/2737856.2738017

Bokaee Nezhad, Z., & Deihimi, M. A. (2022). Twitter sentiment analysis from Iran about COVID 19 vaccine. *Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews*, *16*(1), 102367. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.102367

Bruder, M., & Kunert, L. (2022). The conspiracy hoax? Testing key hypotheses about the correlates of generic beliefs in conspiracy theories during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Psychology*, *57*(1), 43–48. https://doi.org/10.1002/ijop.12769

Ceron, A., & Memoli, V. (2016). Flames and Debates: Do Social Media Affect Satisfaction with Democracy? *Social Indicators Research*. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11205-015-0893-x

Charlotte Setijadi. (2021). The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi's Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *57*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2004342

Chrona, S., & Bee, C. (2017). Right to public space and right to democracy: The role of

social media in Gezi Park. *Research and Policy on Turkey*, *2*(1), 49–61. https://doi.org/10.1080/23760818.2016.1272267

Faturohman, T., Kengsiswoyo, G. A. N., Harapan, H., Zailani, S., Rahadi, R. A., & Arief, N. N. (2021). Factors influencing COVID-19 vaccine acceptance in Indonesia: An adoption of Technology Acceptance Model. *F1000Research*, *10*, 1–23. https://doi.org/10.12688/f1000research.53506.2

Freelon, D., McIlwain, C., & Clark, M. (2018). Quantifying the power and consequences of social media protest. *New Media and Society*, *20*(3). https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/1461444816676646

Fuchs, C. (2017). From digital positivism and administrative big data analytics towards critical digital and social media research! *European Journal of Communication*, *32*(1), 37–49. https://doi.org/10.1177/0267323116682804

Georgiadis, G. P., & Georgiadis, M. C. (2021). Optimal planning of the COVID-19 vaccine supply chain. *Vaccine*, *39*(37), 5302–5312. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.07.068

Gynada Winshine, C., & Haryono, H. (2021). Public Communication Strategies on Socialization Covid-19 Vaccine in Indonesia Perspective Sociology of Mass Communication. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, *1*(6), 437–445. https://doi.org/10.36418/edv.v1i6.81

Hayman, B., Suri, R., & Prasad, S. D. (2021). COVID-19 vaccine capacity: Challenges and mitigation – The DCVMN perspective. *Vaccine*, *39*(35), 4932–4937. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.07.007

Isa, D., & Himelboim, I. (2018). A Social Networks Approach to Online Social Movement: Social Mediators and Mediated Content in #FreeAJStaff Twitter Network. *Social Media and Society*, *4*(1). https://doi.org/10.1177/2056305118760807

Jethwa, H., Wong, R., & Abraham, S. (2021). Covid-19 vaccine trials: Ethnic diversity and immunogenicity. *Vaccine*, *39*(27), 3541–3543. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.05.017

Justwan, F., Baumgaertner, B., Carlisle, J. E., Clark, A. K., & Clark, M. (2018). Social Media Echo Chambers and Satisfaction with Democracy Among Democrats and Republicans in the Aftermath of the 2016 US Elections. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17457289.2018.1434784

Kaya, A. (2017). Right to public space: social movements and active citizenship in Turkey. *Research and Policy on Turkey*, *2*(1), 1–9. https://doi.org/10.1080/23760818.2016.1272273

Liao, W., Bazarova, N.N., Yuan, Y.C. and McLeod, P. L. (2021). How Has Technology Changed Group Communication? A Keyword Analysis of Research on Groups and Technology. *He Emerald Handbook of Group and Team Communication Research, Emerald Publishing Limited, Bingley*. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/978-1-80043-500-120211024

Mahmud, S., Mohsin, M., Khan, I. A., Mian, A. U., & Zaman, M. A. (2021). Knowledge, beliefs, attitudes and perceived risk about COVID-19 vaccine and determinants of COVID-19 vaccine acceptance in Bangladesh. *PLoS ONE*, *16*(9 September), 1–19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257096

Mandal, P., & Mandal, A. (2021). COVID-19 Pandemic, Disparity and Vaccine: An Update. *Biotechnology and Bioprocessing*, *2*(1), 01–03. https://doi.org/10.31579/2766-2314/020

Mithani, S. S., Bota, A. B., Zhu, D. T., & Wilson, K. (2021). A scoping review of global vaccine certificate solutions for COVID-19. *Human Vaccines and Immunotherapeutics*, *00*(00), 1–12. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1969849

MS Shnawa, I. (2020). The COVID -19 vaccine race, vaccine immunity and vaccine herd immunity. *Clinical and Medical Investigations*, *5*(2), 1–4. https://doi.org/10.15761/cmi.1000205

Murthy, D. (2018). Introduction to Social Media, Activism, and Organizations. *Social Media and Society*, *4*(1). https://doi.org/10.1177/2056305117750716

Mutsvairo, B., & Wasserman, H. (2016). Digital activism in the social media era: Critical reflections on emerging trends in sub-Saharan Africa. In *Digital Activism in the Social Media Era: Critical Reflections on Emerging Trends in Sub-Saharan Africa* (Issue June). https://doi.org/10.1007/978-3-319-40949-8

Nurdiana, A., Marlina, R., & Adityasning, W. (2021). Berantas Hoax Seputar Vaksin Covid-19 Melalui Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Vaksin Covid-19. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 489–495. https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i1.1175

Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *56*(2), 143–174. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581

Oxford Analytica. (2021). Calls to audit social media algorithms will rise. *Expert Briefings*. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/OXAN-DB264210

Pramono, G. E. (2021). Policing in the Covid-19 Situation in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, *04*(02), 154–165. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i2-06

Rahman, M. A., & Islam, M. S. (2021). Early approval of COVID-19 vaccines: Pros and cons. *Human Vaccines and Immunotherapeutics*, *17*(10), 3288–3296. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1944742

Ray, R., Brown, M., Fraistat, N., & Summers, E. (2017). Ferguson and the death of Michael Brown on Twitter: #BlackLivesMatter, #TCOT, and the evolution of collective identities. *Ethnic and Racial Studies*, *40*(11), 1797–1813. https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1335422

Saddik, B., Al-Bluwi, N., Shukla, A., Barqawi, H., Alsayed, H. A. H., Sharif-Askari, N. S., Temsah, M. H., Bendardaf, R., Hamid, Q., & Halwani, R. (2021). Determinants of healthcare workers perceptions, acceptance and choice of COVID-19 vaccines: a cross-sectional study from the United Arab Emirates. *Human Vaccines and Immunotherapeutics*, *00*(00), 1–9. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1994300

Sarinho, E., Goudouris, E., & Solé, D. (2021). BCG vaccine: Worrying proposal for COVID-19. *Vaccine*, *39*(3), 460–462. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.12.026

Sihombing, D. Y., & Nataliani, Y. (2021). Analisis Interaksi Pengguna Twitter pada Strategi Pengadaan Barang Menggunakan Social Network Analysis. *Sistemasi*, *10*(2), 434. https://doi.org/10.32520/stmsi.v10i2.1289

Susheela, A. T., Mahajan, D., & Porter, L. (2022). Covid-19 Vaccine Hesitancy in Nursing Home Staff and the Need for Ongoing Education and Vaccine Access. *Clinical Medical Reviews and Reports*, *4*(1), 01–05. https://doi.org/10.31579/2690-8794/103

Suwantika, A. A., Boersma, C., & Postma, M. J. (2020). The potential impact of COVID-19 pandemic on the immunization performance in Indonesia. *Expert Review of Vaccines*, *19*(8), 687–690. https://doi.org/10.1080/14760584.2020.1800461

Zhang, H., & Liang, X. (2018). 2018 Global Marketing Conference at Tokyo Proceedings 2018. *2018 Global Marketing Conference at Tokyo Proceedings 2018*, *201*(July), 1119–1129.

Zimmerman, R. K. (2021). Helping patients with ethical concerns about COVID-19 vaccines in light of fetal cell lines used in some COVID-19 vaccines. *Vaccine*, *39*(31), 4242–4244. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.06.027

JPI: JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

Universitas Bangka Belitung
Jurusan Ilmu Politik

Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang,
Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka
Belitung, 33172
editor@jpi.ubb.ac.id